

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia

Annual Financial Statements of Bank Indonesia

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

 (dalam jutaan Rupiah)
 (in million Rupiah)

Uraian Description	2014	2013	2012	2011	2010
Jumlah Aset/Liabilitas Total Assets/Liabilities	1.812.788.971	1.648.675.453	1.519.526.148	1.371.841.819	1.180.012.328
Modal *) Capital	2.948.029	2.948.029	2.948.029	2.948.029	2.948.029
Jumlah Penghasilan Revenue	93.100.472	71.113.428	40.035.595	17.349.145	6.051.910
Jumlah Beban Expenses	38.001.463	28.915.937	31.939.365	42.562.149	34.034.366
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Surplus (Deficit) Ongoing Year	41.231.508	37.407.095	5.819.693	(25.148.713)	(21.159.188)

Keterangan:
 Notes

 *) Modal sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 Capital as stipulated within the regulations

RASIO MODAL CAPITAL RATIO **)


Keterangan:
 Notes

 **) Merupakan rasio antara Jumlah Modal dengan Kewajiban Moneter
 Is a ratio of capital to monetary liabilities

OPINI AUDITOR EKSTERNAL (BPK) EXTERNAL AUDIT OPINION BY THE SUPREME AUDIT AGENCY

12

 Tahun Berturut-turut "wajar tanpa pengecualian"
 Years in a Row "unqualified opinion"

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN BANK INDONESIA (KAKBI) BANK INDONESIA ACCOUNTING AND FINANCIAL POLICY

 MULAI STARTING FROM
1 JANUARI
2014

 Bank Indonesia menerapkan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
 Bank Indonesia implemented the Bank Indonesia Accounting and Financial Policy as a guideline in preparing financial report

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
BANK INDONESIA TAHUN 2014
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS BANK INDONESIA 2014



Daftar Isi

Table of Contents

iv	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan <i>Independent Auditor's Report on the Financial Statement</i>
01	Laporan Posisi Keuangan <i>Statement of Financial Position</i>
03	Laporan Surplus Defisit <i>Statement of Surplus Deficit</i>
05	Catatan Atas Laporan Keuangan: <i>Notes to Financial Statements:</i>
05	A. Informasi Umum <i>General Information</i>
14	B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan <i>Summary of Significant Accounting Policies</i>
44	C. Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>
45	D. Penyajian Kembali Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit <i>Restatements of Financial Position and Surplus Deficit</i>
70	E. Perincian Pos Laporan Keuangan <i>Financial Statement Details</i>
101	F. Transaksi Dengan Pihak Berelasi <i>Transactions with Related Parties</i>
102	G. Komitmen dan Kontinjensi <i>Commitments and Contingencies</i>
114	Lampiran: Daftar Singkatan <i>Appendix: List of Abbreviations and Acronyms</i>

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Independent Auditor's Report on the Financial Statement





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
State Audit Board of the Republic of Indonesia

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Independent Auditor's Report on the Financial Statement

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Posisi Keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan Laporan Surplus Defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Bank Indonesia. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Bank Indonesia, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Pursuant to Law No. 15/2004 on Audit of State Financial Management and Responsibilities, Law No. 15/2006 on the State Audit Board and Law No. 23/1999 on Bank Indonesia as most recently amended by the Law No. 6/2009, the State Audit Board (BPK) has audited Bank Indonesia's Statement of Financial Position as per December 31, 2014 and 2013 and Statement of Surplus (Deficit) for the years ended on those dates as well as Notes to the Financial Statements. These financial statements are the responsibility of Bank Indonesia. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

BPK conducted audits in accordance with the State Financial Audit Standards. The standards require us to plan and perform audits to obtain reasonable assurances that the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimations made by Bank Indonesia, evaluating the compliance with laws, the reliability of internal control system which has material impacts on the financial statements, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. BPK believes that this audit provide a reasonable basis for our opinion.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Surplus Defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir B.

Bank Indonesia memberlakukan Kebijakan Akuntansi dan Keuangan Bank Indonesia secara prospektif sejak 1 Januari 2014. Bank Indonesia menerapkan dampak perubahan kebijakan akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Butir B.5 hanya untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut. Sebagai informasi komparatif, Bank Indonesia telah menyajikan kembali pos-pos keuangan untuk Tahun 2013 seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir D.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern disajikan dalam Laporan Nomor 52/01.b/LHP/XV/04/2015 dan Nomor 52/01.c/LHP/XV/04/2015 tanggal 30 April 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

In our opinion, the financial statements as mentioned above presents fairly, in all material respects, the financial position of Bank Indonesia as on December 31, 2014 and 2013, and the Statements of Surplus (Deficit) of the years ended on those dates are in conformity with generally-accepted accounting principles and specific accounting policies generally adopted by Central Banks, as discussed in Note B to the Financial Statements.

Prospectively, Bank Indonesia put the Finance and Accounting Policy into effect starting from January 1, 2014. Bank Indonesia applied the impacts of accounting policy changes as described in the Notes B.5 to the Financial Statements only for the transactions, events, and other conditions that occurred after the date of the policy change. As comparative information, Bank Indonesia has restated 2013 financial posts as described in Notes D to the Financial Statements.

To obtain reasonable assurances that the financial statements is fairly presented, BPK conducted a compliance audit on laws, regulations and internal control systems. The report on finding of our test on the compliance with the laws and regulations in effect, and the report on findings of our test on Bank Indonesia's internal control system are presented in reports No. 52/01.b/LHP/XV/04/2015 and 52/01.c/LHP/XV/04/2015 both dated April 30, 2015, which are integral parts of these statements.

Jakarta, 30 April 2015
Jakarta, April 30, 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
STATE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan
Auditor in Charge

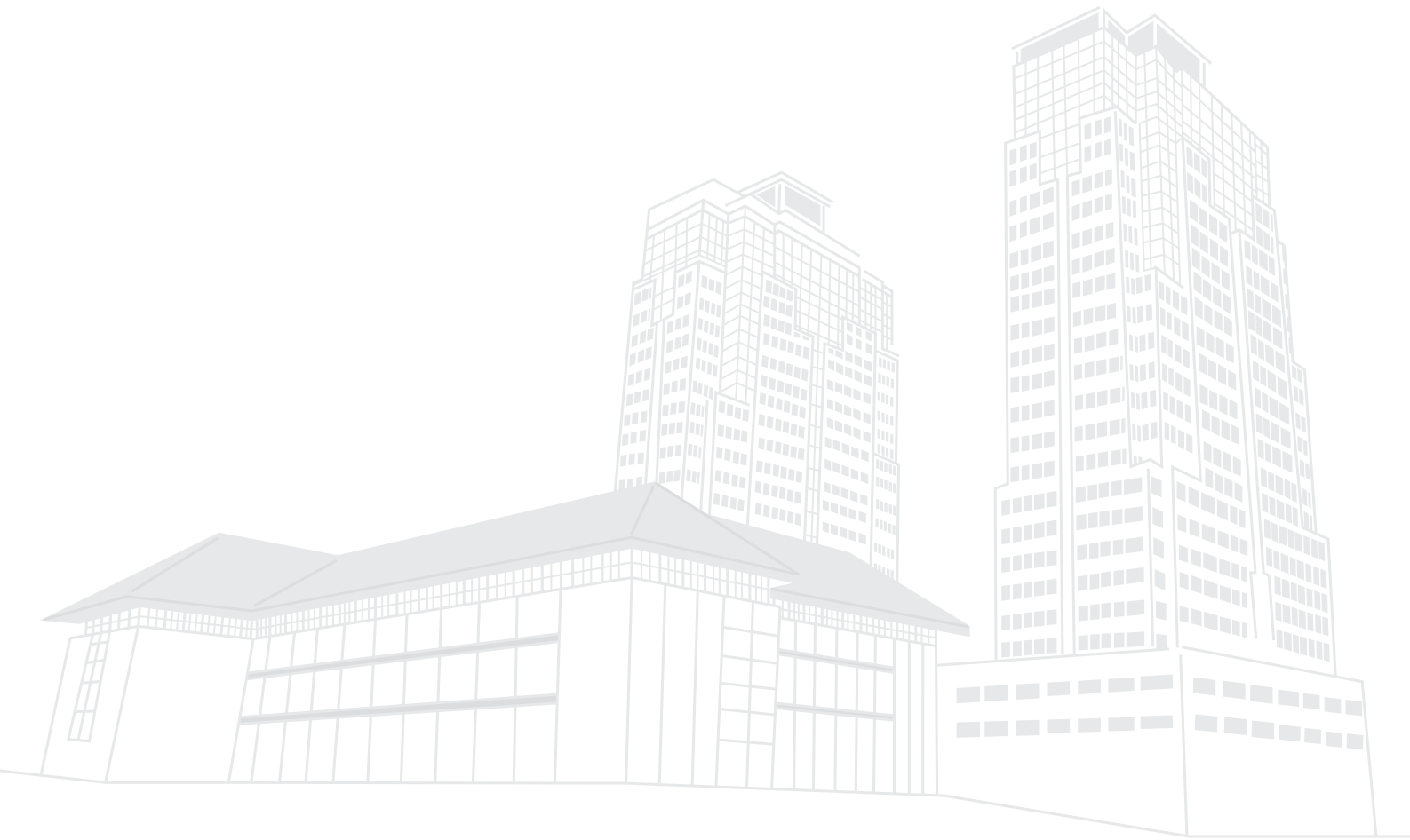
Signed

Slamet Kurniawan, MSc, Ak.
Register Negara Nomor D-14825
State Register Number D-14825



Laporan Keuangan

Financial Statements



BANK INDONESIA				
LAPORAN POSISI KEUANGAN		STATEMENT OF FINANCIAL POSITION		
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)		As of December 31, 2014 and December 31, 2013 (In IDR million)		
	Catatan <i>Notes</i>	31 Desember 2014 <i>December 31, 2014</i>	31 Desember 2013 (Disajikan Kembali) <i>December 31, 2013</i> (As Restated)	
ASET				ASSETS
1. Emas	B.9, E.1	37.441.928	36.757.308	1. Gold
2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.11, E.2	1.490.095.581	1.320.110.600	2. Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation
2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	B.11, E.2	134.444.810	116.124.369	2.1. Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
2.2. Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	B.12, E.2	1.403.251	1.161.504	2.2. Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	B.11, E.2	1.354.247.520	1.202.824.727	2.3. Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency
3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	B.13, E.3	31.731.041	33.060.049	3. Receivables from the IMF
4. Tagihan	E.4	230.568.589	237.158.546	4. Claims
4.1. Kepada Pemerintah	B.14, E.4	229.135.648	234.952.818	4.1. Claims on the Government
4.2. Kepada Bank	B.15, E.4	1.432.941	2.205.728	4.2. Claims on Banks
5. Aset Non Kebijakan	E.5	22.951.832	21.588.950	5. Other Assets
5.1. Penyertaan	B.16, E.5	819.923	850.343	5.1. Participating Interest in Domestic and International Institutions
5.2. Aset Keuangan	B.17, E.5	2.122.832	3.435.290	5.2. Other Financial Assets
5.3. Aset Tetap dan Lainnya	B.18, E.5	20.009.077	17.303.317	5.3. Property and Equipment
TOTAL ASET		1.812.788.971	1.648.675.453	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements.

BANK INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2014 and December 31, 2013
(In IDR million)

	Catatan <i>Notes</i>	31 Desember 2014 <i>December 31, 2014</i>	31 Desember 2013 <i>(Disajikan Kembali)</i> <i>December 31, 2013</i> <i>(As Restated)</i>	
LIABILITAS				LIABILITIES
1. Uang Dalam Peredaran	B.10, E.6	528.549.571	500.030.818	1. <i>Currency in Circulations</i>
2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.11, E.7	880.072.254	765.001.650	2. <i>Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation</i>
2.1. Giro Bank	B.11, E.7	362.383.166	322.527.545	2.1. <i>Banks Demand Deposits</i>
2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	B.11, E.7	373.103.654	293.894.235	2.2. <i>Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah</i>
2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah	B.12, E.7	31.336.162	21.914.527	2.3. <i>Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah</i>
2.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	B.11, E.7	112.079.884	126.665.343	2.4. <i>Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency</i>
2.5. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing	B.12, E.7	1.169.388	0	2.5. <i>Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency</i>
3. Liabilitas Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	B.13, E.8	35.683.248	37.174.934	3. <i>Counterpart of Special Drawing Rights Allocated by the IMF</i>
4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	B.14, E.9	69.994.425	60.646.665	4. <i>Liabilities to the Government</i>
4.1. Giro	B.14, E.9	69.931.641	60.569.929	4.1. <i>Demand Deposits</i>
4.2. Pinjaman	B.14, E.9	62.784	76.736	4.2. <i>Borrowings from Government</i>
5. Kewajiban Non Kebijakan	B.20, B.31 B.32, E.10	22.501.783	6.454.545	5. <i>Other Liabilities</i>
6. Selisih Revaluasi	B.21, E.11	158.268.155	202.878.814	6. <i>Revaluation Reserves</i>
7. Modal	B.22, E.12	2.948.029	2.948.029	7. <i>Capital</i>
8. Akumulasi Surplus (Defisit)	E.13	114.771.506	73.539.998	8. <i>Accumulated Surplus (Deficit)</i>
8.1. Cadangan Umum	E.13	57.397.040	22.924.506	8.1. <i>General Reserves</i>
8.2. Cadangan Tujuan	E.13	16.142.958	13.208.397	8.2. <i>Statutory Reserves</i>
8.3 Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	E.13	41.231.508	37.407.095	8.3. <i>Current Year Surplus (Deficit)</i>
TOTAL LIABILITAS		1.812.788.971	1.648.675.453	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements.

BANK INDONESIA				
LAPORAN SURPLUS DEFISIT			STATEMENT OF SURPLUS DEFICIT	
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)			For the Period of January 1 to December 31, 2014 and January 1 to December 31, 2013 (In IDR million)	
	Catatan Notes	1 Januari - 31 Desember 2014 January 1 - December 31, 2014	1 Januari - 31 Desember 2013 (Disajikan Kembali) January 1 - December 31, 2013 (As Restated)	
PENGHASILAN				REVENUES
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	E.15	89.088.999	68.543.024	1. Monetary Policy Implementation
1.1. Pendapatan Bunga	B.23, E.15	28.831.434	25.241.045	1.1. Interest Income
1.2. Pendapatan Imbalan	B.24, E.15	0	0	1.2. Income from Sharia-based Transactions
1.3. Transaksi Aset Keuangan	B.25, E.15	7.924.352	9.407.287	1.3. Net Result of Financial Transactions
1.4. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing	B.26, E.15	51.971.100	33.568.134	1.4. Net Result of Foreign Currency Transactions
1.5. Lainnya	E.15	362.113	326.558	1.5. Others
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.27, E.16	355.189	1.690.743	2. Payment System Services
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.28, E.17	119	115.439	3. Macroprudential Regulation and Supervision
4. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan	B.29, E.18	257.038	272.203	4. Income from Providing Fund
5. Pendapatan Lainnya	E.19	3.399.127	492.019	5. Other Income
JUMLAH PENGHASILAN		93.100.472	71.113.428	TOTAL REVENUES
BEBAN				EXPENSES
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	E.20	23.206.834	18.205.381	1. Monetary Policy Implementation
1.1. Beban Bunga	B.23, E.20	21.691.645	17.099.846	1.1. Interest Expenses
1.2. Beban Imbalan	B.24, E.20	1.054.449	688.825	1.2. Sharia-based Transaction Expenses
1.3. Lainnya	E.20	460.740	416.710	1.3. Other Expenses
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.27, E.21	2.925.977	2.709.357	2. Payment System Services
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.28, E.22	77.856	169.624	3. Macroprudential Regulation and Supervision
4. Remunerasi kepada Pemerintah	B.30, E.23	3.513.071	2.610.495	4. Remuneration on Government General Deposits
5. Beban Umum dan Lainnya	E.24	8.277.725	5.221.080	5. General and Administrative Expenses
JUMLAH BEBAN		38.001.463	28.915.937	TOTAL EXPENSES
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK PAJAK	B.32, E.14	55.099.009 (13.867.501)	42.197.491 (4.790.396)	SURPLUS (DEFICIT) BEFORE TAXES TAXES
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK		41.231.508	37.407.095	SURPLUS (DEFICIT) AFTER TAXES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Notes To Financial Statements



A. INFORMASI UMUM

1. Pendirian, Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Nasionalisasi De Javasche Bank NV pada bulan Desember 1951 ditindaklanjuti dengan pembentukan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tanggal 2 Juni 1953 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1953. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendirian Bank Indonesia dimaksudkan untuk bertindak sebagai bank sentral Indonesia.

Dinamika kondisi ekonomi, sosial, khususnya politik, berpengaruh terhadap peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ditandai dengan penggantian maupun perubahan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia. Tidak hanya pada tataran Undang-Undang, ihwal bank sentral juga menjadi substansi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23D bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang.

Dengan landasan konstitusional yang jelas dan kuat tersebut maka sebagai implementasi dari amanat UUD 45 Pasal 23D, selain statusnya sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, juga diatur bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, serta dinyatakan

A. GENERAL INFORMATION

1. Establishment, Status, and Domicile of Bank Indonesia

Following the nationalization of De Javasche Bank NV in December 1951, Bank Indonesia was established under the Act Number 11 of 1953 on the Establishment of the Principal Act of Bank Indonesia on June 2, 1953 which took effect on July 1, 1953. The Act stipulated Bank Indonesia's role as the Indonesian Central Bank.

The role of Bank Indonesia as the Central Bank had eventually developed due to economic, social, and particularly political dynamics, marked by substitutes or amendments made to the Bank Indonesia Act, as most currently made by Act Number 6 of 2009 on Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 on the Second Amendment to Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia as Act referred to as Bank Indonesia Act. In addition to the Act amendment, the Central Bank matters were also included in the substance of the Fourth Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) as stipulated in Article 23D that the State has a Central Bank with structure, status, authority, responsibility, and independence, regulated by Law.

With clear-cut constitutional basis, the implementation of Article 23D of UUD 45, in addition to the status as the Central Bank of the Republic of Indonesia, stipulates that Bank Indonesia is an independent State institution to carry out duties, free from government interference and/or other parties, established as a legal entity with clear authority to manage its own assets apart from

sebagai badan hukum agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Agar independensi dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) guna dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut wajib diumumkan kepada publik melalui media massa.

Adapun kedudukan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia tersebut di atas adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia.

2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Adapun tugas mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut dinyatakan antara lain bahwa lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain mikroprudensial, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu, dalam

the State Budget. To perform duties independently with utmost responsibility, Bank Indonesia is required to be transparent and in compliance with the principles of public accountability and open for public scrutiny, including the obligation to prepare financial statement to be audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI). The audit result must be publicly announced through the mass media.

As stipulated in the Bank Indonesia Act, the domicile of Bank Indonesia is in the capital city of the Republic of Indonesia.

2. Objectives and Duties of Bank Indonesia

Pursuant to the Bank Indonesia Act, the objective of Bank Indonesia is to achieve and maintain stability in the value of the Rupiah. To achieve this objective, Bank Indonesia has the following duties:

- a. *Formulating and implementing the monetary policy;*
- b. *Regulating and safeguarding uninterrupted operation of payment system;*
- c. *Regulating and supervising the banking sector*

The duties to regulate and supervise the banks as mentioned in letter (c) has been handed over from Bank Indonesia to the Financial Services Authority (OJK) as of December 31, 2013 under the Act Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority. This Act stipulated the scope of macroprudential regulation and supervision, which included regulating and supervising other than microprudential, as the duty and authority of Bank Indonesia. Hence, the Financial Services Authority should coordinate with Bank Indonesia upon formulating banking supervision

melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain mengenai kewajiban pemenuhan modal minimum bank, produk perbankan, transaksi derivatif dan kegiatan usaha bank lainnya, serta penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*. Adapun dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk kategori *systemically important bank* dan/atau bank lainnya, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputy Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada posisi tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Gubernur	: Agus D.W. Martowardojo
Deputy Gubernur Senior	: Mirza Adityaswara
Deputy Gubernur	: 1. Halim Alamsyah
	2. Ronald Waas
	3. Perry Warjiyo
	4. Hendar

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Bank Indonesia, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Sedangkan calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.

regulations, such as capital adequacy ratio, banking products, derivatives, and other banking business activities, as well as concluding any banking institution to be categorized as systemically important bank. To carry out its functions, duties, and authorities, Bank Indonesia may conduct direct examination on certain banks categorized as systemically important banks and/or other banks with prior written notice to the Financial Services Authority.

3. The Board of Governors of Bank Indonesia

Pursuant to the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia is led by the Board of Governors comprising one Governor and one Senior Deputy Governor, with at least 4 (four) or maximum of 7 (seven) Deputy Governors. As of December 31, 2014, members of the Board of Governors were:

<i>Governor</i>	<i>: Agus D.W. Martowardojo</i>
<i>Senior Deputy Governor</i>	<i>: Mirza Adityaswara</i>
<i>Deputy Governor</i>	<i>: 1. Halim Alamsyah</i>
	<i>2. Ronald Waas</i>
	<i>3. Perry Warjiyo</i>
	<i>4. Hendar</i>

Under the Article 41 of Bank Indonesia Act, the Governor, Senior Deputy Governor, and Deputy Governors are nominated and appointed by the President upon approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR). The Deputy Governor candidates, in particular, are proposed by the President based on the recommendation from the Governor.

4. Jumlah Kantor dan Jumlah Pegawai Bank Indonesia

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta. Satuan kerja di Bank Indonesia per 31 Desember 2014 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) satuan kerja di Kantor Pusat, dan 43 (empat puluh tiga) Kantor Perwakilan Bank Indonesia, yang terdiri atas 31 (tiga puluh satu) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, dan 12 (dua belas) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/Kabupaten, serta 4 (empat) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia. Jumlah pegawai Bank Indonesia per 31 Desember 2014 sebanyak 5.924 pegawai, termasuk diantaranya 1113 pegawai yang ditugaskan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Organisasi Bank Indonesia sebagaimana lampiran 1.

5. Modal Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau Hasil Revaluasi Aset.

Selanjutnya, diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

- a. 30% untuk Cadangan Tujuan; dan
- b. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter.

Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%.

4. Number of Office and Employees of Bank Indonesia

Bank Indonesia's head office is located on M.H. Thamrin Street Number 2, Jakarta. As of December 31, 2014, Bank Indonesia has 29 (twenty nine) Departments at the head office, and 43 (forty-three) Domestic Representative Offices, comprising 31 (thirty-one) Provincial Representative Offices, and 12 (twelve) City/Regency Representative Offices, and four (4) Foreign Representative Offices. Bank Indonesia has 5,924 employees as of December 31, 2014, including 1,113 employees assigned to the Financial Services Authority. The Organization of Bank Indonesia is presented in Appendix 1.

5. The Capital of Bank Indonesia

Pursuant to the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia's capital is set at a minimum of IDR2,000,000,000,000.00 (two trillion Rupiah). This capital must be increased up to 10% (ten percent) of the total monetary liabilities and funded by the General Reserve or Asset Revaluation.

It is also stipulated that surplus from Bank Indonesia's activities will be allocated as follows:

- a. 30% for the Statutory Reserves; and*
- b. The remaining balance for the General Reserves, used for raising the Capital and General Reserves to meet the 10% minimum requirement of the total monetary liabilities.*

During the settlement of Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI), the Statutory Reserves is set at 10%.

Cadangan Umum dipergunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembaruan aset tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

The General Reserves is used to increase capital or to cover the deficit of Bank Indonesia, while the Statutory Reserves is used for replacing or revitalizing fixed assets, necessary equipment procurement, and organizational and human resources development to support the duty and authority of Bank Indonesia, as well as the participating interest needed to implement Bank Indonesia's tasks.

6. Dasar Hukum dan Tujuan Laporan Keuangan Bank Indonesia

6. Legal Basis and Purpose of Bank Indonesia's Financial Statements

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia.

Pursuant to the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia must complete Bank Indonesia's Annual Financial Statements within 30 (thirty) days after the end of financial year.

Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada BPK-RI untuk dilakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut selesai disusun. Hasil pemeriksaan BPK-RI tersebut disampaikan kepada DPR.

Bank Indonesia is obliged to submit Bank Indonesia's Annual Financial Statements to BPK-RI for an audit, within 7 (seven) days after the statement is completed. The audit result will then be presented to the DPR.

Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

The objective of the financial statements of Bank Indonesia is to demonstrate the achievements of management and the fulfillment of management's responsibilities on financial resources use in achieving and maintaining the stability of the rupiah, which includes information on the impacts of policies on the financial position of Bank Indonesia and the surplus / deficit of Bank Indonesia.

Penyajian laporan keuangan Bank Indonesia:

The presentation of Bank Indonesia's financial statements:

- a. Tidak dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, karena stabilitas nilai Rupiah tidak dapat diukur dalam satuan mata uang.

- a. *Cannot be intended to assess the level of achievement of the objective of Bank Indonesia, namely, rupiah stability, since it is incapable of being assessed in solely monetary terms.*

b. Tidak dimaksudkan untuk menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Meskipun penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan mata uang tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun dampak keuangan dari upaya Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang, sehingga Laporan Keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.

7. Kebijakan Utama Bank Indonesia yang Berdampak Signifikan pada Keuangan Bank Indonesia

Selama tahun 2014, respon kebijakan difokuskan pada upaya menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan diarahkan untuk memastikan inflasi tetap terkendali, defisit neraca transaksi berjalan menuju ke tingkat yang lebih sehat, serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Di awal tahun hingga November 2014, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter dan makroprudensial yang cenderung ketat. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, pada tanggal 18 November 2014 Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan moneter yang cenderung ketat, sementara kebijakan makroprudensial lebih akomodatif secara selektif. Selain itu, Bank Indonesia terus meningkatkan upaya pendalaman pasar keuangan dan mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah.

Implementasi kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2014 yang berdampak signifikan pada keuangan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

b. *Cannot be intended to provide information on efficiency or otherwise in the use of resources in achieving the objective of Bank Indonesia. Although the use of resources by Bank Indonesia may be measured in monetary terms, but the achievement of its objective cannot be measured in monetary terms. Consequently, efficiency cannot be assessed by comparing the level of achievement of Bank Indonesia's objective with the cost incurred in achieving that objective.*

Nevertheless, the financial effects of the bulk of the endeavors and activities undertaken by Bank Indonesia so as to achieve its objective may be measured in monetary terms so that the financial statements of Bank Indonesia can be used to assess the financial effects of Bank Indonesia's efforts to achieve its objective.

7. Bank Indonesia's Prime Policy with Significant Impacts on Bank Indonesia's Financial Position

During 2014, the policy was focused on maintaining economic stability. The policy was aimed to ensure that the inflation remained under control, current account deficit moved towards a more healthy level, and macroeconomic and financial system stability stayed under control. From the beginning of the year to November 2014, Bank Indonesia adopted tight monetary and macroprudential policy. Following the subsidized-fuel price increase, on November 18, 2014 Bank Indonesia strengthened its tight monetary policy mix, while macroprudential policy was more selectively accommodated. In addition to that, Bank Indonesia continued to increase financial markets deepening and intensify the coordination with the Government.

The following are Bank Indonesia's policy implementations in 2014 with significant impacts on Bank Indonesia financial position:

- a. Pada periode Januari hingga pertengahan November 2014, Bank Indonesia mempertahankan BI rate pada level 7,50% dengan suku bunga *Lending Facility* dan *Deposit Facility* masing-masing tetap pada level 7,50% dan 5,75%. Kebijakan tersebut ditempuh dengan pertimbangan inflasi secara umum masih pada tingkat terkendali dan belum membahayakan pencapaian sasaran inflasi sebesar $4,5\% \pm 1\%$ pada tahun 2014 dan $4\% \pm 1\%$ pada tahun 2015.
- b. Merespon kebijakan reformasi subsidi BBM yang ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia pada tanggal 18 November 2014 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 bps menjadi 7,75%, dengan suku bunga *Lending Facility* naik sebesar 50 bps menjadi 8,00% dan suku bunga *Deposit Facility* tetap pada level 5,75% yang berlaku efektif sejak 19 November 2014. Kenaikan BI rate ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasaran, yaitu $4 \pm 1\%$ pada tahun 2015. Kebijakan tersebut juga konsisten dengan kemajuan dalam mengelola defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat. Pelebaran koridor suku bunga operasi moneter dimaksudkan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Sepanjang tahun 2014, inflasi tetap terkendali di tengah tekanan yang tinggi bersumber dari *administered prices* dan *volatile food*. Inflasi pada tahun 2014 terkendali pada *single digit* sebesar 8,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2013 sebesar 8,38% (yoy). Sementara itu, inflasi inti dapat dikendalikan dan mencapai 4,93% (yoy) atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,98% (yoy).
- c. Di sisi nilai tukar, Bank Indonesia tetap mengarahkan agar nilai tukar Rupiah bergerak selaras dengan kondisi fundamentalnya dengan volatilitas yang
- a. *During the period of January to mid-November 2014, Bank Indonesia maintained the BI rate at 7.50% with interest rates on Lending Facility and Deposit Facility at 7.5% and 5.75% respectively. The policy was taken with a consideration that the inflation was still at a controlled level and had posed no risk to inflation target achievement of $4.5\% \pm 1\%$ in 2014 and $4\% \pm 1\%$ in 2015.*
- b. *Responding to the fuel subsidy reformed policy introduced by the Government, Bank Indonesia increased the BI Rate by 25 bps to 7.75% on November 18, 2014, increasing the interest rates of Lending Facility by 50 bps to 8.00% and Deposit Facility interest rate fixed at 5.75% effective from November 19, 2014. The BI rate increase was aimed at curbing inflation expectations and at ensuring the inflationary pressure following the subsidized fuel price hike stayed under control and temporary, and could return to the targeted track at $4 \pm 1\%$ in 2015. This policy was also aligned with the improvement in current account deficit management. The widening interest rate corridor on monetary operation was intended to maintain adequate liquidity and to encourage the deepening of financial markets. During 2014, the inflation remained under control during the high pressure from administered prices and volatile food. The inflation in 2014 was well-maintained at a single digit of 8.36% (yoy), lower than the inflation rate in 2013 of 8.38% (yoy). Meanwhile, the primary inflation was curbed at 4.93% (yoy), dropped from 4.98% (yoy) in the previous year.*
- c. *On exchange rate, Bank Indonesia maintained Rupiah movement to be aligned with the fundamental conditions in a well-maintained volatility. On average,*

- terjaga. Nilai tukar Rupiah secara rata-rata melemah sebesar 12,05% dari Rp10.445,00/USD pada tahun 2013 menjadi Rp11.876,00/USD pada tahun 2014 sesuai dengan fundamentalnya.
- d. Bank Indonesia mendorong upaya pendalaman pasar keuangan dengan menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DPM tanggal 28 Januari 2014 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, yang bertujuan untuk menyediakan outlet lindung nilai bagi perbankan. Ketentuan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. *Outlet* lindung nilai ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah sehingga mendukung stabilitas pasar uang dalam rangka mencapai dan memelihara nilai tukar Rupiah.
- e. Peningkatan efektivitas pengaturan Operasi Moneter Syariah (OMS) dilakukan dengan cara menggabungkan Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ke dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah dan Surat Edaran Nomor 16/13/DPM tanggal 24 Juli 2014 tentang Tata Cara Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) Syariah dalam Valuta Asing, yang berlaku mulai bulan Agustus 2014.
- f. Penguatan operasi moneter tahun 2014 diimplementasikan dengan melanjutkan penyerapan eksekusi likuiditas melalui instrumen operasi moneter bertenor lebih panjang (*lengthening*), mengurangi proporsi penggunaan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara bertahap (*gradual*), memaksimalkan penggunaan Surat Berharga Negara (SBN) milik Bank Indonesia melalui *Reverse Repo* SBN dan memperkuat peran Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dalam operasi moneter. Namun
- Rupiah exchange rate weakened by 12.05%, from IDR10,445.00/USD in 2013 to IDR11,876.00/USD in 2014, congruous with its fundamental.*
- d. Bank Indonesia encouraged the financial market deepening by issuing Bank Indonesia Circular Letter Number 16/2/DPM dated January 28, 2014 on the Swap Hedging Transaction to Bank Indonesia, aimed to provide swap hedging outlet for the banks. This regulation was an implementation of Bank Indonesia Regulation Number 15/17/PBI/2013 dated December 24, 2013 on the Swap Hedging Transaction to Bank Indonesia. This swap hedging outlet was expected to reduce the pressure on Rupiah, thus supporting the stability of financial markets in achieving and maintaining Rupiah exchange rate.*
- e. Improvement for Sharia Monetary Operation management effectivity was carried out by syndicating Bank Indonesia Regulation on Bank Indonesia Sharia Certificate with Bank Indonesia Regulation Number 16/12/PBI/2014 on Sharia Monetary Operation and Circular Number 16/13/DPM dated July 24, 2014 on Procedures on Sharia Term Deposit Placement in Foreign Exchange, which took effect in August 2014.*
- f. 2014 Monetary operation strengthening was implemented by continuously absorbing liquidity excess through longer tenor monetary operation instruments, gradual reduction of Bank Indonesia Certificates (SBI) use, maximizing the use of Government Securities owned by Bank Indonesia through Reverse Repo SBN and strengthening the role of Bank Indonesia Deposit Certificates in monetary operations. However, Bank Indonesia continued to encourage more active transactions*

Bank Indonesia tetap mendorong bank agar lebih aktif bertransaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) agar bank dapat lebih mandiri dalam mengelola likuiditasnya.

- g. Melanjutkan kebijakan tahun 2013, Bank Indonesia melakukan kebijakan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM). Untuk Bank Umum Konvensional diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, bank wajib memenuhi GWM dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing. Untuk Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- h. Untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, Bank Indonesia menjaga ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2014 pada tanggal 17 Agustus 2014. Ciri utama dari uang kertas pecahan Rp100.000,00 tersebut adalah terdapat frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia" dan ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Di samping itu, untuk menjaga kualitas uang yang ada di masyarakat, Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang Rupiah yang sudah tidak layak edar, dan diganti dengan uang layak edar (*clean money policy*).

Kebijakan tersebut di atas, tercermin dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan khususnya pada pos Aset

from the banks in the Interbank Money Market for a more independent liquidity management.

- g. *Continuing the policy in 2013, Bank Indonesia introduced Bank Minimum Reserve Requirements (GWM) policy. For Commercial Conventional Banks, it was stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currencies for Commercial Conventional Bank, that the banks are required to comply with the GWM in Rupiah and Foreign Currencies. For Sharia Banking and Business Unit, it was stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Bank Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currencies for Sharia Banking and Business Unit.*
- h. *To support uninterrupted economic activity, Bank Indonesia strived to maintain the availability of currency acceptable for circulation in Indonesia. Furthermore, to implement the mandate of Act Number 7 of 2011 on Currency, Bank Indonesia issued 2014 emission IDR100,000.00 bank notes on August 17, 2014. The distinguished characteristic of these bank notes is the phrase of "Negara Kesatuan Republik Indonesia", signed by the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance. Additionally, to maintain acceptable physical quality of cash money in circulation, Bank Indonesia Rupiah applied clean money policy by culling unclean bank notes in exchange for the clean ones.*

This policy is reflected on Bank Indonesia's Financial Statements, presented in the Statement of Financial Position, particularly on Assets and Liabilities under

dan Liabilitas untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dan pos Uang Dalam Peredaran. Sedangkan dalam Laporan Surplus Defisit, tercermin dalam pos Pendapatan/Beban Bunga, pos Pendapatan/Beban Imbalan, pos Pendapatan/Beban Transaksi Aset Keuangan, pos Pendapatan/Beban Selisih kurs Transaksi Valuta Asing, dan pos Pendapatan/Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran.

Selain kebijakan yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut di atas, Bank Indonesia juga melanjutkan berbagai kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2013, antara lain kebijakan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) – *Building Stock*, dan lelang *Swap* valas (*Foreign Exchange Swap*).

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia mengacu pada standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Indonesia yang disebut Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI).

KAKBI disusun oleh Komite Penyusun KAKBI yang independen. KAKBI disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dengan penyesuaian untuk mengakomodasi keunikan bisnis entitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tidak berorientasi mencari keuntungan, dan mengacu pada konvensi dan praktek akuntansi yang lazim di bank sentral.

1. Pernyataan Kepatuhan Terhadap KAKBI

Bank Indonesia menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 berdasarkan KAKBI.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau

the Implementation of Monetary Policy and Money in Circulation account. In the Surplus Deficit Statement, they are reflected in Interest Income/Expense, Income/Expense from Sharia-based Transactions, Net Result of Financial Transactions, Net Result of Foreign Currency Transactions, and Payment System Services Income/Expense posts.

In addition to the policies introduced in 2014, Bank Indonesia also weathered the 2013 policies, including buying policy on Government Securities (SBN) - Building Stock and Foreign Exchange Swap auction.

B. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Bank Indonesia's financial statements preparation was in compliance with prevailing accounting standards referred to as Bank Indonesia Financial Accounting Policies (KAKBI).

KAKBI was prepared by the independent KAKBI Drafting Committee. KAKBI was prepared based on prevailing Financial Accounting Standards and adjusted to accommodate Bank Indonesia's unique business entity as a non-profit central bank, in compliance with accounting conventions and practices generally found in central banks.

1. KAKBI Compliance Statement

Bank Indonesia prepared and presented the Financial Statements as of December 31, 2014 based on KAKBI.

2. Financial Statement's Objectives

The objective of the financial statements of Bank Indonesia is to demonstrate the achievements of

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

3. Konsep Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban mempertimbangkan kesesuaian dengan upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Bank Indonesia mengakui penghasilan dan beban yang berasal dari transaksi yang telah direalisasikan dan transaksi unik Bank Indonesia yang telah mencapai tujuan akhir dari pelaksanaan transaksi.

4. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual.

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. Kecuali dinyatakan lain, informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep historis, kecuali untuk pos:

- a. Instrumen keuangan pelaksanaan kebijakan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
- b. Instrumen derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
- c. Liabilitas imbalan pascakerja yang diukur sebesar nilai kini imbalan pascakerja dikurangi nilai aset bersih dana pensiun, ditambah keuntungan aktuarial yang belum diakui, dikurangi beban jasa masa lalu yang belum diakui dan kerugian aktuarial yang belum diakui.

management and the fulfillment of management's responsibilities over the allocation of financial resources use in achieving and maintaining the stability of the rupiah, which includes information on the impacts of policies on the financial position of Bank Indonesia and the surplus/deficit of Bank Indonesia.

3. Concept of Revenue and Expense Recognition

Revenue and expense recognition and measurement took into account the appropriateness with the efforts to achieve Bank Indonesia's objectives.

Bank Indonesia recognized revenue and expense derived from transactions that had been realized and Bank Indonesia's unique transactions that had met the ultimate objectives of the transactions.

4. Basis for Preparation of the Financial Statements

The financial statement was prepared based on an accrual basis.

The financial statement was presented in Rupiah. Unless otherwise stated, the financial information presented had been rounded off in the nearest million Rupiah.

The financial statement was prepared based on a historical concept, except for the posts of:

- a. *Policy implementation financial instruments that are measured at fair value through revaluation;*
- b. *Derivative instruments that are measured at fair value through revaluation;*
- c. *Post-employment benefit liabilities that are measured at the present value of the post-employment benefit minus the pension fund's net asset value, plus unrecognized actuarial gains, minus any past service costs that have not been recognized and unrecognized actuarial losses.*

5. Perubahan Kebijakan Akuntansi

a. Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan *governance* melalui laporan keuangan yang didukung oleh pedoman akuntansi yang relevan dan *reliable*, Bank Indonesia membentuk suatu Komite yang independen yang bertugas untuk menyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI), yang mengadopsi standar akuntansi keuangan umum dengan modifikasi untuk menyesuaikan dengan karakteristik unik Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia Nomor 15/13/PDG/2013 ditetapkan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI). KAKBI mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 secara prospektif, artinya penerapan kebijakan akuntansi baru digunakan untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal tersebut.

KAKBI terdiri dari Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK) sebagai prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi transaksi Bank Indonesia, dan seperangkat Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) yang merupakan pengaturan perlakuan akuntansi transaksi spesifik. PKAK tersebut terdiri dari:

1) PKAK 01: Kebijakan Akuntansi

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.

2) PKAK 02: Penyajian Laporan Keuangan

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini

5. Accounting Policy Changes

a. Bank Indonesia Financial Accounting Policies (KAKBI)

To improve accountability and governance through financial statements that are supported by relevant and reliable accounting guidelines, Bank Indonesia established an independent Committee to formulate Bank Indonesia Financial Accounting Policies (KAKBI), which adopts general financial accounting standards with modifications to conform to Bank Indonesia's unique characteristics as a central bank.

Bank Indonesia Financial Accounting Policy (KAKBI) was established pursuant to the Bank Indonesia Board of Governors Regulation Number 15/13/PDG/2013. KAKBI took effect on January 1, 2014 prospectively, which meant the new accounting policy was applied for transactions, events, and other conditions that occur after this date.

KAKBI consists of the Fundamental Principles for the Preparation and Presentation of Bank Indonesia Financial Statements (PDP2LK) as the underlying principle for the accounting treatment for Bank Indonesia's transactions, and a set of Statement of Financial Accounting Policies (PKAK) that regulates the accounting treatment for specific transactions comprising:

1) PKAK 01: Accounting Policies

Bank Indonesia applies this statement for the selection and application of the accounting policies.

2) PKAK 02: Presentation of Financial Statements

Bank Indonesia applies this statement in

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan PKAK. Sesuai dengan PKAK 02 paragraf 83 diatur bahwa penyajian kembali laporan keuangan satu periode sebelumnya dipersyaratkan sebagai informasi komparatif.

preparing and presenting the financial statement generally aimed in accordance with the PKAK. In accordance with PKAK 02 paragraph 83, it is stipulated that the restatement of the financial statement of one previous period is required as comparative information.

3) PKAK 03: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini dalam akuntansi transaksi dan saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik. Untuk akuntansi transaksi dan saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi yang bersifat tidak unik, Bank Indonesia mengacu pada standar akuntansi umum.

3) PKAK 03: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Bank Indonesia applies this statement in accounting for foreign currency monetary transactions and balances related to transactions unique to Bank Indonesia. Accounting for foreign currency monetary transactions and balances that are not deemed unique to Bank Indonesia, is referred to general accounting standards.

4) PKAK 04: Emas

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi emas yang berupa emas batangan dan hak kontraktual atas emas batangan. Untuk akuntansi instrumen keuangan yang didenominasikan dalam satuan nilai tukar emas, Bank Indonesia menerapkan PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan.

4) PKAK 04: Gold

Bank Indonesia applies this statement for gold accounting that consists of gold bullion and contractual rights to gold bullion. For financial instruments accounting that are denominated in gold exchange rate units, Bank Indonesia applies PKAK 06: Policy-related Financial Instruments.

5) PKAK 05: Uang Dalam Peredaran

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi uang dalam peredaran yang meliputi kegiatan pengedaran, pencabutan dan penarikan uang Rupiah.

5) PKAK 05: Currency in Circulation

Bank Indonesia applies this statement for currency in circulation accounting which includes the distribution, removal, and withdrawal of Rupiah currency.

6) PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini untuk seluruh jenis instrumen keuangan untuk pelaksanaan kebijakan kecuali uang

6) PKAK 06: Policy-related Financial Instruments

Bank Indonesia applies this statement for all types of financial instruments that are used for the purpose of policy implementation,

Rupiah dalam penguasaan Bank Indonesia sesuai dengan PKAK 05: Uang Dalam Peredaran.

7) PKAK 07: Transaksi Tidak Unik

Bank Indonesia menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi transaksi konvensional dan tidak unik di Bank Indonesia.

Sebagai standar akuntansi, KAKBI dijabarkan dalam bentuk aturan pelaksanaan dalam berbagai Surat Edaran Bank Indonesia.

b. Hal-hal yang Berubah dengan Penerapan KAKBI

1) PKAK 02: Penyajian Laporan Keuangan

a) Perubahan komponen laporan keuangan yaitu meniadakan Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas karena tidak relevan untuk Bank Indonesia.

Bank Indonesia tidak menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan, karena Bank Indonesia menerapkan konsep teori entitas. Berdasarkan teori tersebut, laporan keuangan tidak memisahkan dengan tegas unsur liabilitas dan ekuitas. Bank Indonesia menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara. Selain itu, Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (*net worth*) Pemerintah.

except for Rupiah currency under the control of Bank Indonesia in accordance with PKAK 05: Currency in Circulation.

7) PKAK 07: Non Unique Transactions

Bank Indonesia applies this statement for conventional and non-unique transactions accounting within Bank Indonesia.

As an accounting standard, KAKBI is further elaborated as operation guidelines through a number of Bank Indonesia Circulars.

b. Changes Associated with the Implementation of KAKBI

1) PKAK 02: Presentation of Financial Statements

a) *Changes to components of the financial statement through the omission of Statement of Changes in Equity and Cash Flow Statement as it was irrelevant to Bank Indonesia.*

Bank Indonesia does not present the equity sub classification in the Statement of Financial Position or the statement of changes in equity as components of the financial statement, as Bank Indonesia applies the theoretical concept of entity. Based on this theory, the financial statement does not strictly separate the aspects pertaining to liabilities and equities. Bank Indonesia equally prioritizes all of its stakeholders. Moreover, Bank Indonesia's operation is not intended to make profit therefore the Bank Indonesia's financial statement is not intended to identify Government's net worth.

Bank Indonesia tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya tidak tercermin dari kemampuannya dalam menghasilkan kas masa depan. Selain itu, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah sehingga Bank Indonesia tidak memiliki kendala dalam menghasilkan arus kas.

- b) Perubahan format penyajian Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit sesuai dengan tugas utama Bank Indonesia.

2) PKAK 03: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

- a) Selisih karena penjabaran kurs dari aset valuta asing diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat valuta asing digunakan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu ditransaksikan lawan Rupiah atau emas.
- b) Penerapan PKAK 03 berdampak pada posisi keuangan dan surplus defisit Bank Indonesia karena berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran selisih kurs.

3) PKAK 04: Emas

Pada akhir periode laporan, emas batangan dinilai pada harga pasar London (*closing bid price*). Untuk emas yang belum memenuhi *London Good Delivery* (LGD), maka harga tersebut dikurangi dengan taksiran biaya pemurnian emas.

Bank Indonesia does not present the Cash Flow Statement, as stipulated in the rules and regulations, Bank Indonesia's accomplishments to achieve its objectives are not reflected by its ability to generate future cash. Moreover, Bank Indonesia is granted the authority to issue and circulate Rupiah currency, therefore Bank Indonesia has no difficulty to generate cash flow.

- b) Changes to the format of the Statement of Financial Position and Statement of Surplus Deficit in accordance with the main duties of Bank Indonesia.*

2) PKAK 03: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

- a) The difference from the exchange rate of foreign currency exchange-denominated assets were recognized as gains/losses at the time when the foreign currency was used in the implementation of the policy specifically transacted against the Rupiah or gold.*
- b) Application of PKAK 03 affected Bank Indonesia's financial and surplus deficit position as it related to the recognition and measurement of foreign currency differences.*

3) PKAK 04: Gold

At the end of the reporting period, gold bullion were valued based on the London market closing bid price. Gold that were not complied with the London Good Delivery (LGD) must be net of the estimated cost of refining gold.

4) PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan

- a) Pengelompokan instrumen berdasarkan model bisnis.
- b) Terdapat 2 (dua) klasifikasi untuk instrumen keuangan, yaitu nilai wajar melalui selisih revaluasi (*fair value through revaluation accounts*) untuk model bisnis instrumen keuangan tersedia digunakan setiap saat; dan biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) untuk model bisnis instrumen keuangan yang tujuannya untuk memperoleh arus kas kontraktual dari pembayaran pokok dan bunga.
- c) Penerapan PKAK 06 berdampak pada posisi keuangan dan surplus defisit karena berkaitan dengan pengukuran instrumen keuangan.

6. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan KAKBI mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dilaporkan.

7. Penjabaran Posisi dan Transaksi Dalam Valuta Asing, dan Penjabaran Posisi dan Transaksi Emas

Pada tanggal pelaporan, saldo pos moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pelaporan. Selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, disajikan sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan. Untuk selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang tidak terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang

4) PKAK 06: Policy-related Financial Instruments

- a) *Instruments grouping based on the business model.*
- b) *There were 2 (two) classifications for financial instruments, which are fair value through revaluation accounts for the available financial instrument business model that can be used at any time; and amortized cost for financial instrument business model that seeks to obtain contractual cash flow derived from principal and interest payments.*
- c) *Application of PKAK 06 affected the financial and surplus deficit position as it is was related with the measuring of the financial instruments.*

6. Use of Determination, Estimation, and Assumption

The preparation of financial statements in accordance with KAKBI requires the management to establish determination, estimation, and assumption which may impact the reported assets, liabilities, income, and expenses.

7. Translating Foreign Currency Position and Transaction, and Translating Gold Position and Transaction

At the reporting date, the foreign currency monetary balances posts are translated in Rupiah using the prevailing middle rate at the time of reporting. The differences that arises from translating foreign currency monetary balances posts, relating to transactions deemed unique to Bank Indonesia, are presented as revaluation reserves on liability groups in the Statement of Financial Position. Differences that arise from translating foreign currency monetary balances, that are not related to transactions deemed unique to Bank Indonesia, are presented as net

bersifat unik, disajikan sebagai selisih kurs valuta asing dalam Laporan Surplus Defisit. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir kepemilikan aset dan liabilitas valuta asing, diakui sebagai surplus defisit tahun berjalan. Transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs pada tanggal transaksi. Kurs tengah beberapa valuta asing utama terhadap Rupiah pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013:

result of foreign currency transactions within the Statement of Surplus Deficit. Gains and losses arising from foreign currency transactions which have achieved the substantive economic objective ownership of assets and liabilities, are recognized as current surplus deficit. Foreign currency transactions are reported in Rupiah at an exchange rate effective on the date of the transaction. The middle rates for currencies against the Rupiah as of December 31, 2014 and December 31, 2013 were:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Valuta Asing			Foreign Currency
1 EUR	15.133,27	16.821,44	1 EUR
1 GBP	19.370,34	20.096,63	1 GBP
1 AUD	10.218,23	10.875,66	1 AUD
1 SDR	18.017,85	18.771,06	1 SDR
1 NZD	9.762,29	10.020,21	1 NZD
1 USD	12.440,00	12.189,00	1 USD
1 CAD	10.734,33	11.442,94	1 CAD
100 JPY	10.424,88	11.616,88	100 JPY

8. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak lain, diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

8. Transactions with Related Parties

Transactions with related parties, which are carried out with or without the same level of prices, terms, and conditions of other parties, are stated in the Notes to the Financial Statement.

9. Emas

Emas adalah bagian dari cadangan devisa yang ditujukan antara lain sebagai penyangga likuiditas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan atau pemenuhan kewajiban dalam valuta asing.

9. Gold

Gold forms part of Bank Indonesia's foreign reserves and is intended to, among other things, a liquidity buffer to support monetary policy implementation and/or the fulfillment of obligations denominated in foreign currency.

Emas yang dimiliki Bank Indonesia terdiri dari emas batangan dan hak kontraktual atas emas batangan.

Pada saat perolehan, emas diukur berdasarkan biaya perolehan. Pada tanggal pelaporan, saldo emas diukur berdasarkan nilai wajar yaitu harga emas yang tersedia di pasar London, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah pada akhir periode pelaporan. Selisih yang timbul antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Keuntungan dan kerugian karena penghentian pengakuan diakui dalam Laporan Surplus Defisit pada tahun berjalan.

Transaksi emas dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

10. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam peredaran adalah Uang Rupiah yang berada di luar penguasaan Bank Indonesia.

Uang dalam peredaran dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum pada pecahan Uang Rupiah. Uang dalam peredaran diakui sebagai liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Rupiah yang pelaksanaannya didasarkan pada nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta

Bank Indonesia's gold consists of gold bullion and contractual rights to gold bullion.

Upon acquisition, gold is measured based on its acquisition costs. On the reporting date, the balance of gold is measured based on its fair value, specifically the gold price at the London market, which is calculated into Rupiah using the middle rate at the end of the reporting period. The difference arisen between the previous carrying amount and the amount that results from the translation of the balance is recognized as revaluation reserves derived from the liability group within the Statement of Financial Position.

Gains and losses derived from derecognition is recognized within the Statement of Surplus Deficit.

Gold transactions are translated in Rupiah using the exchange rate at the date of transaction.

10. Currency in Circulation

Currency in Circulation is Rupiah Currency that is beyond the control of Bank Indonesia.

Currency in Circulation is valued at its specified nominal value that is denominated in Rupiah. Currency in Circulation is recognized as liability within the Statement of Financial Position.

Under Act Number 7 of 2011 on Currency, Bank Indonesia coordinates with the Government in activities related to planning, printing, and destructing Rupiah currency based on the Memorandum of Understanding between Bank Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia Number 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 dated June 27, 2012 concerning the Coordination of Planning, Printing, and Destructing Rupiah Bank Notes and Coins. Moreover, the total

Pemusnahan uang Rupiah. Selain itu, jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Bank Indonesia melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap uang yang sudah tidak layak edar dan mengganti dengan uang baru. Proses pemusnahan tersebut dilakukan melalui suatu prosedur dan pengawasan pelaksanaan pemusnahan uang yang ketat.

11. Instrumen Keuangan Kebijakan

Bank Indonesia memiliki aset dan liabilitas keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

a. Aset dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan dalam Rupiah

Aset dan liabilitas keuangan untuk pelaksanaan kebijakan dalam Rupiah bertujuan sebagai instrumen moneter dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Aset dan liabilitas dalam Rupiah yang digunakan Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan moneter terdiri dari:

- 1) Surat Berharga Negara (SBN) yang berbasis konvensional atau Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
- 2) Tagihan kepada bank umum karena transaksi pembelian surat-surat berharga dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

nominal value of the Rupiah that has been destructed is announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.

Bank Indonesia destroys unfit currency and replaces them with fresh currency. This destruction process is carried out through a strict procedure and closely monitored.

11. Policy-related Financial Instruments

Bank Indonesia has financial assets and liabilities that are used in implementing its policies.

a. Financial Assets and Liabilities Related to Policy Implementation Denominated in Rupiah

Financial Asset and Liabilities Related to Policy Implementation Denominated in Rupiah seeks to serve as monetary instruments within the context of implementing monetary policies to achieve and maintain the stability of Rupiah's value in accordance with the prescribed rules and regulations.

Rupiah-denominated assets and liabilities used by Bank Indonesia to implement monetary policies, consist of:

- 1) *Conventional Government Bonds (SBN) or Government Securities (SUN) are marketable securities in the form of promissory notes denominated in Rupiah that guarantee interest and principal payments by the Government of Indonesia, subject to its tenor.*
- 2) *Claim on banks arisen from securities sold under repurchase agreements (reverse repo) subject to the agreed price and tenor.*

- 3) Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
 - 5) Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank.
 - 6) Penempatan Berjangka Rupiah (*Term Deposit Rupiah*) adalah penempatan dana Rupiah milik peserta Operasi Pasar Terbuka secara berjangka di Bank Indonesia.
 - 7) Penempatan Dana (*Deposit Facility*) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi peserta Operasi Moneter yang akan menempatkan dananya di Bank Indonesia. Penempatan Dana memiliki jangka waktu satu hari kerja.
 - 8) Liabilitas karena transaksi penjualan surat-surat berharga dengan janji untuk dibeli kembali (*repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
 - 9) Instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah, antara lain *swap* valuta asing dan *forward* valuta asing:
 - a) Transaksi *swap* valas adalah transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama
- 3) *Placement of funds with banks within the context of the Statutory Reserve Requirements that must be met by banks in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Statutory Reserve Requirements for Banks in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Banks.*
 - 4) *Bank Indonesia Certificates (SBI) are Rupiah-denominated marketable securities that are issued by Bank Indonesia as a recognition of short-term debt.*
 - 5) *Bank Indonesia Certificates of Deposits (SDBI) are Rupiah-denominated marketable securities that are issued by Bank Indonesia as a recognition of short-term debt that can only be transacted between banks.*
 - 6) *Rupiah Term Deposits are periodic placements of Rupiah funds in Bank Indonesia owned by Open Market Operations participants.*
 - 7) *Deposit Facilities are facilities provided by Bank Indonesia for Monetary Operations participants who intend to place their funds in Bank Indonesia. Deposit Facility has a tenor of one working day.*
 - 8) *Liabilities arisen from securities sold under repurchase agreement (repo) in accordance with the agreed upon price and timeframe.*
 - 9) *Foreign currency derivative instruments against Rupiah, which include foreign currency swaps and forward:*
 - a) *Foreign currency swap transactions are two currencies exchange transactions through cash buying or selling (spot) with periodic buying or repo (forward) that are simultaneously carried out with the same bank and at the agreed upon rate on the*

dan pada kurs yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

- b) Transaksi *forward* valuta asing terhadap Rupiah adalah transaksi jual/beli valuta asing terhadap Rupiah pada kurs yang telah disepakati dengan penyerahan valutanya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Aset dan liabilitas dalam Rupiah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBN dan instrumen derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

b. Aset dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan dalam Valuta Asing

Aset dan liabilitas dalam valuta asing yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan terdiri dari:

- 1) Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.
- 2) Penempatan Berjangka Valuta Asing (*Term Deposit Valas*) adalah penempatan dana dalam valuta asing milik peserta Operasi Pasar Terbuka secara berjangka di Bank Indonesia.
- 3) Aset dan liabilitas dalam valuta asing dalam rangka pengelolaan cadangan devisa, antara lain:

date of the transaction.

- b) *Foreign currency forward transactions against Rupiah are foreign currency buying/selling transactions against Rupiah at the agreed rate with the handover of the foreign currencies within 2 (two) working days after the date of the transaction.*

Assets and liabilities in Rupiah within the context of implementing monetary policy are classified as instruments that are measured by amortizing acquisition expenses, with the exception of SBN and derivative instruments that are classified as instruments measured at fair value through revaluation reserves.

b. Financial Assets and Liabilities Related to Policy Implementation Denominated in Foreign Currencies

Foreign currency assets and liabilities used by Bank Indonesia to implement policy, consist of:

- 1) *Placement of banks funds within the context of the Statutory Reserve Requirements that must be met by banks in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Rupiah and Foreign Currency-denominated Statutory Reserve Requirement for Conventional Banks.*
- 2) *Foreign currency Term Deposits are periodic placement of foreign currency-denominated funds owned by participants of Open Market Operations in Bank Indonesia.*
- 3) *Foreign currency assets and liabilities within the context of managing foreign exchange reserves, include:*

a) Penempatan dana pada bank di luar negeri dalam bentuk giro dan deposito. Penempatan dana pada giro adalah penempatan dana Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral negara lain atau pada bank di luar negeri (bank koresponden) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan surat perintah pembayaran atau pemindahbukuan.

Penempatan dana pada deposito adalah penempatan dana Bank Indonesia dalam valuta asing selama jangka waktu tertentu pada bank di luar negeri (*counterparty*) yang penarikan/pencairannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo dengan pemberitahuan sebelumnya.

b) Surat-Surat Berharga (SSB) dalam valuta asing. SSB milik Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang dinilai dengan Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi (NWSR). Terhadap SSB HTM, AFS, *Trading*, direklasifikasi menjadi SSB NWSR. Nilai tercatat dari SSB dimaksud pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi nilai perolehan SSB pada awal tahun 2014. Reklasifikasi dilakukan secara prospektif dari tanggal reklasifikasi.

c) Liabilitas karena transaksi penjualan surat-surat berharga dengan janji untuk dibeli kembali (*repo*). Kewajiban dari transaksi repo adalah liabilitas Bank Indonesia yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga, dengan kewajiban pembelian kembali (*repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Kewajiban dari transaksi repo konvensional diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

a) *Balances with banks outside of Indonesia in the form of demand and term deposits. Placement of funds in demand deposits consist of Bank Indonesia's foreign currency funds placement in the central banks or banks of other countries (correspondent banks) that can be withdrawn at any time by issuing a warrant payment or overbooking instructions order.*

Placement of funds in term deposits is a placement of Bank Indonesia's foreign currency funds throughout a specific tenor overseas (counterparty) where it can be withdrawn/redeemed on or before maturity with prior notification.

b) *Foreign currency Marketable Securities.*

Bank Indonesia's marketable securities are categorized as financial instruments that are measured at fair value through revaluation reserves (NWSR). SSB HTM, AFS, and Trading are reclassified as SSB NWSR. The registered value of these Marketable Securities as of December 31, 2013 is treated as the acquisition value of these Marketable Securities in early 2014. The reclassification is carried out prospectively from the date of the reclassification.

c) *Liabilities derived from marketable securities transactions with reverse operations. Liabilities derived from reverse operation transactions are Bank Indonesia's liabilities that arise from marketable securities sale transactions, with reverse operations liabilities in accordance with the agreed upon price and timeframe. Liabilities from conventional reverse operation transactions are categorized as instruments that are measured at amortized cost.*

d) Pinjaman Luar Negeri Bank Indonesia adalah setiap penerimaan yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat neraca pembayaran yang diikat dengan suatu perjanjian pinjaman yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, atas nama dan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan hukum.

c. Klasifikasi

Bank Indonesia mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori sebagai berikut setelah pengakuan awal:

- 1) Diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
- 2) Diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- 1) Aset dimiliki dengan model bisnis yang tujuannya untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan
- 2) Arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut mengakibatkan pembayaran arus kas pada tanggal tertentu yang hanya terdiri atas pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi.

Bank Indonesia mengklasifikasikan seluruh liabilitas setelah pengakuan awal untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali untuk derivatif yang diakui sebagai liabilitas diukur pada nilai wajarnya.

d. Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui aset dan liabilitas keuangan kebijakan pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan

d) *Bank Indonesia's Foreign Borrowings are any proceeds received by Bank Indonesia to be used for maintaining foreign reserves to strengthen the balance of payments that are tied through an agreement, which must be repaid with certain conditions, on behalf of and becomes the responsibility of Bank Indonesia as the legal entity.*

c. Classification

Bank Indonesia classifies its financial assets into the following categories upon initial recognition:

- 1) *Measured at amortized cost; or*
- 2) *Measured at fair value through revaluation reserves.*

Financial assets are measured at amortized cost if the following two conditions are met:

- 1) *The asset is held based upon a business model that is aimed at obtaining a contractual cash flow; and*
- 2) *The contractual cash flow from the said financial asset results in cash flow payments on specific dates that consist solely of principal repayments and interest payments on unredeemed principal.*

Bank Indonesia classifies all liabilities after initial recognition for measurement at amortized cost using the effective interest method, except for derivatives that are recognized as liabilities, which are measured at fair value.

d. Initial Recognition

At its initial recognition, Bank Indonesia recognized policy-related financial assets and liabilities at fair value. In the event that the financial assets or liabilities are not classified as

sebagai diukur pada NWSR, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

e. Penghentian Pengakuan

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika:

- 1) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- 2) Bank Indonesia mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Bank Indonesia mengeluarkan liabilitas dari laporan posisi keuangannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Bank Indonesia menghapusbukukan aset keuangan dan saldo penyisihan penurunan nilai terkait pada saat Bank Indonesia menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Bank Indonesia mengambil keputusan tersebut setelah mempertimbangkan bukti objektif yang mendukung, antara lain: terdapat kondisi yang menyebabkan posisi keuangan debitur tidak memungkinkan melunasi sebagian atau keseluruhan pinjamannya.

f. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset

measured at NWSR, the fair value shall include the transaction value that can be directly attributed with the acquisition or issuance of these financial assets or financial liabilities.

e. Derecognition

Bank Indonesia derecognizes a financial asset if and only if:

- 1) *Contractual rights over the cash flow derived from these financial assets ends; or*
- 2) *Bank Indonesia transfers contractual rights to accept cash flow derived from financial assets, or continue to possess contractual rights to accept cash flow derived from financial assets but also bear the contractual liabilities to pay this cash inflow to one or more recipients as agreed upon.*

Bank Indonesia removes liability from its statement of its financial position, if and only if, this financial liability ends, specifically when the liability established within the contract is released or cancelled or expired.

Bank Indonesia writes-off financial asset and allowance for impairment related to the point of time wherein Bank Indonesia determines that these financial assets cannot be collected. Bank Indonesia takes this decision by examining supporting and objective evidence, including the conditions that put the borrowers' financial position unlikely to settle part or the entire loan.

f. Measurement of Amortized Cost

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount of financial assets or liabilities at

keuangan atau liabilitas keuangan pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai aset.

g. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Bank Indonesia menggunakan harga kuotasi di pasar aktif sebagai acuan nilai wajar aset keuangan. Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Bank Indonesia menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia. Teknik penilaian mencakup penggunaan referensi harga pasar terkini untuk transaksi atau instrumen yang sejenis, penggunaan asumsi dan estimasi yang memaksimalkan. Teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

h. Penyajian

Instrumen keuangan disajikan netto setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar atau yang akan diterima dan penyisihan penurunan nilai aset.

12. Instrumen Keuangan Kebijakan Berbasis Syariah

Bank Indonesia memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan berbasis syariah yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

initial recognition deducted by principal payments, added or deducted by cumulative amortization using the effective interest rate that is calculated from the difference between the initial value and at maturity value, minus the impairment of assets.

g. Calculating Fair Value

Fair value is the price for selling an asset or price for taking over a liability in an organized transaction between the market players at the date of measurement.

Bank Indonesia uses the quoted price within the active market as the financial asset's fair value benchmark. If the market for a financial instrument becomes inactive, Bank Indonesia will use a valuation technique adjusted with the situation, provided that the appropriate data is available. The valuation technique covers the use of the latest market price reference for the transaction or similar instrument, maximizing use of assumptions and estimates. Evaluation techniques, used to calculate the fair value, maximize the input with relevant use that can be observed and minimize the input that cannot be observed.

h. Presentation

Financial instruments are presented net after calculating both accrued and deferred interests, as well as the allowance for impairment of financial assets.

12. Sharia-based Financial Instruments for Monetary Policy

Bank Indonesia has Sharia-based financial assets and liabilities that are held to implement its policies.

a. Aset keuangan berbasis syariah yang dimiliki antara lain:

- 1) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.

Bank Indonesia memiliki SBSN yang dapat diperjualbelikan dan dikelompokkan sebagai instrumen keuangan yang dinilai dengan NWSR. SBSN diperoleh Bank Indonesia dalam rangka *building stock*, untuk digunakan sebagai instrumen moneter yang akan menggantikan SBI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SBSN jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) diperoleh di pasar perdana sejak bulan Agustus 2011.

SBSN diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

- 2) Tagihan dari transaksi *repo* syariah
Tagihan dari transaksi *repo* adalah tagihan Bank Indonesia yang timbul dari transaksi pembelian surat berharga dengan kewajiban penjualan kembali (*reverse repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Tagihan transaksi dari *repo* syariah diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada harga perolehan sesuai dengan perjanjian (syariah).

a. Sharia-based financial assets comprise of:

- 1) *Government Sharia Securities (SBSN) or referred to as Sukuk Negara*
Government Sharia Securities (SBSN) or commonly referred to as Sukuk Negara represent state marketable securities that are issued on the basis of Sharia principles, as proof of ownership in an SBSN asset, both in Rupiah as well as foreign currency.

Bank Indonesia has SBSN that can be sold or bought and categorized as financial instruments valued with NWSR. SBSN is obtained by Bank Indonesia, intended for building stock, to be used as a monetary instrument that will replace SBI in accordance with Act Number 1 of 2004 on State Treasury. Short-term SBSN or Sharia Treasury Notes (SPNS) is obtained from the primary market since August 2011.

SBSN is categorized as instruments calculated by their fair value through revaluation reserves.

- 2) *Claims derived from Sharia repo transactions*
Claims derived from repo transactions are Bank Indonesia's claims arisen from marketable securities purchase transactions with reverse repo obligations in accordance with the agreed price and terms.

Transaction claims derived from Sharia repo are classified as instruments that are calculated by their acquisition price in accordance with the (Sharia) agreement.

b. Liabilitas keuangan berbasis syariah yang dimiliki Bank Indonesia antara lain:

- 1) Penempatan dana bank dalam Rupiah maupun valuta asing dalam rangka simpanan GWM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia.
- 3) FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* Syariah. FASBIS memiliki jangka waktu satu hari kerja.
- 4) Liabilitas karena penjualan surat berharga dengan perjanjian untuk dibeli kembali secara syariah.
- 5) Liabilitas karena penempatan berjangka berbasis syariah dalam valuta asing.
Liabilitas keuangan berbasis syariah diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada harga perolehan sesuai dengan perjanjian (syariah).

Sesuai dengan PKAK 01 tentang Kebijakan Akuntansi, penetapan perlakuan akuntansi transaksi Bank Indonesia yang bersifat syariah dan unik ditempuh dengan mempertimbangkan secara komprehensif: (i) tujuan Bank Indonesia; (ii) substansi ekonomi dan hukum dari transaksi; (iii) perlakuan akuntansi menurut standar akuntansi atas transaksi yang sejenis pada entitas lain; (iv) bisnis model transaksi syariah; (v) prinsip-prinsip

b. Bank Indonesia's Sharia-based financial liabilities includes:

- 1) *Placement of bank funds in Rupiah and foreign currency within the context of Statutory Reserve Requirements deposits as prescribed in Bank Indonesia Regulation Number 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Rupiah and Foreign Currency Statutory Reserve Requirements for Sharia Banks and Sharia Business Units.*
- 2) *SBIS is a short-term Rupiah-denominated marketable security that is based on Sharia principles issued by Bank Indonesia.*
- 3) *FASBIS is a deposit facility provided by Bank Indonesia for banks to place their funds in Bank Indonesia in line with Sharia standing facilities. FASBIS has a one working day terms.*
- 4) *Liability arisen from the marketable securities sale with agreement to be bought back on a Sharia basis.*
- 5) *Liability arisen from foreign currency Sharia-based time deposits.
Sharia-based financial liabilities are classified as instruments that are calculated by the acquisition price in accordance with the (sharia) agreement.*

In accordance with PKAK 01 on Accounting Policy, the accounting treatment for Bank Indonesia's unique and Sharia-based transactions is carried out by comprehensively assessing: (i) Bank Indonesia's purpose (ii) economic and legal substance from the transactions; (iii) accounting treatment in accordance with the accounting standards for similar transactions for other entities; (iv) Sharia-based transaction business model; (v) generally-accepted Sharia

akuntansi syariah yang diterima umum; dan (vi) pendapat pihak yang berwenang untuk menilai transaksi syariah.

Mempertimbangkan model bisnis transaksi dan kepemilikan instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah oleh Bank Indonesia, maka transaksi syariah Bank Indonesia adalah transaksi unik, dan sesuai dengan PDP2LK maka perlakuan akuntansi instrumen keuangan syariah merujuk pada PKAK 06 tentang Instrumen Keuangan Kebijakan.

13. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional

Sebagai anggota *International Monetary Fund* (IMF), Indonesia diwajibkan menyeter kontribusi modal (kuota). Di samping itu, Indonesia juga memperoleh alokasi Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights/SDR*). Pencatatan kontribusi modal tersebut saat ini ditatausahakan oleh Kementerian Keuangan.

Hak Tarik Khusus yang dialokasikan merupakan potensi klaim Indonesia atas *freely usable currencies* (USD, JPY, GBP, EUR) milik negara anggota IMF lain sesama anggota *SDR Department*, apabila negara anggota tersebut setuju untuk melakukan konversi.

Besaran suku bunga Alokasi SDR sama dengan suku bunga Hak Tarik Khusus, sehingga negara anggota akan memperoleh pendapatan bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih besar dibandingkan dengan Alokasi SDR, dan sebaliknya negara anggota akan membayar bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih kecil dibandingkan dengan Alokasi SDR. Atas pengelolaan SDR tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi.

Pada saat perolehan, Hak Tarik Khusus diakui sebagai aset pada nilai wajar. Kewajiban karena Alokasi Hak Tarik Khusus diakui sebagai liabilitas

accounting principles; and (vi) authorized opinion to evaluate Sharia transactions.

Considering the Sharia-based transaction business model and ownership of financial instrument policies by Bank Indonesia, Bank Indonesia's Sharia-based transactions have unique transactions and are in accordance with PDP2LK. Therefore, the Sharia financial instruments accounting treatment refers to PKAK 06 regarding Policy Financial Instrument.

13. Counterpart of Special Drawing Rights allocated by the IMF

As a member of the International Monetary Fund (IMF), Indonesia is required to deposit its capital contribution (quota). In addition to this, Indonesia also receives Special Drawing Rights (SDR) allocations. The Ministry of Finance is currently mandated to register this capital contribution.

The SDR allocations represents Indonesia's potential claim over freely usable currencies (USD, JPY, GBP, EUR) owned by other IMF member countries that are members of the SDR Department, in the event these member countries approve the conversion.

The amount of allocated SDR interest rate is equal to the Special Drawing Rights interest rate thereby the member countries will earn interest income if the balance of Special Drawing Rights is larger compared to the SDR Allocation, and in contrast, the member countries will pay the interest if the Special Drawing Rights balance is less than the SDR Allocation. The IMF applies administration fee.

Upon the acquisition, the Special Drawing Rights is recognized as an asset at its fair value. Liabilities from Special Drawing Rights Allocation are

pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas terkait Hak Tarik Khusus diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan liabilitas Hak Tarik Khusus dihitung ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah pada akhir periode pelaporan. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Aset Hak Tarik Khusus dihentikan pengakuannya pada saat terjadi penjualan atau pembayaran kewajiban dalam SDR.

Liabilitas Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional dihentikan pengakuannya pada saat Indonesia menghentikan keanggotaan di IMF.

recognized as liability at its fair value. After the initial recognition, the assets and liabilities relating to the Special Drawing Rights are calculated by the amortized acquisition cost.

At the end of the reporting period, the balance of assets and liabilities derived from Special Drawing Rights is calculated in Rupiah using the middle rate. The discrepancy between the previously registered amount with the balance amount is recognized as revaluation reserves within the Liabilities in the Statement of Financial Position.

Assets from Special Drawing Rights are no longer recognized once the SDR is sold or paid off.

Liabilities from Special Drawing Rights from International Financial Institutions are no longer recognized if Indonesia ceases its membership from the IMF.

14. Tagihan dan Liabilitas kepada Pemerintah

a. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Tagihan tersebut terutama berupa SUP yang merupakan surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Selain itu tagihan kepada Pemerintah termasuk juga tagihan karena kontribusi modal Indonesia di lembaga keuangan internasional, dan tagihan lainnya.

14. Claims and Liabilities to the Government

a. Claims on the Government

Claims to the Government represent claims that occurred prior to Bank Indonesia Act Number 23 of 1999 within the context of implementing the duties of Bank Indonesia.

This claim is specifically in the form of an SUP that represents the Government's long term letter of credit to Bank Indonesia, which cannot be transferred and/or sold to other parties, whereby the principal and interest payment is made in accordance with the agreed terms. Moreover, claims to the government also include claims arisen from Indonesia's capital contribution to international financial institutions, and other claims.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada Pemerintah sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada Pemerintah diukur pada nilai nominal. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada Pemerintah pada saat diterima angsuran atau pelunasan.

b. Liabilitas kepada Pemerintah

Bank Indonesia memiliki liabilitas kepada Pemerintah berupa:

- 1) Penempatan dana dalam Rupiah dan valuta asing milik Kementerian Keuangan di Bank Indonesia dalam bentuk giro sehubungan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah. Bank Indonesia menerima dan mengirimkan transfer Rupiah dan valuta asing untuk dan atas nama Kementerian Keuangan.

Bank Indonesia memberikan remunerasi atas penempatan dana Pemerintah di Bank Indonesia. Tingkat bunga atas Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Rupiah, RKUN valuta USD, dan RKUN valuta asing non USD per tahun adalah 0,1%. Sementara itu tingkat bunga atas rekening penempatan dalam Rupiah, rekening penempatan dalam valuta USD, dan rekening penempatan valas non USD per tahun adalah 65% dari suku bunga acuan. Tingkat bunga atas Rekening Pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara dan untuk pertama kali berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan Nomor 11/3/KEP.GBI/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.

Upon initial recognition, Bank Indonesia's claims to the government are equal to their nominal value. After its initial recognition, claims to the government are calculated based on its nominal value. Bank Indonesia ends its claims to the Government once it is partially or fully settled.

b. Liabilities to the Government

Bank Indonesia has liabilities to the Government include:

- 1) *The Ministry of Finance's Rupiah and foreign currency funds deposited in Bank Indonesia in demand deposits that validates Bank Indonesia's role as the holder of the Government's cash. Bank Indonesia receives and transfers Rupiah and foreign currency for and on behalf of the Ministry of Finance.*

Bank Indonesia pays remuneration on the Government's fund placement in Bank Indonesia. The annual interest rate on Rupiah-denominated State General Cash Account (RKUN), USD RKUN, and non-USD RKUN is 0.1%. Meanwhile, the interest rate on Rupiah accounts, USD accounts, and non-USD accounts are 65% of the benchmark rate. The interest rate on the Government account is set based on the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia's Decree that regulates coordination of State-owned funds and for the first time, based on the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia's Decree Number 17/KMK.05/2009 and Number 11/3/KEP.GBI/2009 dated January 30, 2009 on Coordinated Management of State Funds.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui giro milik Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, giro milik Pemerintah diukur pada nilai nominal.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan giro milik Pemerintah pada saat terdapat penarikan dana.

- 2) Pinjaman yang diterima oleh Bank Indonesia dari Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui pinjaman dari Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, pinjaman dari Pemerintah diukur pada nilai nominal.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan pinjaman dari Pemerintah pada saat terdapat angsuran atau pelunasan.

15. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan, antara lain:

- a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit atau pembiayaan kepada bank yang sumber dananya berasal dari Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah.
- b. *Two Step Loan* (TSL) adalah pinjaman luar negeri yang diterima oleh pemerintah yang diteruskan kepada bank pelaksana atau proyek melalui Bank Indonesia.

Upon initial recognition, Bank Indonesia recognizes the Government's demand deposits as a liability at its nominal value. After their initial recognition, the Government's general deposits are calculated by their nominal value. Bank Indonesia stops recognizing the Government's general deposits once the funds are withdrawn.

- 2) *Borrowings received by Bank Indonesia from the Government c.q. Ministry of Finance are based on Act Number 13 of 1968 on the Central Bank. Upon initial recognition, Bank Indonesia recognizes borrowings from the Government as liabilities at their nominal value. After their initial recognition, borrowings from the Government are calculated by their nominal value. Bank Indonesia stops recognizing borrowings from the Government once they are partially or fully settled.*

15. Claims on Banks

Claims on Banks represent claims that occurred prior to enactment of Bank Indonesia Act Number 23 of 1999 within the context of the implementation of Bank Indonesia's duties. There is a number of given credits, which includes:

- a. *Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI) is a credit or financing for banks with funds source from Bank Indonesia to support the implementation of the Government's program.*
- b. *Two Step Loan (TSL) is a foreign loan received by the government and is subsequently loaned to the implementing bank or project through Bank Indonesia.*

- c. Pinjaman Subordinasi (*subordinated loan*) selanjutnya disebut SOL merupakan kredit yang diberikan kepada bank dalam rangka penyehatan bank.

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperbolehkan memberikan kredit berupa SOL, KLBI dan TSL.

Namun demikian, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan untuk menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*, antara lain:

- a. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) adalah penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan bank sebagai peserta Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang dilakukan dengan cara *Repurchase Agreement* (*Repo*) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan penggunaan.
- b. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh bank.
- c. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) adalah fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh bank.

Tagihan kepada bank yang berasal dari pelaksanaan kebijakan moneter, misalnya tagihan karena transaksi pembelian surat-surat berharga dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) tidak termasuk ruang lingkup pos ini. Akuntansi untuk tagihan kepada bank karena pelaksanaan kebijakan moneter diatur sebagaimana angka 11 dan 12.

- c. *Subordinated Loan* or referred to as SOL is a loan extended to banks for recovery efforts.

Following the issuance of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, Bank Indonesia can no longer extend loans in SOL, KLBI, and TSL.

However, Bank Indonesia may provide financing facilities in the capacity as the lender of the last resort, which includes:

- a. *Intraday Liquidity Facility* (FLI) is a funding facility from Bank Indonesia to banks which participate in the Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement System* (BI-RTGS) and the Bank Indonesia *National Clearing System* (SKNBI), carried out through *marketable securities Repurchase Agreement* (*Repo*) that must be settled within the same day.
- b. *Short-Term Funding Facility* (FPJP) is a funding facility from Bank Indonesia for banks to overcome their short-term funding needs.
- c. *Short-Term Sharia Funding Facility* (FPJPS) is a funding facility from Bank Indonesia that is based on *Sharia principles* for banks to overcome their short-term funding needs.

Claims on banks arisen from a monetary policy implementation, such as claims from securities sold under repurchase agreement (*reverse repo*), are excluded from these posts. Accounting for claims on banks arisen from a monetary policy implementation is prescribed in number 11 and 12.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada bank sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada bank pada saat diterima angsuran atau pelunasan.

Upon initial recognition, Bank Indonesia recognizes claims on banks at nominal value. Following initial recognition, Bank Indonesia stops recognizing claims on banks Government once they are partially or fully settled.

16. Penyertaan

Bank Indonesia melakukan penyertaan modal pada lembaga domestik dan internasional. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan DPR.

16. Participating Interest in Domestic and International Institutions

Bank Indonesia places participating interest in domestic and international institutions. Bank Indonesia only places participating interest in a legal entity or other entities that are deemed necessary in executing the duties of Bank Indonesia upon the approval of DPR.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat penyertaan sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur penyertaan pada biaya perolehan. Bank Indonesia menghentikan pengakuan penyertaan pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan penyertaan.

Upon its initial recognition, Bank Indonesia books participating interest at acquisition cost. Following initial recognition, Bank Indonesia measures participating interest at acquisition cost. Bank Indonesia stops recognizing its participating interest once it ceases its participation in the interest.

17. Aset Keuangan Lainnya

Bank Indonesia memiliki aset keuangan yang tidak secara langsung digunakan dalam pelaksanaan kebijakan atau yang berasal dari transaksi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, antara lain: uang logam emas, uang asing, dan berbagai tagihan kepada pihak selain bank dan Pemerintah.

17. Other Financial Assets

Bank Indonesia has financial assets that are indirectly used to implement policy or derived from transaction carried out in accordance with Act Number 13 of 1968 on the Central Bank, which includes: gold coins, foreign currency, and various claims from parties other than banks and the government.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset keuangan lain sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur aset keuangan lain pada biaya perolehan. Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan lainnya pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan aset keuangan atau penerimaan angsuran/pelunasan tagihan.

Upon initial recognition, Bank Indonesia books other financial assets at acquisition cost. Following initial recognition, Bank Indonesia measures other financial assets at acquisition cost. Bank Indonesia stops recognizing other financial assets once Bank Indonesia releases its financial asset ownership or upon installment receipts/claims settlement.

18. Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud

Bank Indonesia memiliki tanah, gedung, kendaraan dan berbagai peralatan teknologi informasi yang dikelompokkan sebagai aset tetap dan aset tidak berwujud.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset tetap dan aset tidak berwujud sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia menggunakan model biaya untuk mengukur aset tetap dan aset tidak berwujud.

Atas aset tetap dan aset tidak berwujud dilakukan penyusutan dan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaatnya. Pengeluaran yang menambah masa manfaat aset diakui sebagai penambah biaya perolehan aset. Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset tetap dan aset tidak berwujud pada saat aset dimaksud telah habis masa manfaatnya, dijual, dihibahkan, ditukar, ditarik dari pemakaian atau hilang.

19. Penyisihan Penurunan Nilai Aset

Bank Indonesia membentuk penyisihan atas risiko penurunan nilai aset keuangan. Aset keuangan disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai bersih setelah dikurangi dengan penyisihan.

20. Kewajiban Non Kebijakan

Bank Indonesia memiliki berbagai kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, antara lain: rekening giro milik lembaga keuangan internasional, kewajiban pajak, dan kewajiban imbalan pascakerja.

21. Selisih Revaluasi

Selisih revaluasi mencerminkan perubahan kumulatif nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia atau dampak keuangan dari transaksi unik Bank Indonesia yang belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

18. Tangible and Intangible Fixed Assets

Bank Indonesia owns lands, buildings, vehicles and a number of information technology equipments that are categorized as tangible and intangible fixed assets.

Upon initial recognition, Bank Indonesia books tangible and intangible fixed assets at acquisition cost. Upon initial recognition, Bank Indonesia uses cost models to calculate tangible and intangible fixed assets.

Depreciation and amortization are applied on the tangible and intangible fixed assets by using a straight line method throughout their useful life. Expenditures that add to the useful life of the assets are recognized as additional asset acquisition cost. Bank Indonesia stops recognizing tangible and intangible fixed assets when the useful life of these assets expires or when they are sold, donated, replaced, withdrawn from use or lost.

19. Allowance for Impairment of Financial Assets

Bank Indonesia sets allowance for impairment of financial assets. Financial assets shown in the Statement of Financial Position are equal to the net value less allowance.

20. Other Liabilities

Bank Indonesia has various liabilities that are indirectly related with policy implementation, which includes: demand deposit accounts of international financial institutions, tax payables, and employee benefit liabilities.

21. Revaluation Reserves

Revaluation reserves reflect the cumulative change in the fair value of the assets and liabilities of Bank Indonesia or the financial impacts of Bank Indonesia unique transactions where such transactions have yet to achieve their ultimate objectives.

Selisih revaluasi diakui apabila terjadi perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia dan/atau perubahan nilai Rupiah dari aset dan liabilitas Bank Indonesia dalam valuta asing, dan/atau terjadi keuntungan dan kerugian dari transaksi unik Bank Indonesia yang substansi tujuannya belum tercapai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, seperti selisih penjabaran mata uang sebagai dampak penyesuaian komposisi aset valuta asing.

Selisih revaluasi direalisasi menjadi surplus/defisit ketika tujuan akhir atau substansi tujuannya telah tercapai.

22. Modal dan Cadangan

a. Modal

Modal diakui dan disajikan sebesar modal Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Cadangan

Penambahan dan pengurangan Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, serta alokasi surplus/defisit periode berjalan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. Pendapatan dan Beban Bunga

Untuk menampung pendapatan dan beban yang bersifat bunga Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis konvensional. Termasuk dalam pos ini antara lain beban bunga dari instrumen keuangan kebijakan yang berbasis utang, beban remunerasi atas giro wajib minimum bank umum dan penerimaan bunga dari surat berharga yang dimiliki.

Pendapatan dan beban bunga diakui dalam Laporan Surplus Defisit secara basis akrual.

Revaluation reserves are recognized when there are changes in the fair value of assets and liabilities of Bank Indonesia and/or changes in the rupiah value of assets and liabilities of Bank Indonesia that are denominated in foreign currency, and/or the occurrence of a gain or loss on a Bank Indonesia unique transaction whose substantive economic objective has not been achieved at the time when the transaction was executed, such as the impact of currency translation differences arising out of adjustments in the composition of foreign currency assets.

Revaluation reserves are recognized as surplus/deficit when the substantive economic objective is achieved.

22. Capital and Reserves

a. Capital

Capital is recognized and presented in the amount of Bank Indonesia's capital as stipulated within the regulations.

b. Reserves

The increase and decrease of the General Reserves, Statutory Reserves, as well as current year surplus/deficit are determined based on the regulations.

23. Interest Income and Expenses

This post is to accommodate Rupiah and foreign currency income and expenses arisen from the implementation of conventionally-based monetary policies. Included in this post are interest expenses from debt-based financial instrument policies, remuneration expenses from GWM, and interests gained from marketable securities owned.

Interest income and expenses are recognized on an accrued basis in the Statement of Surplus Deficit.

24. Pendapatan dan Beban Imbalan

Untuk menampung pendapatan dan beban imbalan dalam Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah. Termasuk dalam pos ini antara lain imbalan atas instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah, dan penerimaan bagi hasil surat berharga syariah yang dimiliki.

Pendapatan dan beban imbalan diakui dalam Laporan Surplus Defisit secara basis akrual, kecuali imbalan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Fasilitas Bank Indonesia Syariah yang diakui secara basis kas.

25. Pendapatan Transaksi Aset Keuangan

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan/*capital gain* (*netto* setelah memperhitungkan kerugian), antara lain keuntungan dari transaksi penjualan emas, surat berharga, dan transaksi derivatif.

26. Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan selisih kurs (*netto* setelah memperhitungkan kerugian) yang berasal dari keuntungan transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir.

27. Pendapatan dan Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Untuk menampung pendapatan dan beban dari pengelolaan sistem pembayaran tunai dan non tunai.

Pendapatan pengelolaan sistem pembayaran berasal dari antara lain: pengenaan biaya transfer non tunai, dan pengenaan sanksi administratif.

24. Sharia-based Transaction Income and Expenses

This post is to accommodate income and expenses derived from Rupiah and foreign currency Sharia-based transactions resulting from the implementation of Sharia-based monetary policy. Included in this post are sharing income from Sharia-based financial instruments, and fees from income sharing of Sharia-based securities owned.

Income and expenses are recognized on an accrued basis in the Statement of Surplus Deficit, with the exception of sharing income derived from Bank Indonesia Sharia Certificates and Bank Indonesia Sharia Facilities that are recognized on a cash basis.

25. Net Result of Financial Transaction Income

This post is to accommodate profit/capital gain income (net after calculating losses), which includes gains from gold, marketable securities, and derivative transactions.

26. Net Result of Foreign Currency Transactions Income

This post is to accommodate net result of foreign exchange rate income (net after calculating losses) derived from foreign currency transactions that have achieved their ultimate objectives.

27. Payment System Services Income and Expenses

This post is to accommodate income and expenses arisen from cash and non-cash payment system services.

Payment System Services income is derived from non-cash transfer fees and administration penalties.

Beban pengelolaan sistem pembayaran berasal dari antara lain: pengadaan bahan uang, biaya cetak dan pengedaran uang Rupiah, serta biaya penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai. Tidak termasuk beban depresiasi mesin dan amortisasi *software*.

Payment System Services expenses incur from procurement for money materials, printing and circulation of Rupiah, and non-cash payment system. Excluded to this are machineries depreciation and software amortization.

28. Pendapatan dan Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Untuk menampung pendapatan dan beban untuk mengatur kebijakan makroprudensial, perluasan akses keuangan dan UMKM serta *surveillance* sistem keuangan.

28. Macroprudential Regulation and Supervision Income and Expenses

This post is to accommodate income and expenses from macroprudential regulation and supervision, expanding financial access and MSME, as well as for financial surveillance system.

Pendapatan pengaturan dan pengawasan makroprudensial berasal dari pengenaan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan makroprudensial.

Macroprudential regulation and supervision income is derived from penalties imposed to banks that violate macroprudential regulations.

Beban pengaturan dan pengawasan makroprudensial berasal dari antara lain: formulasi kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.

Macroprudential regulation and supervision expenses incur from policy formulation of macroprudential and financial stability system.

29. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Untuk menampung pendapatan dari fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, serta pemberian kredit/pinjaman kepada perbankan dan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

29. Income from Providing Fund

This post is to accommodate interest income received by Bank Indonesia as the lender of the last resort for credit/loans given to banks and the Government in accordance with Act Number 13 of 1968 on the Central Bank.

30. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Untuk menampung beban bunga (jasa giro) yang diberikan atas giro Pemerintah dalam Rupiah maupun valuta asing.

30. Remuneration Expenses on Government General Deposits

This post is to accommodate interest expenses (deposit interest) paid for the Government's general deposits, denominated in Rupiah and foreign currencies.

31. Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja untuk pegawai yang terdiri dari

31. Employee Benefits

Bank Indonesia provides a benefit program for its employees that covers post-employment benefits

imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Berdasarkan paragraf 25 dan 27 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 24 tentang Imbalan Kerja, metode akuntansi yang digunakan adalah skema imbalan pasti.

Jumlah beban dan liabilitas imbalan kerja dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara berkala.

Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit*.

Estimasi liabilitas imbalan kerja disajikan di pos Kewajiban Non Kebijakan dalam Laporan Posisi Keuangan.

32. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, surplus Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH). Oleh karena itu, sejak 1 Januari 2009 Bank Indonesia menjadi Wajib Pajak.

Pengaturan pengenaan PPh atas surplus Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan, sebagai berikut:

- a. Surplus Bank Indonesia yang merupakan obyek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.

and other long-term employment benefits. As stipulated in paragraph 25 and 27 of the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) Number 24 on Employment Benefits, the accounting method is based on the Defined Benefit Scheme.

The amount of employee benefit expenses and liabilities is calculated based on the periodic calculations made by an independent actuary.

Employee benefit expenses and liabilities are separately set for each plan by using projected credit unit method.

The estimated liability for employment benefits is presented in the Other Liabilities post within the Statement of Financial Position.

32. Income Tax

Based on Article 4 section (1) letter s of Act Number 36 of 2008 on the Fourth Amendment to Act Number 7 of 1983 on Income Tax, Bank Indonesia's surplus is subject to Income Tax (PPH). Accordingly, Bank Indonesia has become a taxpayer since January 1, 2009.

The governing of the imposition of Income Tax on Bank Indonesia's surplus is prescribed further in Article 7 of Government Regulation Number 94 of 2010 dated December 30, 2010 on Taxable Income Calculation and Income Tax Settlement for the Current Year as follows:

- a. *Bank Indonesia's surplus, which is an income tax object, represents Bank Indonesia's surplus as presented in the (Audited) Annual Financial Statement after fiscal adjustments or corrections in accordance with the Income Tax Laws by taking Bank Indonesia's characteristics into consideration.*

- b. Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait surplus antara lain berupa selisih kurs, penyisihan penurunan nilai aset, dan penyusutan aset tetap.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang, yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Bank Indonesia telah mengadopsi PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, entitas menyajikan dampak pajak penghasilan baik kini maupun tangguhan terhadap surplus defisit tahun berjalan.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas

- b. Procedures for income tax calculation and payment over Bank Indonesia's surplus as mentioned in Article 7 (1) are regulated in the Minister of Finance's Regulation Number 100/PMK.03/2011 dated July 11, 2011.

Subsequently, within the notes for Article 7 Government Regulation Number 94 of 2010 dated December 3, 2010 on Taxable Income Calculation and Income Tax Settlement for the current year, it is stipulated that Bank Indonesia's characteristics related to surplus include the exchange rate differences, allowance for impairment of financial assets, and fixed assets depreciation.

Current tax for both current and previous periods is recognized as the amount of tax payable, calculated based on the prevailing tax rate (tax regulation) or the substantively effective rate on the date of the Statement of Financial Position.

Correction on tax liabilities is recognized once the tax assessments are received or upon submission of objections or appeals, once a decision over this objection or appeal has been reached.

Bank Indonesia has adopted PSAK 46 on Income Tax Accounting. In accordance with PSAK 46, income tax is calculated based on the accounting surplus (deficit) for the current year.

Deferred tax is calculated based on the prevailing tax rate at the time of asset recovery or liability settlement, using the prevailing tax rate (tax regulation) or substantively effective rate on the date of the Statement of Financial Position. All temporary discrepancies between the amount of assets and liabilities booked for Statement of

untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan Metode Aset dan Liabilitas. Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal.

Financial Position and respective tax treatments are recognized as deferred taxes using the Asset and Liability Method. This method also firmly recognizes deferred tax benefits over tax loss compensation.

C. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan tugasnya Bank Indonesia menghadapi berbagai risiko, seperti risiko kredit, risiko pasar (risiko suku bunga), risiko strategis, risiko legal, dan risiko operasional.

Aktivitas pengelolaan risiko dilakukan melalui proses identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko serta didukung oleh sistem informasi yang handal, mencatat sumber risiko non-keuangan yang dihadapi Bank Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh ketergantungan pada ketersediaan sistem operasional serta perubahan arah kebijakan dan peraturan antar otoritas. Pada risiko keuangan, secara umum sumber risiko yang mempengaruhi kegiatan Bank Indonesia berasal dari faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan nilai aset.

Sejalan dengan tantangan Bank Indonesia yang semakin menguat, sejumlah faktor risiko perlu terus diwaspadai. Guna menjawab dinamika perubahan yang terjadi, penguatan kerangka kerja Manajemen Risiko Bank Indonesia terus dilakukan khususnya dalam rangka penyempurnaan fungsi *Enterprise Wide Risk Management*. Penyesuaian terhadap *framework* dan pengorganisasian manajemen risiko di Bank Indonesia dilakukan secara lebih terencana, sistematis, serta sesuai dengan perkembangan dan tuntutan lingkungan eksternal maupun internal Bank Indonesia.

Dalam rangka mengelola risiko strategis dan risiko operasional, Bank Indonesia telah memiliki peraturan dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) yang merupakan kegiatan

C. RISK MANAGEMENT

In its operation, Bank Indonesia is susceptible to a number of risks, including credit risk, market risk (interest rate risk), strategic risk, legal risk, and operational risk.

Risk management is carried out through a series of process including risk identification, assessment and mitigation risk with reliable information system support, recording all sources of non-financial risks facing Bank Indonesia that heavily relies on the availability of operational systems and changes in policy direction and inter-authority regulations. On financial risk, risk factors to Bank Indonesia's activities in general, come from external factors including fluctuations in exchange rates, interest rates and asset value.

Congruous with the increasing challenges, Bank Indonesia needs to mitigate various risk factors. In response to dynamic changes, Bank Indonesia continues to strengthen its Bank Indonesia Risk Management framework, particularly on the improvement of Enterprise Wide Risk Management functions. Furthermore, good planning and systematic adjustments are formulated to support risk management framework and organization in Bank Indonesia, by adapting to both internal and external development and conditions.

To effectively manage strategic and operational risks, Bank Indonesia has a set of regulations and guidelines at its disposal for implementing Bank Indonesia's Risk Management (MRBI), which is the

pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan operasional seluruh satuan kerja di Bank Indonesia, dan secara operasional melakukan asesmen risiko melalui sarana Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRIS).

D. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LAPORAN SURPLUS DEFISIT

Bank Indonesia menyajikan kembali pos dan subpos dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai informasi komparatif sesuai dengan paragraf 83 Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pos-pos dalam komponen aset disajikan kembali secara netto dengan memperhitungkan penyisihan penurunan nilai aset yang berasal dari pos penyisihan aset yang telah dibentuk tahun 2013.

Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia berlaku secara prospektif pada tanggal 1 Januari 2014.

Penyajian kembali atas Pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2013 audited sebagai berikut:

embodiment of management activities for the operations in the entire Bank Indonesia's Departments. In the operation front, Bank Indonesia conducts risk assessments through Risk Management Information System (SIMRIS).

D. RESTATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND SURPLUS DEFICIT

Bank Indonesia presented restatements of accounts and sub-accounts within the Statement of Financial Position and Statement of Surplus Deficit for the year which ended on December 31, 2013 as a comparative information in accordance with paragraph 83 of the Statement of Financial Accounting Policies 02 on Presentation of Financial Statements. The accounts in the asset components are restated on a net basis calculating allowance for impairment of financial assets derived from allowance for impairment of financial assets allocated in 2013.

Bank Indonesia's Statement of Financial Accounting Policy took effect on January 1, 2014.

The Restatement of accounts within the audited Statement of Financial Position as of December 31, 2013 are as follows:

31 Desember 2013 <i>December 31, 2013</i>			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya <i>As Stated Before</i>		Disajikan kembali *) <i>Restated *)</i>	
Pos		Pos	
Aktiva <i>Assets</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	Aset <i>Assets</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>
1. Emas <i>Gold</i>	36.757.308	1. Emas <i>Gold</i>	36.757.308
2. Uang Asing <i>Foreign Currencies</i>	11.802	5. Aset Non Kebijakan <i>Other assets</i>	
		5.2. Aset Keuangan <i>Other Financial Assets</i>	11.802
3. Hak Tarik Khusus <i>Holdings of Special Drawing</i>	33.060.049	3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional <i>Receivables from the IMF</i>	
		3.2. Hak Tarik Khusus <i> Holding of Special Drawing Rights</i>	33.060.049
4. Giro <i>Demand Deposits</i>	135.179.177	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial assets related to monetary policy implementation</i>	
		2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing <i>Securities held and claims denominated in foreign currency</i>	135.096.818
		5. Aset Non Kebijakan <i>Other assets</i>	
		5.2. Aset Keuangan <i>Other Financial Assets</i>	5.773
		***) Penyisihan Penurunan Nilai Aset <i>Allowance for impairment of financial assets</i>	76.586
5. Deposito <i>Time Deposits</i>	31.271.039	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial assets related to monetary policy implementation</i>	
		2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing <i>Securities held and claims denominated in foreign currency</i>	30.964.202
		***) Penyisihan Penurunan Nilai Aset <i>Allowance for impairment of financial assets</i>	306.837

31 Desember 2013 December 31, 2013			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya As Stated Before		Disajikan kembali *) Restated *)	
Pos		Pos	
Aktiva Assets	Rp juta IDR Million	Aset Assets	Rp juta IDR Million
6. Surat Berharga <i>Marketable Securities</i>	972.742.507	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial assets related to monetary policy implementation</i>	
		2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing <i>Securities held and claims denominated in foreign currency</i>	970.991.779
		***) Penyisihan Penurunan Nilai Aset <i>Allowance for impairment of financial assets</i>	1.750.728
7. Surat Berharga Negara Republik Indonesia <i>Government Bonds</i>	117.066.701	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial assets related to monetary policy implementation</i>	
		2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah <i>Securities held and claims denominated in Rupiah</i>	115.905.197
		2.2. Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah <i>Sharia-based securities held and claim denominated in Rupiah</i>	1.161.504
8. Surat Berharga yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali <i>Securities Purchased Under Resale Agreements</i>	219.172	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial assets related to monetary policy implementation</i>	
		2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah <i>Securities held and claims denominated in Rupiah</i>	219.172
9. Tagihan: <i>Claims:</i>		4. Tagihan <i>Claims</i>	
9.1. Kepada Pemerintah <i>on Government</i>	237.779.774	4.1. Kepada Pemerintah <i>Claims on the Government</i>	234.952.818
		***) Penyisihan Penurunan Nilai Aset <i>Allowance for impairment of financial assets</i>	2.826.956

31 Desember 2013 <i>December 31, 2013</i>			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya <i>As Stated Before</i>		Disajikan kembali *) <i>Restated *)</i>	
Pos		Pos	
Aktiva <i>Assets</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	Aset <i>Assets</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>
9.2. Kepada Bank <i>on Banks</i>	2.315.341	4. Tagihan <i>Claims</i>	
		4.2. Kepada Bank <i>Claims on banks</i>	2.205.728
		***) Penyisihan Penurunan Nilai Aset <i>Allowance for impairment of financial assets</i>	109.613
9.3. Kepada Lainnya <i>Others</i>	8.147.560	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial assets related to monetary</i>	33.453
		2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing <i>Securities held and claims</i> <i>denominated in foreign currency</i>	
		5. Aset Non Kebijakan <i>Other assets</i>	
		5.2. Aset Keuangan <i>Other Financial Assets</i>	2.309.679
		***) Penyisihan Penurunan Nilai Aset <i>Allowance for impairment of financial assets</i>	5.804.428
10. Penyertaan <i>Equity Participations</i>	850.343	5. Aset Non Kebijakan <i>Other assets</i>	
		5.1. Penyertaan <i>Participating interest in domestic and</i> <i>international institutions</i>	850.343
11. Aktiva Lain-Lain <i>Other Assets</i>	85.276.075	2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial assets related to monetary policy</i> <i>implementation</i>	
		2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing <i>Securities held and claims</i> <i>denominated in foreign currency</i>	65.738.476
		5. Aset Non Kebijakan <i>Other assets</i>	
		5.2. Aset Keuangan <i>Other Financial Assets</i>	1.108.036

31 Desember 2013 December 31, 2013			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya <i>As Stated Before</i>		Disajikan kembali *) <i>Restated *)</i>	
Pos		Pos	
Aktiva <i>Assets</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	Aset <i>Assets</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>
		5.3. Aset tetap dan Lainnya <i>Property and Equipment</i>	17.303.317
		**) Penyisihan Penurunan Nilai Aset <i>Allowance for impairment of financial assets</i>	1.126.246
12. Penyisihan Aktiva <i>Allowance for Bad Debts</i>	(12.001.395)		
JUMLAH AKTIVA TOTAL ASSETS	1.648.675.453	JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	1.648.675.453

*) Aset keuangan disajikan sebesar nilai bersih setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai aset
Financial assets are presented as net value after being deducted by allowance for impairment of financial assets

**) Jumlah penyisihan penurunan nilai aset yang diperhitungkan dalam penyajian aset keuangan
The amount of allowance for impairment of financial assets being calculated in the restated post

31 Desember 2013 December 31, 2013			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya As Stated Before		Disajikan kembali Restated	
Pos		Pos	
Kewajiban Liabilities	Rp juta IDR Million	Liabilitas Liabilities	Rp juta IDR Million
1. Uang Dalam Peredaran <i>Currency in Circulation</i>	500.030.818	1. Uang Dalam Peredaran <i>Currency in circulations</i>	500.030.818
2. Giro <i>Demand Deposits</i>			
2.1. Pemerintah <i>Government</i>	60.078.359	4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah <i>Liabilities to the Government</i>	
		4.1. Giro <i>Demand Deposits</i>	60.078.359
2.2. Bank <i>Banks</i>	322.527.545	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.1. Giro Bank <i>Banks demand deposits</i>	322.527.545
2.3. Lainnya <i>Others</i>	1.771.278	5. Kewajiban Non Kebijakan <i>Other Liabilities</i>	
		5.1. Giro Lembaga Domestik dan Internasional <i>Demand deposits from domestic and international institutions</i>	1.381.487
		4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah <i>Liabilities to the Government</i>	
		4.1. Giro <i>Demand Deposits</i>	389.791
3. Sertifikat Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Certificates</i>	114.944.212	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah <i>Securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>	114.944.212

31 Desember 2013 December 31, 2013			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya As Stated Before		Disajikan kembali Restated	
Pos		Pos	
Kewajiban Liabilities	Rp juta IDR Million	Liabilitas Liabilities	Rp juta IDR Million
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Bank Indonesia Sharia Certificates</i>	4.712.000	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah <i>Sharia-based securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>	4.712.000
5. Penempatan Berjangka <i>Term Deposits</i>	56.788.961	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing <i>Securities issued and liabilities denominated in foreign currency</i>	56.788.961
6. Penempatan Dana <i>Deposit Facilities</i>	111.099.310	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah <i>Securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>	111.099.310
7. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah <i>Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities</i>	16.267.400	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah <i>Sharia-based securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>	16.267.400

31 Desember 2013 December 31, 2013			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya <i>As Stated Before</i>		Disajikan kembali <i>Restated</i>	
Pos		Pos	
Kewajiban <i>Liabilities</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	Liabilitas <i>Liabilities</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Bank Indonesia Sharia Certificates</i>	4.712.000	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah <i>Sharia-based securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>	4.712.000
5. Penempatan Berjangka <i>Term Deposits</i>	56.788.961	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing <i>Securities issued and liabilities denominated in foreign currency</i>	56.788.961
6. Penempatan Dana <i>Deposit Facilities</i>	111.099.310	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah <i>Securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>	111.099.310
7. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah <i>Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities</i>	16.267.400	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah <i>Sharia-based securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>	16.267.400

31 Desember 2013 December 31, 2013			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya As Stated Before		Disajikan kembali Restated	
Pos		Pos	
Kewajiban Liabilities	Rp juta IDR Million	Liabilitas Liabilities	Rp juta IDR Million
8. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali <i>Securities Sold Under Repurchase Agreements</i>	68.785.840	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah <i>Securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>	67.850.713
		2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah <i>Sharia-based securities issued and liabilities denominated in Rupiah</i>	935.127
9. Pinjaman dari Pemerintah <i>Loans from Government</i>	76.069	4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah <i>Liabilities to the Government</i>	
		4.2. Pinjaman <i>Borrowings from Government</i>	76.069
10. Pinjaman Luar Negeri <i>Foreign Borrowings</i>	2.976.199	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing <i>Securities issued and liabilities denominated in foreign currency</i>	2.976.199
11. Alokasi Hak Tarik Khusus <i>Allocation of Special Drawing Rights</i>	37.174.934	3. Liabilitas Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional <i>Counterpart of Special Drawing Rights allocated by the IMF</i>	37.174.934

31 Desember 2013 <i>December 31, 2013</i>			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya <i>As Stated Before</i>		Disajikan kembali <i>Restated</i>	
Pos		Pos	
Kewajiban <i>Liabilities</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	Liabilitas <i>Liabilities</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>
12. Kewajiban Lain-Lain <i>Other Liabilities</i>	72.075.687	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Financial liabilities related to monetary policy implementation</i>	
		2.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing <i>Securities issued and liabilities denominated in foreign currency</i>	66.900.183
		4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah <i>Liabilities to the Government</i>	
		4.1. Giro <i>Demand Deposits</i>	101.779
		4.2. Pinjaman <i>Borrowings from Government</i>	667
		5. Kewajiban Non Kebijakan <i>Other Liabilities</i>	
		5.2. Imbalan Pascakerja <i>Employee benefits</i>	3.148.427
		5.3. Lainnya <i>Others</i>	1.924.631
Ekuitas <i>Equity</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	Liabilitas <i>Liabilities</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>
1. Modal <i>Capital</i>	17.111.547	6. Selisih Revaluasi <i>Revaluation Reserves</i>	
		6.4. Lainnya <i>Others</i>	14.163.518
		7. Modal <i>Capital</i>	2.948.029
2. Cadangan Umum <i>General Reserves</i>	22.924.506	8. Akumulasi Surplus/Defisit <i>Accumulated Surplus/Deficit</i>	
		8.1. Cadangan Umum <i>General Reserves</i>	22.924.506

31 Desember 2013 <i>December 31, 2013</i>			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya <i>As Stated Before</i>		Disajikan kembali <i>Restated</i>	
Pos		Pos	
Ekuitas <i>Equity</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	Liabilitas <i>Liabilities</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>
3. Cadangan Tujuan <i>Statutory Reserves</i>	13.208.397	8. Akumulasi Surplus/Defisit <i>Accumulated Surplus/Deficit</i>	
		8.2. Cadangan Tujuan <i>Statutory Reserves</i>	13.208.397
4. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi <i>Unrealized Gains/Losses</i>	188.715.296	6. Selisih Revaluasi <i>Revaluation Reserves</i>	
		6.1. Selisih Revaluasi Emas <i>Gold revaluation</i>	33.592.504
		6.2. Selisih Revaluasi Valuta Asing <i>Foreign currency revaluation</i>	165.957.302
		6.3. Selisih Revaluasi Instrumen Keuangan <i>Financial instruments revaluation</i>	(10.834.510)
5. Surplus/Defisit) Tahun Berjalan <i>Current Year Surplus/Deficit</i>	37.407.095	8. Akumulasi Surplus/Defisit <i>Accumulated Surplus/Deficit</i>	
		8.3. Surplus/Defisit Tahun Berjalan <i>Current Year Surplus or Current Year Deficit</i>	37.407.095
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS <i>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</i>	1.648.675.453	JUMLAH LIABILITAS <i>TOTAL LIABILITIES</i>	1.648.675.453

Penjelasan penyajian kembali Laporan Posisi Keuangan:

1. **Pos Emas** tidak ada perubahan nama pos, disajikan sebesar Rp36.757.308 juta.
2. **Pos Uang Asing** disajikan kembali pada pos Aset Non Kebijakan, dalam subpos Aset Keuangan sebesar Rp11.802 juta.
3. **Pos Hak Tarik Khusus** disajikan kembali pada pos Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional, dalam subpos Hak Tarik Khusus sebesar Rp33.060.049 juta.
4. **Pos Giro** disajikan kembali pada:
 - Pos Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing sebesar Rp135.096.818 juta; dan
 - Pos Aset Non Kebijakan, dalam subpos Aset Keuangan sebesar Rp5.773 juta.

Terdapat perbedaan saldo antara penyajian sebelumnya dengan penyajian kembali, karena dalam penyajian kembali pos giro tersebut telah memperhitungkan penyisihan penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp76.586 juta.

5. **Pos Deposito** disajikan kembali pada pos Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing sebesar Rp30.964.202 juta.

Terdapat perbedaan saldo antara penyajian sebelumnya dengan penyajian kembali, karena dalam penyajian kembali pos Deposito tersebut telah memperhitungkan penyisihan penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp306.837 juta.

Notes to the Statement of Financial Position restatement:

1. **Gold post** remained unchanged and was presented at IDR36,757,308 million.
2. **Foreign Currencies** post was restated in Other Assets post, under Other Financial Assets subpost, amounting to IDR11,802 million.
3. **Holdings of Special Drawing Rights** post was restated in Receivables from the IMF post, under Holding of Special Drawing Rights subpost, amounting to IDR33,060,049 million.
4. **Demand Deposits** post was restated in:
 - Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation post, under Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency subpost, amounting to IDR135,096,818 million; and
 - Other Assets post, under Other Financial Assets subpost, amounting to IDR5,773 million.

The difference between the balance previously presented and the restated demand deposit was due to the calculation of allowance for impairment of financial assets in the restated demand deposit post, amounting to IDR76,586 million.

5. **Time Deposits** post was restated in Financial Assets Related To Monetary Policy Implementation post, under Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency subpost, amounting to IDR30,964,202 million.

The difference between the balance previously presented and the restated Time Deposits was due to the calculation of allowance for impairment of financial assets in the restated time deposit post, amounting to IDR306,837 million.

6. **Pos Surat Berharga** disajikan kembali pada pos Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing sebesar Rp970.991.779 juta.

Terdapat perbedaan saldo antara penyajian sebelumnya dengan penyajian kembali, karena dalam penyajian kembali pos Surat Berharga tersebut telah memperhitungkan penyisihan penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp1.750.728 juta.
7. **Pos Surat Berharga Negara Republik Indonesia** disajikan kembali pada pos Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah sebesar Rp115.905.197 juta dan subpos Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah sebesar Rp1.161.504 juta.
8. **Pos Surat Berharga** yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali disajikan kembali pada pos Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah sebesar Rp219.172 juta.
9. **Subpos Tagihan Kepada Pemerintah** yang merupakan bagian dari Pos Tagihan, disajikan kembali pada pos Tagihan, dalam subpos Kepada Pemerintah sebesar Rp234.952.818 juta.

Terdapat perbedaan saldo antara penyajian sebelumnya dengan penyajian kembali, karena dalam penyajian kembali pos Tagihan Kepada Pemerintah tersebut telah memperhitungkan penyisihan penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp2.826.956 juta.
10. **Subpos Tagihan Kepada Bank** yang merupakan bagian dari Pos Tagihan, disajikan kembali pada pos Tagihan, dalam subpos Kepada Bank sebesar Rp2.205.728 juta.
6. **Marketable Securities** post was restated in *Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation* post, under *Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency* subpost, amounting to IDR970,991,779 million.

The difference between the balance previously presented and the restated *Marketable Securities* was due to the calculation of allowance for impairment of financial assets in the restated *Marketable Securities* post amounting to IDR1,750,728 million.
7. **Government Bonds** post was restated in *Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation* post, under *Securities Held and Claims Denominated in Rupiah* subpost, amounting to IDR115,905,197 million and *Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah* subpost, amounting to IDR1,161,504 million.
8. **Securities Purchased Under Resale Agreements** post was restated in *Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation* post, under *Securities Held and Claims Denominated in Rupiah* subpost, amounting to IDR219,172 million.
9. **Claims on Government** subpost, as part of *Claims* post, was restated in *Claims* post, under *Claims on the Government* subpost, amounting to IDR234,952,818 million.

The difference between the balance previously presented and the restated *Claims on the Government* was due to the calculation of allowance for impairment of financial assets in the restated *Claims on the Government* post, amounting to IDR2,826,956 million.
10. **Claims on Banks** post, as part of *Claims* post, was restated in *Claims* account, under *Claims on Banks* subpost, amounting to IDR2,205,728 million.

Terdapat perbedaan saldo antara penyajian sebelumnya dengan penyajian kembali, karena dalam penyajian kembali pos Tagihan Kepada Bank tersebut telah memperhitungkan penyisihan penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp109.613 juta.

The difference between the balance previously presented and the restated Claims on Banks account was due to the calculation of allowance for impairment of financial assets in the restated Claims on Banks post, amounting to IDR109,613 million.

11. **Subpos Tagihan Kepada Lainnya** yang merupakan bagian dari Pos Tagihan, disajikan kembali pada:

- Pos Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing sebesar Rp33.453 juta; dan
- Pos Aset Non kebijakan, dalam subpos Aset Keuangan sebesar Rp2.309.679 juta.

11. **Claims on Others** subpost, as part of Claims post, was restated in:

- *Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation post, under Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency subpost, amounting to IDR33,453 million; and*
- *Other Assets post, under Other Financial Assets subpost, amounting to IDR2,309,679 million.*

Terdapat perbedaan saldo antara penyajian sebelumnya dengan penyajian kembali, karena dalam penyajian kembali pos Tagihan Kepada Lainnya tersebut telah memperhitungkan penyisihan penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp5.804.428 juta.

The difference between the balance previously presented and the restated Claims on Others post was due to the calculation of allowance for impairment of financial assets in the restated Claims on Others post, amounting to IDR5,804,428 million.

12. **Pos Penyertaan** disajikan kembali pada pos Aset Non Kebijakan, dalam subpos Penyertaan sebesar Rp850.343 juta.

12. **Equity Participations** post was restated in Other Assets account, under Participating Interest in domestic and International Institutions subpost, amounting to IDR850,343 million.

13. **Pos Aktiva Lain-Lain** disajikan kembali pada:

- Pos Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing sebesar Rp65.738.476 juta; dan
- Pos Aset Non Kebijakan, dalam subpos Aset Keuangan sebesar Rp1.108.036 juta dan subpos Aset Tetap dan Lainnya sebesar Rp17.303.317 juta.

13. **Other Assets** post was restated in:

- *Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation post, under Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency subpost, amounting to IDR65,738,476 million; and*
- *Other Assets post, under Other Financial Assets sub-account, amounting to IDR1,108,036 million and Property and Equipment subpost amounting to IDR17,303,317 million.*

Terdapat perbedaan saldo antara penyajian sebelumnya dengan penyajian kembali, karena dalam penyajian kembali pos Aktiva Lain-Lain tersebut telah memperhitungkan penyisihan penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp1.126.246 juta.

The difference between the balance previously presented and the restated Other Assets was due to the calculation of allowance for impairment of financial assets in the restated Other Assets post amounting to IDR1,126,246 million.

14. **Pos Penyisihan Aktiva** disajikan kembali sebagai pengurang pada pos-pos dalam komponen aset di bawah ini, sehingga aset keuangan disajikan kembali secara netto.
- Pos Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing sebesar Rp3.236.619 juta.
 - Pos Tagihan, dalam subpos Kepada Pemerintah sebesar Rp2.826.956 juta dan subpos Kepada Bank sebesar Rp109.613 juta.
 - Pos Aset Non Kebijakan, dalam subpos Aset Keuangan sebesar Rp5.828.208 juta.
15. **Pos Uang Dalam Peredaran** tidak ada perubahan nama pos, disajikan sebesar Rp500.030.818 juta.
16. **Subpos Giro Pemerintah** yang merupakan bagian dari Pos Giro, disajikan kembali pada Pos Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah, dalam subpos Giro sebesar Rp60.078.359 juta.
17. **Subpos Giro Bank** yang merupakan bagian dari Pos Giro, disajikan kembali pada Pos Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Giro Bank sebesar Rp322.527.545 juta.
14. **Allowance for Bad Debts** post was restated and to be deducted from the asset components stated below, thus financial assets was restated on a net basis.
- *Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation post, under Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency subpost, amounting to IDR3,236,619 million.*
 - *Claims post, under Claims on the Government subpost, amounting to IDR2,826,956 million and Claims on Banks subpost, amounting to IDR109,613 million.*
 - *Other Assets post, under Other Financial Assets subpost, amounting to IDR5,828,208 million.*
15. **Currency in Circulations** post remained unchanged and was presented at IDR500,030,818 million.
16. **Government Demand Deposits** subpost, as part of Demand Deposits post, was restated in Liabilities to the Government post, under Demand Deposits subpost, amounting to IDR60,078,359 million.
17. **Banks Demand Deposits** subpost, as part of Demand Deposits post, was restated in Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation post, under Bank Demand Deposits subpost, amounting to IDR322,527,545 million.

18. **Subpos Giro Lainnya** yang merupakan bagian dari Pos Giro, disajikan kembali pada:
- Pos Kewajiban Non Kebijakan, dalam subpos Giro Lembaga Domestik dan Internasional sebesar Rp1.381.487 juta; dan
 - Pos Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah, dalam subpos Giro sebesar Rp389.791 juta.
19. **Pos Sertifikat Bank Indonesia** disajikan kembali pada pos Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah sebesar Rp114.944.212 juta.
20. **Pos Sertifikat Bank Indonesia Syariah** disajikan kembali pada pos Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah sebesar Rp4.712.000 juta.
21. **Pos Penempatan Berjangka** disajikan kembali pada pos Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing sebesar Rp56.788.961 juta.
22. **Pos Penempatan Dana** disajikan kembali pada pos Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah sebesar Rp111.099.310 juta.
23. **Pos Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah** disajikan kembali pada pos Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah sebesar Rp16.267.400 juta.
18. **Others Demand Deposits** subpost, as part of Demand Deposits post, was restated on:
- Other Liabilities post, under Demand Deposits from Domestic and International Institutions subpost, amounting to IDR1,381,487 million; and
 - Liabilities to the Government post, under Demand Deposits subpost, amounting to IDR389,791 million.
19. **Bank Indonesia Certificates** post was restated in Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation post, under Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah subpost, amounting to IDR114,944,212 million.
20. **Bank Indonesia Sharia Certificates** post was restated in Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation post, under Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah subpost, amounting to IDR4,712,000 million.
21. **Term Deposits** post was restated in Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation post, under Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency subpost, amounting to IDR56,788,961 million.
22. **Deposit Facilities** post was restated in Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation post, under Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah subpost, amounting to IDR111,099,310 million.
23. **Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities** post was restated in Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation post, under Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah subpost, amounting to IDR16,267,400 million.

24. **Pos Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali** disajikan kembali pada pos Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah sebesar Rp67.850.713 juta, dan subpos Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah sebesar Rp935.127 juta.
25. **Pos Pinjaman dari Pemerintah** disajikan kembali pada pos Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah, dalam subpos Pinjaman sebesar Rp76.069 juta.
26. **Pos Pinjaman Luar Negeri** disajikan kembali pada pos Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing sebesar Rp2.976.199 juta.
27. **Pos Alokasi Hak Tarik Khusus** disajikan kembali pada pos Liabilitas Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional sebesar Rp37.174.934 juta.
28. **Pos Kewajiban Lain-Lain** disajikan kembali pada:
- Pos Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing sebesar Rp66.900.183 juta;
 - Pos Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah, dalam subpos Giro sebesar Rp101.779 juta dan subpos Pinjaman sebesar Rp667 juta;
 - Pos Kewajiban Non Kebijakan, dalam subpos Imbalan Pascakerja sebesar Rp3.148.427 juta; dan subpos Lainnya sebesar Rp1.924.631 juta.
24. **Securities Sold under Repurchase Agreements** post was restated in Financial Liabilities related to Monetary Policy Implementation post, under Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah subpost, amounting to IDR67,850,713 million, and Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah subpost, amounting to IDR935,127 million.
25. **Loans from Government** post was restated in Liabilities to the Government post, under Borrowings from Government subpost, amounting to IDR76,069 million.
26. **Foreign Borrowings** post was restated in Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation post, under Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency subpost, amounting to IDR2,976,199 million.
27. **Allocation of Special Drawing Rights** post was restated in Counterpart of Special Drawing Rights Allocated by the IMF post, amounting to IDR37,174,934 million.
28. **Other Liabilities** post was restated in:
- Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation post, under Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency subpost, amounting to IDR66,900,183 million;
 - Liabilities to the Government post, under Demand Deposits subpost, amounting to IDR101,779 million and Borrowings from Government subpost, amounting to IDR667 million;
 - Other Liabilities post, under Employee Benefits subpost, amounting to IDR3,148,427 million; and Others subpost, amounting to IDR1,924,631 million.

29. **Pos Modal** disajikan kembali pada:

- Pos Selisih Revaluasi, dalam subpos Lainnya sebesar Rp14.163.518 juta; dan
- Pos Modal sebesar Rp2.948.029 juta.

30. **Pos Cadangan Umum** disajikan kembali pada pos Akumulasi Surplus/Defisit, dalam subpos Cadangan Umum sebesar Rp22.924.506 juta.

31. **Pos Cadangan Tujuan** disajikan kembali pada pos Akumulasi Surplus/Defisit, dalam subpos Cadangan Tujuan sebesar Rp13.208.397 juta

32. **Pos Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi** disajikan kembali pada pos Selisih Revaluasi, dalam subpos Selisih Revaluasi Emas sebesar Rp33.592.504 juta, subpos Selisih Revaluasi Valuta Asing sebesar Rp165.957.302 juta, dan subpos Selisih Revaluasi Instrumen Keuangan sebesar (Rp10.834.510 juta).

33. **Pos Surplus/Defisit Tahun Berjalan** disajikan kembali pada pos Akumulasi Surplus/Defisit, dalam subpos Surplus/Defisit Tahun Berjalan sebesar Rp37.407.095 juta.

Surplus Defisit Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2013 audited disajikan kembali sebagai berikut:

29. **Equity post** was restated in:

- *Revaluation Reserves post, under Others subpost, amounting to IDR14,163,518 million; and*
- *Capital post, amounting to IDR2,948,029 million.*

30. **General Reserves post** was restated in *Accumulated Surplus/Deficit post, under General Reserves subpost, amounting to IDR22,924,506 million.*

31. **Statutory Reserves post** was restated in *Accumulated Surplus/Deficit post, under Statutory Reserves subpost, amounting to IDR13,208,397 million.*

32. **Unrealized Gains/Losses post** was restated in *Revaluation Reserves post, under Gold Revaluation subpost, amounting to IDR33,592,504 million, Foreign Currency Revaluation subpost, amounting to IDR165,957,302 million, and Financial Instruments Revaluation subpost, amounting to (IDR10,834,510 million).*

33. **Current Year Surplus/Deficit post** was restated in *Accumulated Surplus/Deficit post, under Current Year Surplus/Deficit subpost, amounting to IDR37,407,095 million.*

The audited restatement of Surplus Deficit for the period from January 1 to December 31, 2013 are as follows:

31 Desember 2013 December 31, 2013			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya As Stated Before		Disajikan kembali Restated	
Pos		Pos	
Penerimaan Revenues	Rp juta IDR Million	Penghasilan Revenues	Rp juta IDR Million
1. Pengelolaan Moneter: <i>Monetary Operations:</i>			
1.1. Pengelolaan Devisa <i>Foreign Reserves Management</i>	26.724.597	1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Monetary Policy Implementation</i>	
		1.1. Pendapatan Bunga <i>Interest income</i>	17.007.869
		1.3. Transaksi Aset Keuangan <i>Net result of financial transactions</i>	9.434.515
		1.5. Lainnya <i>Others</i>	243.334
		2. Pengelolaan Sistem Pembayaran <i>Payment System Services</i>	
		2.2. Non Tunai <i>Non-cash payment systems</i>	24.088
		5. Pendapatan Lainnya <i>Others Income</i>	14.791
1.2. Pengelolaan SSB Dalam Negeri <i>Domestic Securities</i>	8.205.948	1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Monetary Policy Implementation</i>	
		1.1. Pendapatan Bunga <i>Interest income</i>	8.233.176
		1.3. Transaksi Aset Keuangan <i>Net result of financial transactions</i>	(27.228)
1.3. Pemberian Kredit dan Pembiayaan <i>Credit and Financing</i>	272.203	4. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan <i>Income from Providing Fund</i>	272.203
1.4. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing <i>Net result of foreign currency transactions</i>	33.568.134	1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Monetary Policy Implementation</i>	
		1.4. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing <i>Net result of foreign currency transactions</i>	33.568.134
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran <i>Payment System Services</i>	244.982	2. Pengelolaan Sistem Pembayaran <i>Payment System Services</i>	
		2.2. Non Tunai <i>Non-cash payment systems</i>	244.982

31 Desember 2013 <i>December 31, 2013</i>			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya <i>As Stated Before</i>		Disajikan kembali <i>Restated</i>	
Pos		Pos	
Penerimaan <i>Revenues</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	Penghasilan <i>Revenues</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>
3. Pengawasan Perbankan <i>Banking Supervision</i>	258.179	1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Monetary Policy Implementation</i>	
		1.5. Lainnya <i>Others</i>	81.250
		3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial <i>Macprudential Regulation and Supervision</i>	106.696
		5. Pendapatan Lainnya <i>Other income</i>	70.233
4. Lainnya <i>Others</i>	1.839.385	1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Monetary Policy Implementation</i>	
		1.5. Lainnya <i>Others</i>	1.974
		2. Pengelolaan Sistem Pembayaran <i>Payment System Services</i>	
		2.1. Tunai <i>Cash payment systems</i>	1.326.494
		2.2. Non Tunai <i>Non-cash payment systems</i>	95.179
		3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial <i>Macprudential Regulation and Supervision</i>	8.743
		5. Pendapatan Lainnya <i>Others Income</i>	406.995
JUMLAH PENERIMAAN <i>TOTAL REVENUES</i>	71.113.428	JUMLAH PENGHASILAN <i>TOTAL REVENUES</i>	71.113.428

31 Desember 2013 December 31, 2013			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya As Stated Before		Disajikan kembali Restated	
Pos		Pos	
Beban Expenses	Rp juta IDR Million	Beban Expenses	Rp juta IDR Million
1. Pengendalian Moneter <i>Monetary Operations</i>		1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Monetary Policy Implementation</i>	
1.1. Operasi Moneter <i>Monetary Operations</i>	17.789.713	1.1. Beban Bunga <i>Interest expenses</i>	17.061.061
		1.2. Beban imbalan <i>Sharia-based transactions expenses</i>	688.825
		1.5. Lainnya <i>Other Expenses</i>	39.827
1.2. Pengelolaan Devisa <i>Foreign Reserves Management</i>	275.769	1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Monetary Policy Implementation</i>	
		1.5. Lainnya <i>Other Expenses</i>	275.769
1.3. Pinjaman Luar Negeri <i>Foreign Borrowing Management</i>	72.722	1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Monetary Policy Implementation</i>	
		1.1. Beban Bunga <i>Interest expenses</i>	38.785
		1.5. Lainnya <i>Other Expenses</i>	33.937
1.4. Lainnya <i>Others</i>	44.240	1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Monetary Policy Implementation</i>	
		1.5. Lainnya <i>Other Expenses</i>	44.240
2. Jasa Giro pemerintah <i>Interest Expenses on Government Accounts</i>	2.610.495	4. Remunerasi kepada Pemerintah <i>Remuneration on Government General Deposits</i>	2.610.495
3. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran <i>Payment System Operations</i>		2. Pengelolaan Sistem Pembayaran <i>Payment System Services</i>	
3.1. Sistem Pembayaran Tunai <i>Currency Circulation</i>	2.679.328	2.1. Tunai <i>Cash payment systems</i>	2.671.166
		2.2. Non Tunai <i>Non-cash payment systems</i>	8.162

31 Desember 2013 <i>December 31, 2013</i>			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya <i>As Stated Before</i>		Disajikan kembali <i>Restated</i>	
Pos		Pos	
Beban <i>Expenses</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>	Beban <i>Expenses</i>	Rp juta <i>IDR Million</i>
3.2. Sistem Pembayaran Non Tunai <i>Payment System Sponsoring</i>	29.772	2. Pengelolaan Sistem Pembayaran <i>Payment System Services</i>	
		2.2. Non Tunai <i>Non-Cash Payment Systems</i>	29.772
4. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan <i>Banking Regulations and Supervision</i>	198.459	1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter <i>Monetary Policy Implementation</i>	
		1.5. Lainnya <i>Others Expenses</i>	28.835
		3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial <i>Macprudential Regulation and Supervision</i>	169.624
5. Umum dan lainnya <i>General and Others</i>		5. Beban Umum dan Lainnya <i>General and Administrative Expenses</i>	
5.1. SDM dan Logistik <i>Human Resources and Logistics</i>	5.169.213	5.1. SDM, Organisasi dan Logistik <i>Salaries, organisation and logistics</i>	5.169.213
5.2. Lainnya <i>Others</i>	46.226	5. Beban Umum dan Lainnya <i>General and Administrative Expenses</i>	
		5.2. Lainnya <i>Other expenses</i>	46.226
JUMLAH BEBAN <i>TOTAL EXPENSES</i>	28.915.937	JUMLAH BEBAN <i>TOTAL EXPENSES</i>	28.915.937
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK <i>SURPLUS (DEFICIT) BEFORE TAXES</i>	42.197.491	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK <i>SURPLUS (DEFICIT) BEFORE TAXES</i>	42.197.491
PENERIMAAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN <i>INCOME TAX REVENUES (EXPENSES)</i>	(4.790.396)	PAJAK <i>TAXES</i>	(4.790.396)
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK <i>SURPLUS (DEFICIT) AFTER TAXES</i>	37.407.095	SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK <i>SURPLUS (DEFICIT) AFTER TAXES</i>	37.407.095

Penjelasan penyajian kembali Laporan Surplus Defisit:

1. **Subpos Penerimaan Pengelolaan Devisa** yang merupakan bagian dari pos Penerimaan Pengelolaan Moneter disajikan kembali pada:
 - Pos Pendapatan Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Pendapatan Bunga sebesar Rp17.007.869 juta, subpos Pendapatan Transaksi Aset Keuangan sebesar Rp9.434.515 juta, dan subpos Pendapatan Lainnya sebesar Rp243.334 juta;
 - Pos Pendapatan Pengelolaan Sistem Pembayaran, subpos Pendapatan Non Tunai sebesar Rp24.088 juta; dan
 - Pos Pendapatan Lainnya sebesar Rp14.791 juta.
2. **Subpos Penerimaan Pengelolaan SSB Dalam Negeri** yang merupakan bagian dari pos Penerimaan Pengelolaan Moneter disajikan kembali pada pos Pendapatan Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Pendapatan Bunga sebesar Rp8.233.176 juta dan subpos Pendapatan Transaksi Aset Keuangan sebesar negatif Rp27.228 juta.
3. **Subpos Penerimaan Pemberian Kredit dan Pembiayaan** yang merupakan bagian dari pos Penerimaan Pengelolaan Moneter disajikan kembali pada pos Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan sebesar Rp272.203 juta.
4. **Subpos Penerimaan Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing** yang merupakan bagian dari pos Penerimaan Pengelolaan Moneter disajikan kembali pada pos Pendapatan Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing sebesar Rp33.568.134 juta.

Notes to the restated Surplus Deficit Statement:

1. **Revenues from Foreign Reserves Management subpost, as part of Revenues from Monetary Operations post, was restated in:**
 - *Revenues from Monetary Policy Implementation post, under Interest Income subpost, amounting to IDR17,007,869 million, Net Result of Financial Transactions subpost, amounting to IDR9,434,515 million, and Others subpost, amounting to IDR243,334 million;*
 - *Revenues from Payment System Services post, under Non-Cash Payment Systems subpost, amounting to IDR24,088 million; and*
 - *Other Income post, amounting to IDR14,791 million.*
2. **Revenues from Domestic Securities subpost, as part of Revenues from Monetary Operations post, was restated in Revenues from Monetary Policy Implementation post, under Interest Income subpost, amounting to IDR8,233,176 million and Net Result of Financial Transactions subpost, amounting to negative IDR27,228 million.**
3. **Revenues from Credit and Financing subpost, as part of Revenues from Monetary Operations post, was restated in Income from Providing Fund post, amounting to IDR272,203 million.**
4. **Revenues from Exchange Differences subpost, as part of Revenues from Monetary Operations post, was restated in Revenues from Monetary Policy Implementation post, under Net Result of Foreign Currency Transactions subpost, amounting to IDR33,568,134 million.**

5. **Pos Penerimaan Pengelolaan Sistem Pembayaran** disajikan kembali pada pos Pendapatan Pengelolaan Sistem Pembayaran, dalam subpos Pendapatan Non Tunai sebesar Rp244.982 juta.
6. **Pos Penerimaan Pengawasan Perbankan** disajikan kembali pada:
- Pos Pendapatan Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Pendapatan Lainnya sebesar Rp81.250 juta;
 - Pos Pendapatan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial sebesar Rp106.696 juta; dan
 - Pos Pendapatan Lainnya sebesar Rp70.233 juta.
7. **Pos Penerimaan Lainnya** disajikan kembali pada:
- Pos Pendapatan Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Pendapatan Lainnya sebesar Rp1.974 juta;
 - Pos Pendapatan Pengelolaan Sistem Pembayaran, dalam subpos Pendapatan Tunai sebesar Rp1.326.494 juta dan subpos Pendapatan Non Tunai sebesar Rp95.179 juta;
 - Pos Pendapatan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial sebesar Rp8.743 juta;
 - Pos Pendapatan Lainnya sebesar Rp406.995 juta.
8. **Subpos Beban Operasi Moneter** yang merupakan bagian dari pos Beban Pengendalian Moneter disajikan kembali pada pos Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam:
- Subpos Beban Bunga sebesar Rp17.061.061 juta;
 - Subpos Beban Imbalan sebesar Rp688.825 juta; dan
 - Subpos Beban Lainnya sebesar Rp39.827 juta.
5. **Revenues from Payment System Services** post was restated as Revenues from Payment System Services post, under Non-cash Payment Systems subpost, amounting to IDR244,982 million.
6. **Revenues from Banking Supervision** post was restated in:
- Revenues from Monetary Policy Implementation post, under Others subpost, amounting to IDR81,250 million;
 - Revenues from Macroprudential Regulation and Supervision post, amounting to IDR106,696 million; and
 - Other Income post, amounting to IDR70,233 million.
7. **Other Revenues** post was restated in:
- Revenues from Monetary Policy Implementation post, under Others sub-account, amounting to IDR1,974 million;
 - Revenues from Payment System Services post, under Cash Payment Systems subpost, amounting to IDR1,326,494 million and Non-cash Payment Systems subpost, amounting to IDR95,179 million;
 - Revenues from Macroprudential Regulation and Supervision post, amounting to IDR8,743 million;
 - Other Income post, amounting to IDR406,995 million.
8. **Monetary Operations Expenses** subpost, as part of Monetary Operations Expenses post, was restated in Monetary Policy Implementation Expenses post, under:
- Interest Expenses subpost, amounting to IDR17,061,061 million;
 - Sharia-based Transactions Expenses subpost, amounting to IDR688,825 million; and
 - Other Expenses subpost, amounting to IDR39,827 million.

9. **Subpos Beban Pengelolaan Devisa** yang merupakan bagian dari pos Beban Pengendalian Moneter disajikan kembali pada pos Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Beban Lainnya sebesar Rp275.769 juta.
*9. **Foreign Reserves Management Expenses** subpost, as part of Monetary Operation Expenses post, was restated in Monetary Policy Implementation Expenses post, under Other Expenses subpost, amounting to IDR275,769 million.*
10. **Subpos Beban Pinjaman Luar Negeri** yang merupakan bagian dari pos Beban Pengendalian Moneter disajikan kembali pada pos Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Beban Bunga sebesar Rp38.785 juta dan subpos Beban Lainnya sebesar Rp33.937 juta.
*10. **Foreign Borrowing Management Expenses** subpost, as part of Monetary Operation Expenses post, was restated in Monetary Policy Implementation Expenses post, under Interest Expenses subpost, amounting to IDR38,785 million and Other Expenses subpost, amounting to IDR33,937 million.*
11. **Subpos Beban Lainnya** yang merupakan bagian dari pos Beban Pengendalian Moneter disajikan kembali pada pos Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dalam subpos Beban Lainnya sebesar Rp44.240 juta.
*11. **Other Expenses** subpost, as part of Monetary Operation Expenses post, was restated in Monetary Policy Implementation Expenses post, under Others subpost, amounting to IDR44,240 million.*
12. **Pos Beban Jasa Giro Pemerintah** disajikan kembali pada pos Beban Remunerasi kepada Pemerintah sebesar Rp2.610.495 juta.
*12. **Interest Expenses on Government Accounts** post was restated in Remuneration on Government General Deposits post, amounting to IDR2,610,495 million.*
13. **Subpos Beban Sistem Pembayaran Tunai** yang merupakan bagian dari pos Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran disajikan kembali dalam pos Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran, dalam subpos Beban Tunai sebesar Rp2.671.166 juta dan subpos Beban Non Tunai sebesar Rp8.162 juta.
*13. **Currency Circulation Expenses** subpost, as part of Payment System Operations Expenses post, was restated in Payment System Services Expenses post, under Cash Payment Systems subpost, amounting to IDR2,671,166 million and Non-cash Payment Systems subpost, amounting to IDR8,162 million.*
14. **Subpos Beban Sistem Pembayaran Non Tunai** yang merupakan bagian dari pos Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran disajikan kembali dalam pos Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran, dalam subpos Beban Non Tunai sebesar Rp29.772 juta.
*14. **Payment Systems Sponsoring Expenses** subpost, as part of Payment System Operations Expenses post, was restated in Payment System Services Expenses post, under Non-Cash Payment Systems subpost, amounting to IDR29,772 million.*

15. Pos beban Pengaturan dan Pengawasan

Perbankan disajikan kembali dalam:

- Pos Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter, subpos Beban Lainnya sebesar Rp28.835 juta; dan
- Pos Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial sebesar Rp169.624 juta.

16. Subpos beban SDM dan Logistik yang merupakan bagian dari pos Beban Umum dan Lainnya disajikan kembali dalam pos Beban Umum dan Lainnya, dalam subpos beban SDM, Organisasi dan Logistik sebesar Rp5.169.213 juta.

17. Subpos beban Lainnya yang merupakan bagian dari pos Beban Umum dan Lainnya disajikan kembali pada pos Beban Umum dan Lainnya, dalam subpos Beban Lainnya sebesar Rp46.226 juta.

E. PERINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN

1. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar TOZ2,509,874.4000 dan TOZ2,509,873.5400 atau setara dengan Rp37.441.928 juta dan Rp36.757.308 juta, dengan rincian sebagai berikut:

15. Banking Regulations and Supervision Expenses was restated in:

- *Monetary Policy Implementation Expenses post, under Other Expenses subpost, amounting to IDR28,835 million; and*
- *Macroprudential Regulation and Supervision Expenses post, amounting to IDR169,624 million.*

16. Human Resources and Logistics Expenses subpost, as part of General and Other Expenses post, was restated in General and Administrative Expenses post, under Salaries, Organisation, and Logistics expenses subpost, amounting to IDR5,169,213 million.

17. Other Expenses subpost, as part of General and Other Expenses post, was restated in General and Administrative Expenses post, under Other Expenses subpost, amounting to IDR46,226 million.

E. FINANCIAL STATEMENT DETAILS

1. Gold

The gold balance as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively were TOZ2,509,874.4000 and TOZ2,509,873.5400 or equivalent to IDR37,441,928 million and IDR36,757,308 million, with the following details:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Emas	35.012.761	36.757.308	Gold
Hak kontraktual atas emas batangan	2.429.167	0	Gold Receivables
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai aset	0	0	Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Emas	37.441.928	36.757.308	Total Gold

Harga emas batangan di pasar emas London per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar USD1,199.25 per troy ounce (TOZ) dan USD1,201.50 per TOZ. Pada tahun 2014, Bank Indonesia melakukan penempatan sebagian emas batangan dalam bentuk deposito emas sebesar TOZ162,827.3200 atau setara dengan Rp2.429.167 juta.

The price of gold bullion in the London gold market as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively were USD1,199.25 per troy ounce (TOZ) and USD1,201.50 per TOZ. In 2014, Bank Indonesia conducted a partial placement of gold bullion in gold deposits amounting to TOZ162,827.3200 or equivalent to IDR2,429,167 million.

2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Surat berharga yang dimiliki oleh Bank Indonesia diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, sedangkan tagihan karena transaksi repo dan tagihan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp1.490.095.581 juta dan Rp1.320.110.600 juta dengan rincian sebagai berikut:

2. Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation

Securities held by Bank Indonesia are calculated based on their fair value through revaluation reserves, while claims derived from reverse operation transactions and other claims are calculated based on their amortized acquisition cost.

Financial assets related to Monetary Policy Implementation as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively were IDR1,490,095,581 million and IDR1,320,110,600 million, with the following details:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	134.444.810	116.124.369	Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation
Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	1.403.251	1.161.504	Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	1.354.247.520	1.202.824.727	Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency
Jumlah Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	1.490.095.581	1.320.110.600	Total Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation

a. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah

a. Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Surat Utang Negara (SUN)	133.523.365	115.905.197	Government Securities
Tagihan kepada Bank karena Transaksi Repo Surat Berharga	0	219.172	Claim on Banks Arising from Reverse Operations
Tagihan Lainnya	921.445	0	Other Claims
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0	Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	134.444.810	116.124.369	Total Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

b. Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah

Saldo Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp1.403.251 juta dan Rp1.161.504 juta yang merupakan Surat Berharga Syariah Negara.

b. Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

The balance of Sharia-based securities held and claim denominated in Rupiah as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively were IDR1,403,251 million and IDR1,161,504 million in Government Sharia Securities.

c. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing

c. Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Penempatan dana di bank luar negeri	352.960.670	356.025.997	Balances with Banks and Portfolio Managers Outside Indonesia
Surat Berharga	1.001.246.471	850.001.876	Securities
Tagihan	40.379	33.473	Claims
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	3.236.619	Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	1.354.247.520	1.202.824.727	Total Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency

- 1) Penempatan dana di bank luar negeri terdiri dari Giro, Deposito, Penempatan pada *External Portfolio Manager*, dan *Reinvestasi Cash Collateral*. Terdapat penempatan dana pada IMF dalam bentuk *Deposito Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)* sebesar SDR25,000,000.00 atau setara dengan Rp450.446 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dan setara dengan Rp469.277 juta pada tanggal 31 Desember 2013, serta *Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and PRGF Subsidy Operations ("The Trust")* sebesar SDR4,850,030.00 atau setara dengan Rp87.387 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dan setara dengan Rp91.040 juta pada tanggal 31 Desember 2013.
 - 2) Dalam SSB Valas yang dimiliki oleh Bank Indonesia per 31 Desember 2014, termasuk alokasi penempatan pada *Third Party Securities Lending (TPSL)* sebesar Rp171.183.145 juta. Dari jumlah alokasi tersebut yang telah dipinjamkan adalah sebesar Rp151.841.549 juta dan Bank Indonesia menerima agunan (*collateral*) dalam bentuk tunai sebesar Rp33.852.249 juta dan dalam bentuk SSB (non tunai) sebesar Rp130.530.537 juta yang ditatausahakan secara *extra comptable*.
- 1) *Balances with banks and portfolio managers outside Indonesia consisted of Demand Deposits, Term Deposits, Investments with an External Portfolio Manager, and Cash Collateral Reinvestments. Funds deposited with the IMF in Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) deposits were SDR25,000,000.00 or equivalent to IDR450,446 million on December 31, 2014 and equivalent to IDR469,277 million as of December 31, 2013, as well as the Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and the PRGF Subsidy Operations ("The Trust") amounting to SDR4,850,030.00 or equivalent to IDR87,387 million on December 31, 2014 and equivalent to IDR91,040 million as of December 31, 2013.*
 - 2) *Marketable securities denominated in foreign currency held by Bank Indonesia as of December 31, 2014, included the allocation of placements in Third Party Securities Lending (TPSL), were IDR171,183,145 million. From this allocated amount, an estimated IDR151,841,549 million were loaned and Bank Indonesia received collateral of cash amounting to IDR33,852,249 million and of (non-cash) marketable securities amounting to IDR130,530,537 million administered as extra comptable.*

3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional

Saldo Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2014 sebesar SDR1,761,089,195.00 atau setara dengan Rp31.731.041 juta dan per 31 Desember 2013 sebesar SDR1,761,224,431.00 atau setara dengan Rp33.060.049 juta.

Jumlah liabilitas terkait dengan alokasi hak tarik khusus sebagaimana pos Liabilitas Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional sebagaimana catatan E.8.

3. Receivables from the IMF

The balance of the holding of special drawing rights as of December 31, 2014 was SDR1,761,089,195.00 or equivalent to IDR31,731,041 million and as of December 31, 2013 was SDR1,761,224,431.00 or equivalent to IDR33,060,049 million.

Total liabilities related to the allocation of special drawing rights as posted in the Counterpart of Special Drawing Rights allocated by the IMF is specified in note E.8.

4. Tagihan

Saldo Tagihan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp230.568.589 juta dan Rp237.158.546 juta dengan rincian sebagai berikut:

4. Claims

The balance of claims as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively were IDR230,568,589 million and IDR237,158,546 million, with the following details:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Tagihan Kepada Pemerintah			Claims on the Government
Surat Utang yang tidak dapat Dipindahtangankan:			Non-tradable Government Securities:
SUP Nomor SU-002/MK/1998	16.444.954	17.301.017	SUP Nomor SU-002/MK/1998
SUP Nomor SU-004/MK/1999	44.796.189	46.959.390	SUP Nomor SU-004/MK/1999
SUP Nomor SU-007/MK/2006	42.812.142	44.879.534	SUP Nomor SU-007/MK/2006
Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003	125.000.645	125.729.598	Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003
Tagihan:			Claims:
Tagihan karena Keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional	2.826.956	2.826.956	Claims due to Government Membership of International Institutions
Tagihan bunga SUP dan Subsidi Bunga Kredit Program	81.717	83.279	Claims due to Loan Interest
Tagihan Kepada Bank			Claims on Banks
Tagihan dalam Rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999	1.488.524	2.315.342	Claims arising from credit to banks prior 1999
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	2.882.538	2.936.570	Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Tagihan	230.568.589	237.158.546	Total Claims

a. SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia.

a. SUP Number SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 was issued on October 23, 1998 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 on Domestic Loans in Debt Securities in conjunction with Government Regulation Number 60 of 1998 on Additional Equity Participation of the Republic of Indonesia in PT Bank Ekspor Impor Indonesia.

Nilai nominal SU-002 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

The nominal value of SU-002 was IDR20,000,000 million, non-transferable and non-tradable.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pursuant to Act Number 41 of 2008 dated November 10, 2008 on Government Budget Income and Expenditure for Fiscal Year 2009, the Minister of Finance issued the fifth addendum of SU-002 which amended the interest rate from 1% to 0.1% per year and took effect from January 1, 2009.

Baki debet SU-002 per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp16.444.954 juta.

The outstanding balance of SU-002 as of December 31, 2014 was IDR16,444,954 million.

b. SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999.

b. SUP Number SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 was issued on May 28, 1999 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 on Domestic Loans in Debt Securities in conjunction with the Joint Approval of the Government and Bank Indonesia dated February 6, 1999.

Nilai nominal SU-004 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

The nominal value of SU-004 was IDR53,779,500 million, non-transferable and non-tradable.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Based on Act Number 41 of 2008 dated November 10, 2008 on Government Budget Income and Expenditure for Fiscal Year 2009, the Minister of Finance issued the fifth addendum of SU-004 which amended interest rates from 3% to 0.1% per year and took effect from January 1, 2009.

Baki debet SU-004 per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp44.796.189 juta.

The outstanding balance of SU-004 as of December 31, 2014 was IDR44,796,189 million.

c. SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan

c. SUP Number SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 was issued on November 24, 2006 based on Act Number 24 of 2002 on Government Bonds and Joint Agreement between the Minister of Finance

Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 s.d. tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta.
- 2) Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta.
- 3) Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta.
- 4) Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

- 1) SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.
- 2) Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.
- 3) Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan.

and the Governor of Bank Indonesia concerning Restructuring of Government Bonds Number SU-002/MK/1998 and SU-004/MK/1999 dated April 18, 2006. SU-007 has a face value amounting to IDR54,862,150 million that is non-tradable.

SU-007 was issued to substitute interest and indexation arrears resulting from SU-002 and SU-004 up to December 31, 2005, with the following details:

- 1) SU-002 interest arrears amounting to IDR4,637,583 million.
- 2) SU-004 interest arrears amounting to IDR12,291,887 million.
- 3) SU-002 indexation arrears amounting to IDR11,231,072 million.
- 4) SU-004 indexation arrears amounting to IDR26,701,608 million.

The terms and conditions for the Bonds are as follows:

- 1) SU-007 took effect on January 1, 2006 and matures on August 1, 2025.
- 2) Interest on SU-007 is 0.1% per year, which was calculated on the remaining principal balances and paid in cash by the Government to Bank Indonesia every six months, on February 1 and August 1. The first interest payment was made on December 1, 2006 for interest due on February 1, 2006 and August 1, 2006.
- 3) Principal repayment on SU-007 was divided into 38 installments. The first installment was due and paid on February 1, 2007 and the next installments are due and paid on August 1 and February 1 of each year until the final installment on August 1, 2025. Principal repayments are settled either in cash or tradable Government Securities.

Baki debit SU-007 per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp42.812.142 juta.

The outstanding balance of SU-007 as of December 31, 2014 were IDR42,812,142 million.

d. Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 (SKB Tahun 2003). Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp144.536.094 juta.

d. Treasury Bond Series SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 was issued to substitute SUP Number SU-001/MK/1998 and Number SU-003/MK/1999 in relation to the implementation of the Agreement between the Government and Bank Indonesia concerning the Settlement of BLBI and the Financial Relationship between the Government and Bank Indonesia dated August 1, 2003 (SKB of 2003). The nominal value of SRBI-01 was IDR144,536,094 million.

Pada tanggal 31 Juli 2012 telah ditandatangani revisi SKB Tahun 2003 oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian yang antara lain memuat restrukturisasi Obligasi Negara Nomor Seri SRBI-01/MK/2003 dari semula pembayaran sekaligus (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo tahun 2033 dengan sistem *self-liquidating*, menjadi pembayaran dengan metode cicilan (*amortized*) s.d. jatuh tempo tahun 2043, sehingga persyaratan SRBI-01 mengalami perubahan sebagai berikut:

On July 31, 2012, a revision to the Joint Agreement of 2003 (SKB of 2003) was signed by the Governor of Bank Indonesia, the Minister of Finance, and the Coordinating Minister for the Economy that, among others, contained the restructuring of Treasury Bond Series Number SRBI-01/MK/2003 from the bullet payment on maturity due in 2033 with a self-liquidating system whereby payment will be amortized and maturing on 2043, therefore, the terms and conditions of SRBI-01 are amended as follows:

- 1) SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2043.
- 2) SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1% dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
- 3) Pokok SRBI-01 dibayar setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Agustus 2043. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.

- 1) *SRBI-01 became effective on August 1, 2003 and will mature on August 1, 2043.*
- 2) *SRBI-01 bears an annual interest at 0.1% of the remaining principal, which is paid by the government once every six months, ie. in February and August.*
- 3) *Principal of SRBI-01 is paid on February 1 and August 1 of each year whereby the last installment is due and payable on August 1, 2043. Principal installments are paid in cash or derived from Bank Indonesia's surplus, which have been allocated to the Government.*

Baki debit SRBI-01 per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp125.000.645 juta.

The outstanding balance of SRBI-01 as of December 31, 2014 were IDR125,000,645 million.

e. Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Keuangan Internasional

Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Keuangan Internasional (Dana Talangan) sebesar Rp2.826.956 juta, merupakan tagihan kepada Pemerintah di beberapa lembaga internasional yaitu:

- International Monetary Fund (IMF) sebesar Rp2.764.861 juta.
- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar Rp58.536 juta.
- Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp1.706 juta.
- International Development Association (IDA) sebesar Rp1.853 juta.

Tagihan tersebut berasal dari pembayaran secara tunai yang dilakukan Bank Indonesia atas nama Pemerintah sehubungan dengan penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional sejak tahun 1972 s.d. 1999.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, mulai Laporan tahun 2009, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan telah mencatat Dana Talangan tersebut sebagai kewajiban/pasiva dalam pos "Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya". Pemerintah dan Bank Indonesia saat ini masih melakukan pembahasan terkait penyelesaian atas tagihan tersebut.

f. Tagihan kepada Bank dalam rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999

Tagihan Kepada Bank dalam rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999 antara lain terdiri atas Tagihan kepada Bank berupa *Subordinated Loan* (SOL) dan KLBI yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013, Bank Indonesia masih mengelola SOL dan KLBI

e. Claims Due to Government Membership of International Institutions

Claims arisen from Government membership in International Institutions were IDR2,826,956 million, which represented claims to the government in various international institutions, namely:

- *International Monetary Fund (IMF) amounting to IDR2,764,861 million.*
- *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) amounting to IDR58,536 million.*
- *Asian Development Bank (ADB) amounting to IDR1,706 million.*
- *International Development Association (IDA) amounting to IDR1,853 million.*

The claim derived from cash payments made by Bank Indonesia on behalf of the Government for its participation in international institutions from 1972 to 1999.

In the Central Government's Financial Statements, commencing from the 2009, the Government through the Ministry of Finance recognized these claims as liabilities under "Other Domestic Long-Term Liabilities". The Government and Bank Indonesia are currently in discussions to resolve these claims.

f. Claims Arising From Credit to Banks Prior 1999

Claims arising from credit to banks prior 1999, among others, consist of Claims on Banks in SOL and KLBI given in accordance to Act Number 13 of 1968 on the Central Bank. As of December 31, 2014 and December 31, 2013, Bank Indonesia continued to manage the SOL and KLBI until they reach maturity dates, with their respective balances

tersebut sampai dengan jatuh tempo, dengan saldo masing-masing sebesar Rp1.488.524 juta dan Rp2.315.342 juta. Penurunan saldo SOL dan KLBI tersebut terutama karena adanya pelunasan sebagian tagihan SOL sebesar Rp789.108 juta.

amounting to IDR1,488,524 million and IDR2,315,342 million. This decrease in the balance of SOL and KLBI was mainly due to the partial repayment of SOL claims amounting to IDR789,108 million.

5. Aset Non Kebijakan

Aset Non Kebijakan Bank Indonesia per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp22.951.832 juta dan Rp21.588.950 juta dengan rincian sebagai berikut:

5. Other Assets

Bank Indonesia's Other Assets as of December 31, 2014 and 31 December 31, 2013 were IDR22,951,832 million and IDR21,588,950 million respectively, with the following details:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Penyertaan	819.923	850.343	Participation
Bank for International Settlements	757.723	789.398	Bank for International Settlements
International Islamic Liquidity Management	62.200	60.945	International Islamic Liquidity Management
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0	Allowance for Impairment of Financial Assets
Aset Keuangan	2.122.832	3.435.290	Other Financial Assets
Uang asing dan giro dalam valuta asing	23.700	17.633	Foreign Currency Banknotes and Demand Deposits
Tagihan kepada non bank di dalam negeri	7.948.312	8.137.862	Claims on Domestic Non-bank
Tagihan kepada non bank di luar negeri	1.116.816	1.108.001	Claims on Foreign Non-bank
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	6.965.996	5.828.206	Allowance for Impairment of Financial Assets
Aset Tetap dan Lainnya	20.009.077	17.303.317	Property and Equipment
Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	15.951.033	15.961.241	Tangible and Intangible Fixed Assets
Aset Lainnya	4.058.044	1.342.076	Others
Jumlah Aset Non Kebijakan	22.951.832	21.588.950	Total Other Assets

a. Penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS)

Tujuan penyertaan pada BIS adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan

a. Participation in Bank for International Settlements (BIS)

The purposes of the equity participation are to gain more access in BIS decision-making activities, to utilize the provided facilities, to increase international

fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerja sama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5,000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42,054,000.00 atau setara dengan Rp757.723 juta per 31 Desember 2014.

b. International Islamic Liquidity Management (IILM)

Tujuan dibentuknya IILM adalah untuk menyediakan instrumen keuangan syariah jangka pendek yang berkualitas tinggi, likuid dan dapat diperdagangkan secara internasional dengan *rating* tinggi terutama untuk mendukung pengelolaan likuiditas oleh lembaga keuangan syariah. Keanggotaan Bank Indonesia direpresentasikan dengan kepemilikan saham IILM per 31 Desember 2014 sebesar 6,67% atau senilai USD5,000,000.00 setara dengan Rp62.200 juta.

c. Tagihan Kepada Non Bank

Termasuk dalam tagihan kepada non bank di dalam negeri, antara lain:

- 1) Tagihan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program sebesar Rp1.104 juta, merupakan tagihan atas KLBI yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang selanjutnya sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tagihan tersebut dialihkan pengelolaannya kepada PT Permodalan Nasional Madani sebagai BUMN Koordinator.

investor confidence towards Indonesia, and to improve cooperation in Central Banking pertaining to monetary policy, financial system stability and payment systems. Bank Indonesia purchased 3,000 shares (0.55% of total issued shares) on September 29, 2003 with a nominal value of SDR5,000.00/share and a total acquisition cost of SDR42,054,000.00 equivalent to IDR757,723 million as of December 31, 2014.

b. International Islamic Liquidity Management (IILM)

IILM's objective is to provide high-quality, liquid and internationally tradable short-term Islamic financial instruments with high ratings, used mainly to support liquidity management by Islamic financial institutions. Bank Indonesia's membership includes shares in IILM that as of December 31, 2014 amounting to 6.67% worth USD5,000,000.00 or equivalent to IDR62,200 million.

c. Claims on Non-Banks

Claims on domestic non-banks include, among others:

- 1) *Claims on State-Owned Enterprises (SOEs) are duly appointed by the government in order to handover the remaining credit program amounting to IDR1,104 million that represents claims on KLBI granted under Act Number 13 of 1968 on Central Bank. Following the enactment of Act Number 23 of 1999 on Bank, these claims have been transferred to PT Permodalan Nasional Madani as the coordinator.*

- 2) Tagihan karena pemberian kredit *channeling* sebesar Rp5.830.531 juta, yang merupakan tagihan atas KLBI yang disalurkan melalui bank sebagai *channeling agent* namun hingga jatuh tempo tagihan tersebut masih belum terselesaikan. Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp5.700.174 juta.

Dalam rangka memenuhi permintaan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-152/MK.05/2008 tanggal 3 April 2008, BPK-RI telah melakukan penelitian atas tunggakan KUT. Tujuan penelitian tersebut adalah menilai tunggakan KUT tahun penyediaan 1998/1999 pola *channeling* per 31 Desember 2009 sesuai prosedur yang disepakati bersama (*agreed upon procedure*) dalam rangka *risk sharing* antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).

BPK-RI dengan surat Nomor 06/S/IV/01/2011 tanggal 14 Januari 2011 telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Direktur Utama Perum Jamkrindo. Dalam LHP dimaksud, BPK-RI menyimpulkan bahwa Program KUT Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999 pola *channeling* mengandung beberapa kelemahan sistem pengendalian manajemen baik dari segi desain dan implementasinya yang meliputi kebijakan, organisasi, mekanisme penyaluran dan pelunasan KUT, pelaporan, pendokumentasian dan pengawasan. Kelemahan tersebut cenderung menjadi penyebab tingginya tunggakan KUT TP 1998/1999 pola *channeling*.

- 2) *Claims on loan channeling amounting to IDR5,830,531 million, which represent claims on KLBI channeled through banks as channeling agents that has not been settled as per due dates. Included in the claims resulting from the channeling are arrears derived from the Agriculture Enterprise Credit (KUT) amounting to IDR5,700,174 million.*

To fulfill the request of the Minister of Finance through Letter Number S-152/MK.05/2008 dated April 3, 2008, the BPK-RI had audited the KUT arrears. The objective of the audit was to assess whether the arrears arisen from the 1998/1999 KUT channeling as of December 31, 2009 were in accordance with the agreed-upon procedures on risk sharing among the Government, Bank Indonesia, and the Indonesian Credit Insurance Public Company (Perum Jamkrindo).

Through its letter Number 06/S/IV/01/2011 dated January 14, 2011, BPK-RI had submitted its audit report to the Minister of Finance, the Governor of Bank Indonesia, and the President Director of Jamkrindo. In this report, BPK-RI concluded that the KUT arrears derived from the channeling credit program in 1998/1999 revealed a number of weaknesses in terms of management control, design and implementation that covers policies, organization, KUT delivery and settlement mechanism, reporting, documentation and supervision. These weaknesses had led to high arrears derived from the KUT channeling program in 1998/1999.

Selanjutnya dalam rangka *risk sharing* BPK-RI menyarankan agar Bank Indonesia, Pemerintah, dan Perum Jamkrindo untuk melakukan hal-hal antara lain:

- a) Menyetujui status tunggakan KUT TP 1998/1999 pola *channeling* yang tidak didukung dokumen penyaluran yang lengkap, tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian dan tidak didukung sertifikat penjaminan Perum Jamkrindo.
- b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka penyelesaian saldo rekening milik Pemda pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pelunasan KUT TP 1998/1999 pola *channeling*.
- c) Melakukan koordinasi dengan bank pelaksana untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan saldo tunggakan dan tabungan beku.

Bank Indonesia telah meminta tanggapan kepada Kementerian Keuangan dan penegasan mengenai penyelesaian *risk sharing* tunggakan KUT 1998/1999 pola *channeling* melalui surat Nomor 13/3/GBI/DKBU tanggal 22 Juni 2011. Dalam rangka membahas penyelesaian *risk sharing* KUT, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan kementerian terkait (Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, serta Perum Jamkrindo), pembahasan terakhir dilakukan pada tanggal 18 Juni 2014.

- 3) Tagihan pinjaman dan pembiayaan multiguna kepada pegawai dan Anggota Dewan Gubernur per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.082.776 juta.

Furthermore, within the context of *risk sharing*, BPK-RI subsequently suggested Bank Indonesia, the Government, and Jamkrindo to:

- a) Agree on the status of KUT channeling arrears for 1998/1999 which were not supported by full disbursement documentation and by Farmers Group Needs Definitive Plans (RDKK) as per Minister of Agriculture decree and with Certificate of Guarantee from Jamkrindo.
- b) Coordinate with the Local Government (LG) for the settlements of the account balances of the Local Governments in the implementing banks, which were used to accommodate the payment of KUT loans in 1998/1999.
- c) Coordinate with the implementing banks for the settlement of the outstanding balance and frozen accounts.

Bank Indonesia had requested the Ministry of Finance's for a response and a confirmation about the need for *risk sharing* in respect of the 1998/1999 KUT channeling arrears through Letter Number 13/3/GBI/DKBU dated June 22, 2011. To discuss the settlement of the KUT *risk sharing*, Bank Indonesia conducted a number of meetings with related ministries (Coordinating Ministry for the Economy, Ministry of Finance, State Ministry for Cooperatives and Small & Medium Enterprises, and Perum Jamkrindo), where the most recent was held on June 18, 2014.

- 3) Claims on loans and multipurpose financing to employees and Members of the Board of Governors as of December 31, 2014 were IDR2,082,776 million.

6. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp528.549.571 juta dan Rp500.030.818 juta dengan rincian sebagai berikut:

6. Currency in Circulations

Currency in circulations is a valid payment instrument and it is not under the possession of Bank Indonesia, with position as of December 31, 2014 and December 31, 2013 were IDR528,549,571 million and IDR500,030,818 million respectively, with the following details:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Uang yang dicetak	718.065.760	619.423.252	Printed Money
Dikurangi:			Less:
Uang dalam Penguasaan Bank Indonesia	189.516.189	119.392.434	Currency in Vault
Jumlah Uang Dalam Peredaran	528.549.571	500.030.818	Total Currency in Circulations

Dalam upaya menjaga ketersediaan uang layak edar untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, Bank Indonesia senantiasa menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang cukup dan menarik uang yang tidak layak edar (*clean money policy*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), antara lain mengatur bahwa Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang. Selain itu juga mengatur tentang ciri umum uang Rupiah, yang mulai berlaku, dikeluarkan dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014. Memenuhi amanat tersebut, pada tanggal 17 Agustus 2014 Bank Indonesia telah menerbitkan dan mengedarkan uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014, dengan ciri umum sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.

As a part of efforts to provide adequate currency for circulation throughout Indonesia, Bank Indonesia constantly provides adequate currency for circulation in sufficient quantity and withdraws from circulation, currency unfit for circulation (clean money policy).

Act Number 7 of 2011 dated June 27, 2011 on Currencies (the Currency Act), among others, stipulates that Bank Indonesia shall coordinate with the Government in planning, printing, and culling money. Moreover, it also regulates the general features of the Rupiah currency to be introduced and issued. To carry out this mandate, Bank Indonesia has issued and circulated the 2014 series IDR100,000 Rupiah currency, with general characteristics that are stipulated within the Currency Act.

Selanjutnya, UU Mata Uang juga mengatur bahwa dalam kegiatan pemusnahan uang Rupiah, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah. Koordinasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman yang antara lain diatur tentang tata cara pemusnahan Rupiah, termasuk pembuatan berita acara pemusnahan Rupiah, serta penyampaian informasi setiap periode tiga bulan. Selain itu, juga diatur bahwa jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Terkait dengan kewajiban penyampaian laporan pemusnahan, selama tahun 2014 Bank Indonesia telah menyampaikan Laporan Jumlah dan Nilai Nominal Uang yang Dimusnahkan secara triwulanan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku wakil dari Pemerintah.

Untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014, Bank Indonesia telah melakukan pemusnahan uang Rupiah kertas sebanyak 5.195.336.947 bilyet senilai Rp111.575.225 juta. Pada periode tersebut, tidak terdapat pemusnahan uang logam.

7. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp880.072.254 juta dan Rp765.001.650 juta dengan rincian sebagai berikut:

Subsequently, the Currency Act also stipulates that in respect to Rupiah culling activities, Bank Indonesia shall coordinate with the Government. The coordination is based on the Memorandum of Understanding that, among others, regulates procedures for culling Rupiah, including making official announcements for the Rupiah's culling, as well as providing periodic information once every quarter. Moreover, it also stipulates that the amount and nominal value of the Rupiah culled shall be announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia. In regards to the required reporting of the currency culling activities, Bank Indonesia has on a quarterly basis throughout 2014, submitted the Report of Amount and Nominal Value of Currency Culled to the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its capacity as the Government's representative.

Throughout January 1 to December 31, 2014 period, Bank Indonesia had culled Rupiah currency amounting to 5,195,336.947 notes worth IDR111,575,225 million. There were no coins culled within that period.

7. Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation

Financial liabilities related to monetary policy implementation as of December 31, 2014 and December 31, 2013 were IDR880,072,254 million and IDR765,001,650 million respectively, with the following details:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Giro Bank	362.383.166	322.527.545	Banks Demand Deposits
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Rupiah	373.103.654	293.894.235	Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Rupiah	31.336.162	21.914.527	Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Valas	112.079.884	126.665.343	Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Valas	1.169.388	0	Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
Jumlah Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	880.072.254	765.001.650	Total Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation

a. Giro Bank

a. Banks Demand Deposits

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Giro Bank Umum			Conventional Bank Demand Deposits
Dalam Rupiah	276.811.984	244.309.422	In Rupiah
Dalam Valas	74.667.863	68.137.260	In Foreign Currency
Giro Bank Syariah			Sharia Bank Demand Deposits
Dalam Rupiah	10.672.449	9.345.816	In Rupiah
Dalam Valas	230.870	735.047	In Foreign Currency
Jumlah Giro Bank	362.383.166	322.527.545	Total banks demand deposits

b. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah

b. Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Sertifikat Bank Indonesia	86.481.953	88.747.450	Bank Indonesia Certificates
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	101.181.835	26.196.762	Bank Indonesia Certificates of Deposit
Penempatan Berjangka dalam Rupiah	0	0	Term Deposits in Rupiah
Penempatan Dana	98.819.533	111.099.310	Deposit Facilities
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat Berharga	85.901.353	67.850.713	Liabilities to Banks Arisen from Reverse Operations
Lainnya	718.980	0	Others
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Rupiah	373.103.654	293.894.235	Total Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

c. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah

c. Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	8.129.999	4.712.000	Bank Indonesia Sharia Certificates
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	21.977.500	16.267.400	Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Syariah Surat Berharga	1.228.663	935.127	Liabilities Arisen from Sharia-based Reverse Operations
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Rupiah	31.336.162	21.914.527	Total Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

d. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing

d. Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Penempatan Berjangka dalam Valuta Asing	75.200.737	56.788.961	Term Deposits in Foreign Currency
Pinjaman Luar Negeri	2.777.663	2.976.199	Foreign Borrowings
Lainnya	34.101.484	66.900.183	Others
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Valas	112.079.884	126.665.343	Total Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency

1) Pinjaman Luar Negeri merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri sebesar USD500,000,000.00 yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995.

Dalam kesepakatan *London Club III* telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002, yakni untuk menjadwalkan ulang pokok pinjaman sebesar USD300,000,000.00 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 s.d. 14 Desember 2019.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD182,160,000.00 atau setara dengan Rp2.266.070 juta dan JPY4,892,794,099.00 atau setara dengan Rp510.068 juta.

2) Dalam subpos lainnya per tanggal 31 Desember 2014 terdapat kewajiban *Cash Collateral* dalam rangka *Third Parties Securities Lending (TPSL)* sebesar EUR1,520,520,225.00 atau setara dengan Rp23.010.443 juta, AUD63,389,408.16 atau setara dengan Rp647.728 juta, dan USD819,459,671.69 atau setara dengan Rp10.194.078 juta.

1) *Foreign borrowings are syndicated loans from foreign creditors amounting to USD500,000,000.00 that were signed on June 14, 1995.*

Within the London Club III agreement, a second amendment dated September 6, 2002 was made to reschedule the loan's principal payment of USD300,000,000.00 for the period of December 14, 2008 to December 14, 2019.

The balance as of December 31, 2014 were USD182,160,000.00 or equivalent to IDR2,266,070 million and JPY4,892,794,099.00 or equivalent to IDR510,068 million.

2) *Presented in other sub-account as of December 31, 2014, Cash Collateral Liabilities in TPSL amounting to EUR1,520,520,225.00 or equivalent to IDR23,010,443 million, AUD63,389,408.16 or equivalent to IDR647,728 million, and USD819,459,671.69 or equivalent to IDR10,194,078 million.*

e. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.169.388 juta dan per 31 Desember 2013 Nihil.

8. Liabilitas Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional

Liabilitas kepada IMF karena alokasi Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2014 sebesar SDR1,980,438,720.00 atau setara dengan Rp35.683.248 juta dan per 31 Desember 2013 sebesar SDR1,980,438,720.00 atau setara dengan Rp37.174.934 juta.

9. Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah

Saldo Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp69.994.425 juta dan Rp60.646.665 juta, dengan rincian sebagai berikut:

e. Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency

Sharia-based securities issued and liabilities denominated in foreign currency as of December 31, 2014 and as of December 31, 2013 were IDR1,169,388 million and zero respectively.

8. Counterpart of Special Drawing Rights allocated by the IMF

Counterpart of Special Drawing Rights allocated by the IMF as of December 31, 2014 were SDR1,980,438,720.00 or equivalent to IDR35,683,248 million and as of December 31, 2013 were SDR1,980,438,720.00 or equivalent to IDR37,174,934 million.

9. Liabilities to the Government

The balance of Liabilities to the Government as of December 31, 2014 and December 31, 2013 were IDR69,994,425 million and IDR60,646,665 million respectively, with the following details:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Giro Pemerintah:			Government Demand Deposits:
Dalam Rupiah	52.678.548	39.111.125	In Rupiah
Dalam Valas	17.253.093	21.458.804	In Foreign Currency
Pinjaman dari Pemerintah	62.784	76.736	Borrowings from Government
Jumlah Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah	69.994.425	60.646.665	Total Liabilities to the Government

a. Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pemegang Kas Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Giro Pemerintah. Dari total Giro Pemerintah per 31 Desember 2014 sebesar Rp69.994.425 juta, terdapat Giro

a. In its capacity as a holder of the Government's Cash, Bank Indonesia manages Government Demand Deposits. From the total Government Demand Deposits as of December 31, 2014 which amounted to IDR69,994,425 million, the

Pemerintah yang memperoleh remunerasi dengan rincian sebagai berikut:

Government Demand Deposits that receive remuneration are as follows:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Giro Pemerintah dalam Rupiah	52.510.853	38.702.649	<i>Government Demand Deposits in Rupiah</i>
Giro Pemerintah dalam Valas	15.135.599	19.975.669	<i>Government Demand Deposits in Foreign Currency</i>
Jumlah Giro Pemerintah yang memperoleh Remunerasi	67.646.452	58.678.318	Total Government Demand Deposits Earning Remuneration

b. Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah adalah pinjaman Pemerintah dalam rangka program TSL yang berasal dari ASEAN Japan Development Fund for Indonesia dengan jangka waktu sampai dengan 20 April 2019. Pinjaman tersebut diteruskanpinjamkan oleh Bank Indonesia kepada bank pelaksana untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional.

Pinjaman Pemerintah dalam Rupiah per tanggal 31 Desember 2014 terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp61.867 juta, *consulting service* sebesar Rp545 juta dan bunga sebesar Rp372 juta.

b. Loans from the Government in Rupiah is the government loans of TSL program received from the ASEAN Japan Development Fund for Indonesia with a tenor up to April 20, 2019. These loans are subsequently loaned by Bank Indonesia to the executing banks for the Large Privately-owned National Plantations.

Loans from the Government as of December 31, 2014 consist of principal amounted to IDR61,867 million, consulting services and interest which respectively amounted to IDR545 million and IDR372 million.

10. Kewajiban Non Kebijakan

Saldo Kewajiban Non Kebijakan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp22.501.783 juta dan Rp6.454.545 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan kewajiban dalam rangka perpajakan sebesar Rp13.579.291 juta.

Kewajiban Non Kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

10. Other Liabilities

The balance of Other Liabilities as of December 31, 2014 and December 31, 2013 were IDR22,501,783 million and IDR6,454,545 million respectively. This increase was mainly due to an increase in tax liabilities amounting to IDR13,579,291 million.

The details for Other Liabilities are as follows:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Giro Lembaga Domestik dan Internasional	2.722.217	1.381.487	Demand Deposits from Domestic and International Institutions
Imbalan Kerja	3.791.270	3.148.427	Employee Benefits
Lainnya	15.988.296	1.924.631	Others
Jumlah Kewajiban Non Kebijakan	22.501.783	6.454.545	Total Other Liabilities

a. Giro Lembaga Domestik dan Internasional

Dalam Giro Lembaga Domestik dan Internasional terdapat rekening giro IMF sebesar Rp1.005.067 juta yang merupakan gabungan dari IMF Account Number 1 dan IMF Account Number 2.

IMF Account Number 1 digunakan untuk transaksi keuangan dengan IMF antara lain terkait dengan pembayaran kuota Indonesia dalam Rupiah, serta *purchases* dan *repurchases* fasilitas pinjaman IMF, sedangkan IMF Account Number 2 digunakan untuk transaksi administratif IMF di Indonesia.

Rekening giro IMF direvaluasi setiap tanggal 30 April berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF. Kurs yang ditetapkan oleh IMF untuk revaluasi per 30 April 2014 dan 30 April 2013 adalah masing-masing sebesar SDR0.0000559565 dan SDR0.0000681641. Penyesuaian kurs ini atas beban atau untuk untung Pemerintah dan Bank Indonesia. Revaluasi yang menjadi bagian Pemerintah tersebut, apabila diselesaikan dengan menerbitkan *promissory note*, akan menambah atau mengurangi nilai *promissory note* Pemerintah yang diadministrasikan dan disimpan oleh Bank Indonesia. Revaluasi rekening IMF per 30 April 2014 telah diselesaikan oleh

a. Demand Deposits from Domestic and International Institutions

Demand Deposits from Domestic and International Institutions comprise IMF Demand Deposits amounting to IDR1,005,067 million, a combination of IMF Account Number 1 and IMF Account Number 2.

IMF Account Number 1 is used for financial transactions with the IMF, among others, related to the payment of Indonesian quotas in Rupiah, as well as *purchases* and *repurchases* of the IMF loan facility, while *IMF Account Number 2* is used for IMF administrative transactions in Indonesia.

The IMF Demand Deposit is revalued every April 30 based on the rate set by the IMF. The exchange rates set by the IMF for revaluation as of April 30, 2014 and April 30, 2013 were SDR0.0000559565 and SDR0.0000681641 respectively. The foreign exchange rate adjustment is borne by the Government and Bank Indonesia's expense or surplus. Revaluation that goes to the Government, if settled through the issuance of a *promissory note*, will increase or reduce the value of the Government's *promissory note* that is administered and kept by Bank Indonesia. Revaluation of the IMF Account as of April 30, 2014 was settled by

Pemerintah dengan menerbitkan *promissory note* sebesar Rp6.189.220 juta pada tanggal 9 September 2014.

the Government through the issuance of promissory notes of IDR6,189,220 million on September 9, 2014.

Dalam pos Giro Lembaga Domestik dan Internasional, terdapat giro milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp1.309.918 juta.

Demand Deposits owned by the Financial Services Authority (OJK) in Demand Deposit from Domestic and International Institutions were IDR1,309,918 million.

b. Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja yang terdiri dari imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Program imbalan pascakerja terdiri dari program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Bank Indonesia. Selain itu terdapat Tunjangan Hari Tua (THT) yang terdiri dari Tunjangan Pemilikan Rumah (Tuperum) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) yang dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga melaksanakan program imbalan pascakerja antara lain berupa Uang Perpisahan Pegawai, serta program Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya antara lain berupa Bantuan Cuti Besar dan Penghargaan Masa Pengabdian.

b. Employee Benefits

Bank Indonesia provides an Employee Benefits Program that consists of Post-Employment Benefits and Other Long-Term Employment Benefits. The Post-Employment Benefit Program consists of Defined Benefit Pension Plans managed by Bank Indonesia's Pension Fund. In addition to this, there are Retirement Benefits (THT) that consist of Housing Benefits (Tuperum) and Old Age Health Benefits (TKHT) that are managed by Bank Indonesia Employee Welfare Foundation. Moreover, Bank Indonesia also provides Post-Employment Benefits that, among others, are in the form of Employment Farewell Package, as well as Other Long-Term Employment Benefits that include Extended Leave and Long Service Payments.

Perhitungan kewajiban imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya dilakukan oleh aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2014. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaris antara lain: tingkat diskonto 8,10% s.d. 8,97%.

Liabilities derived from Post-Employment Benefits and Other Long-Term Employment Benefits were calculated by an independent actuary as of December 31, 2014. The assumptions used in the actuarial calculations includes, among others: discount rate of 8.10% to 8.97%.

Kewajiban Imbalan Pascakerja per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp3.791.270 juta dan Rp3.148.427 juta.

Post-Employment Benefit Liabilities as of December 31, 2014 and December 31, 2013 were IDR3,791,270 million and IDR3,148,427 million respectively.

Mutasi aset, liabilitas, dan beban imbalan pascakerja pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Movements for post-employment benefit assets, liabilities, and expenses within the period of January 1 to December 31, 2014 are as follows:

Uraian	Manfaat Pensiun	Tunjangan Pemilikan Rumah	Tunjangan Kesehatan Hari Tua	Imbalan Pasca Kerja	Imbalan Kerja Jangka Panjang	Pajak untuk Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang	Jumlah	Description
	<i>Pension Benefits</i>	<i>Housing Allowance</i>	<i>Retirement Benefit Program</i>	<i>Post Employment Benefits</i>	<i>Long-Term Benefits</i>	<i>Tax on Post-Employment Benefits and Long Term Employment Benefits</i>	<i>Total</i>	
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2013	(539.613)	(79.094)	(729.896)	(372.680)	(1.259.620)	(167.524)	(3.148.427)	Assets (Liabilities) Balance as per December 31, 2013
Beban Imbalan Kerja	(337.410)	(90.157)	(191.793)	(70.284)	(497.608)	(173.633)	(1.360.885)	Employment Benefit Expenses
Pendanaan Bank Indonesia	283.360	71.806	87.316	-	-	-	442.482	Bank Indonesia's Contribution
Pembayaran Manfaat	-	-	-	39.007	190.759	45.794	275.560	Benefit Payment
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2014	(593.663)	(97.445)	(834.373)	(403.957)	(1.566.469)	(295.363)	(3.791.270)	Assets (Liabilities) Balance as per December 31, 2014

11. Selisih Revaluasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp158.268.155 juta dan Rp202.878.814 juta yang terdiri atas:

11. Revaluation Reserves

Unrealized gains or losses as of December 31, 2014 and December 31, 2013 were IDR158,268,155 million and IDR202,878,814 million respectively, with the following details:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Selisih Revaluasi Emas	34.185.338	33.592.504	Gold Revaluation
Selisih Revaluasi Valuta Asing:			Foreign Currency Revaluation:
Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing	62.999.120	165.957.301	Foreign Currency Definition Revaluation
Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing	37.710.660	-	Foreign Currency Transaction Revaluation
Selisih Revaluasi Instrumen Keuangan	9.209.518	(10.834.510)	Financial Instruments Revaluation
Hasil Revaluasi Aset Tetap	14.163.519	14.163.519	Results of the Revaluation of Fixed Assets
Jumlah Selisih Revaluasi	158.268.155	202.878.814	Total Revaluation Reserves

Per 31 Desember 2014, keuntungan dari transaksi yang telah mencapai tujuan akhir adalah sebesar Rp59.895.452 juta, yang terdiri dari keuntungan selisih kurs sebesar Rp51.971.100 juta dan keuntungan transaksi aset keuangan sebesar Rp7.924.352 juta.

As of December 31, 2014, gains from transactions that have achieved their final objective were IDR59,895,452 million, which consists of foreign exchange gains amounting IDR51,971,100 million and financial asset transactions gains amounting to IDR7,924,352 million.

12. Modal

Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013, sebagai berikut:

12. Capital

The amount of Capital and Monetary Liabilities used in calculating Capital Ratios as of December 31, 2014 and December 31, 2013 are as follows:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
a. Modal			a. Capital
- Modal	2.948.029	2.948.029	- Capital
- Revaluasi Aset Tetap	14.163.519	14.163.519	- Revaluation of Fixed Assets
- Cadangan Umum	57.397.040	22.924.506	- General Reserves
- 90% Surplus Tahun Berjalan (setelah pajak)	37.108.357	33.666.386	- 90% Current Year Surplus
Jumlah	111.616.945	73.702.440	Total
b. Kewajiban Moneter			b. Monetary Liabilities
- Uang dalam Peredaran	528.549.571	500.030.818	- Currency in Circulations
- Giro Pemerintah	69.931.641	60.261.909	- Government Demand Deposits
- Giro Bank	362.383.166	322.527.545	- Bank Demand Deposits
- Giro Penduduk Lainnya	1.397.294	451.374	- Other Demand Deposits
- Surat Berharga yang Diterbitkan	478.921.573	372.597.723	- Securities Issued
- Pinjaman dari Pemerintah	62.784	76.736	- Borrowings from the Government
Jumlah	1.441.246.029	1.255.946.105	Total
c. Rasio Modal	7.74%	5.87%	c. Capital Ratio

13. Akumulasi Surplus/Defisit

Saldo Akumulasi Surplus/Defisit per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp114.771.506 juta dan Rp73.539.998 juta dengan rincian sebagai berikut:

13. Accumulated Surplus/Deficit

The balance of Accumulated Surplus/Deficit as of December 31, 2014 and December 31, 2013 were IDR114,771,506 million and IDR73,539,998 million respectively, with the following details:

Uraian	31 Desember 2014 December 31, 2014	31 Desember 2013 December 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Cadangan Umum	57.397.040	22.924.506	General Reserves
Cadangan Tujuan	16.142.958	13.208.397	Statutory Reserves
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	41.231.508	37.407.095	Current Year Surplus (Deficit)
Jumlah Akumulasi Surplus/Defisit	114.771.506	73.539.998	Total Accumulated Surplus/Deficit

Penggunaan Cadangan Tujuan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp806.148 juta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembaruan/penggantian aset tetap sebesar Rp757.213 juta.
- b. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp48.935 juta.

Statutory Reserves utilized for the period of January 1 to December 31, 2014 were IDR806,148 million, with the following details:

- a. Renewal/replacement of fixed assets amounting to IDR757,213 million.
- b. Organizational and Human Resources Development amounting to IDR48,935 million.

14. Pajak Penghasilan

14. Income Tax

a. Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan

a. Income Tax Revenues (Expenses)

Uraian	1 Jan - 31 Des 2014	1 Jan - 31 Des 2013	Description
	Jan 1 - Dec 31, 2014	Jan 1 - Dec 31, 2013	
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Pajak Kini	(13.965.624)	(601.467)	Current Tax
Pajak Tangguhan:			Deferred Tax:
Pendapatan Pajak Tangguhan	98.123	0	Deferred Tax Income (Expenses)
Beban Pajak Tangguhan	0	(4.188.929)	Deferred Tax Expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan	(13.867.501)	(4.790.396)	Total Deferred Tax Income (Expenses)

b. Rekonsiliasi

Bank Indonesia melakukan rekonsiliasi antara Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan dan Pendapatan (Beban) pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, Bank Indonesia mencatat surplus fiskal sebesar Rp55.862.496 juta. Pajak penghasilan sampai dengan 31 Desember 2014 atas surplus fiskal tersebut adalah sebesar Rp13.965.624 juta, namun Bank Indonesia memiliki kredit pajak sebesar Rp2.074.688 juta, sehingga pajak penghasilan kurang bayar menjadi sebesar Rp11.890.936 juta.

b. Reconciliation

Bank Indonesia reconciles between Surplus (Deficit) before income tax and income tax revenues (expenses) in accordance with the prevailing tax regulations.

For the period ended December 31, 2014, Bank Indonesia registered a fiscal surplus of IDR55,862,496 million. Income tax as of December 31, 2014 on this fiscal surplus were IDR13,965,624 million. As Bank Indonesia holds a tax credit of IDR2,074,688 million, thereby the income tax is short by IDR11,890,936 million.

c. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2014, Bank Indonesia memiliki liabilitas pajak sebagai berikut:

c. Tax Liabilities

Bank Indonesia's tax liabilities as of December 31, 2014 consist of:

Uraian	1 Jan - 31 Des 2014 Jan 1 - Dec 31, 2014	1 Jan - 31 Des 2013 Jan 1 - Dec 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
PPh Pasal 29	11.890.936	601.467	Article 29
PPh Pasal 21	49.678	6.119	Article 21
PPh Pasal 22	0	0	Article 22
PPh Pasal 23	2.303	1.573	Article 23
PPh Pasal 25	169.499	0	Article 25
PPh Pasal 26	178	1.050	Article 26
PPh Pasal 4 ayat 2	32.680	29.163	Article 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2.249	3.550	Value Added Tax (VAT)
Jumlah Utang Pajak	12.147.523	642.922	Total Tax Liabilities

d. Pajak Dibayar Dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2014, Bank Indonesia memiliki pajak dibayar dimuka sebagai berikut:

d. Prepaid Taxes

Bank Indonesia's prepaid taxes as of December 31, 2014 are as follows:

Uraian	1 Jan - 31 Des 2014 Jan 1 - Dec 31, 2014	1 Jan - 31 Des 2013 Jan 1 - Dec 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
PPh Pasal 22	41.006	597	Article 22
PPh Pasal 23	289	0	Article 23
PPh Pasal 25	2.033.990	0	Article 25
PPN	8	0	VAT
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	2.075.293	597	Total Prepaid Taxes

15. Pendapatan Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Pendapatan Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013, terdiri atas:

15. Income from Monetary Policy Implementation

Income from Monetary Policy Implementation for the period from January 1 to December 31, 2014 and January 1 to December 31, 2013 consist of:

Uraian	1 Jan - 31 Des 2014 Jan 1 - Dec 31, 2014	1 Jan - 31 Des 2013 Jan 1 - Dec 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Pendapatan Bunga	28.831.434	25.241.045	Interest Income
Transaksi Aset Keuangan	7.924.352	9.407.287	Net Result of Financial Transactions
Selisih Kurs Transaksi Valas	51.971.100	33.568.134	Net Result of Foreign Currency Transactions
Lainnya	362.113	326.558	Others
Jumlah Pendapatan Pelaksanaan Kebijakan Moneter	89.088.999	68.543.024	Total Income from Monetary Policy Implementation

Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valas untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 sebesar Rp51.971.100 juta merupakan dampak penjabaran transaksi valas ke Rupiah dalam rangka pengelolaan devisa dan pelaksanaan kebijakan moneter. Meningkatnya pendapatan tersebut bukan merupakan tujuan Bank Indonesia namun merupakan dampak atau implikasi dari pelaksanaan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia.

The net result of foreign currency transactions for the period from January 1 to December 31, 2014 were IDR51,971,100 million, earned from the implementation of foreign currency transactions to Rupiah under foreign revenues management and monetary policy implementation. This increased revenue has never been Bank Indonesia's objective, but rather an impact of policy implementation adopted by Bank Indonesia.

16. Pendapatan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Pendapatan Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013, terdiri atas:

16. Income from Payment System Services

Income from Payment System Services for the period from January 1 to December 31, 2014 and January 1 to December 31, 2013 consist of:

Uraian	1 Jan - 31 Des 2014 Jan 1 - Dec 31, 2014	1 Jan - 31 Des 2013 Jan 1 - Dec 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Sistem Pembayaran Tunai	6.549	1.326.494	Cash Payment Systems
Sistem Pembayaran Non Tunai			Non-cash Payment Systems
Pendapatan Jasa Penyelenggaraan	250.068	244.962	Fees and Commissions from Payment System Services
Pendapatan Jasa Pengelolaan Rekening	98.572	119.288	Fees from Accounts Management Services
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Sistem Pembayaran	355.189	1.690.744	Total Income from Payment System Services

Pendapatan Pengelolaan Sistem Pembayaran Tunai periode 1 Januari s.d 31 Desember 2014 dan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp6.549 juta dan Rp1.326.494 juta. Pendapatan Sistem Pembayaran Tunai periode 1 Januari s.d 31 Desember 2014 tersebut antara lain bersumber dari pendapatan atas penjualan Uang Rupiah Khusus sebesar Rp1.868 juta.

Income from Cash Payment Systems for the period from January 1 to December 31, 2014 and the period from January 1 to December 31, 2013 were IDR6,549 million and IDR1,326,494 million respectively. This Income from Cash Payment Systems for the period from January 1 to December 31, 2014 came from, among others, revenues from Special Rupiah Sales amounting to IDR1,868 million.

17. Pendapatan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Pendapatan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013, masing-masing sebesar Rp119 juta dan Rp115.439 juta.

17. Income from Macroprudential Regulation and Supervision

Income from Macroprudential Regulation and Supervision for the period from January 1 to December 31, 2014 and January 1 to December 31, 2013 were IDR119 million and IDR115,439 million respectively.

18. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013, terdiri atas:

18. Income from Providing Fund

Income from Providing Fund for the period from January 1 to December 31, 2014 and January 1 to December 31, 2013 consist of:

Uraian	1 Jan - 31 Des 2014 Jan 1 - Dec 31, 2014	1 Jan - 31 Des 2013 Jan 1 - Dec 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Pendapatan bunga dari surat utang yang diterbitkan Pemerintah namun tidak dapat dipindahtangankan	234.882	241.016	Interest Income from non-tradable Government Securities
Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada bank sebelum tahun 1999	22.153	31.187	Interest Income from Credits to Banks Prior to 1999
Lainnya	3	0	Others
Jumlah Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan	257.038	272.203	Total Income from Providing Fund

19. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013, masing-masing sebesar Rp3.399.127 juta dan Rp492.019 juta. Peningkatan tersebut terutama karena adanya pemulihan atas aset keuangan yang telah dibentuk pada tahun sebelumnya sebesar Rp3.288.514 juta karena adanya perubahan ketentuan mengenai penilaian nilai wajar aset.

20. Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013, terdiri atas:

19. Other Income

Other income for the period from January 1 to December 31, 2014 and January 1 to December 31, 2013 were IDR3,399,127 million and IDR492,019 million respectively. This increase was primarily due to financial asset recovery achieved in the previous year amounting to IDR3,288,514 million as a result of regulatory following changes in valuating asset's fair value.

20. Monetary Policy Implementation Expenses

Monetary Policy Implementation Expenses for the period from January 1 to December 31, 2014 and January 1 to December 31, 2013 consist of:

Uraian	1 Jan - 31 Des 2014 Jan 1 - Dec 31, 2014	1 Jan - 31 Des 2013 Jan 1 - Dec 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Beban Bunga:	21.691.645	17.099.846	Interest Expenses:
Sertifikat Bank Indonesia	6.277.424	4.198.496	Bank Indonesia Certificates
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	2.273.254	428.487	Bank Indonesia Certificates of Deposit
Penempatan Berjangka Dalam Rupiah dan Valuta Asing	56.731	3.386.571	Term Deposits Denominated in Rupiah and Foreign Currency
Penempatan Dana	5.940.237	3.442.303	Deposit Facilities
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat Berharga	5.554.325	4.201.850	Liabilities to Banks Arisen from Reverse Operations
Pinjaman Luar Negeri	33.672	38.786	Foreign Borrowings
Jasa Giro Bank Rupiah	1.556.002	1.403.353	Rupiah Denominated Bank Current Account Service
Beban Imbalan:	1.054.449	688.825	Transaction Expenses:
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	309.543	187.182	Sharia-based Securities Repo Liabilities
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	688.828	480.497	Bank Indonesia Deposit Facility Sharia
Liabilitas Repo SSB Berbasis Syariah	56.078	21.146	Sharia-based Securities Repo Liabilities
Lainnya	460.740	416.710	Other expenses
Jumlah Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter	23.206.834	18.205.381	Total Monetary Policy Implementation Expenses

21. Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013, terdiri atas:

21. Payment System Services Expenses

Payment System Services Expenses for the period from January 1 to December 31, 2014 and January 1 to December 31, 2013 consist of:

Uraian	1 Jan - 31 Des 2014 Jan 1 - Dec 31, 2014	1 Jan - 31 Des 2013 Jan 1 - Dec 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
Sistem Pembayaran Tunai:	2.836.848	2.671.165	Cash Payment Systems:
Perencanaan, Pengadaan dan Pencetakan Uang	2.747.648	2.545.229	Currency Planning, Procurement, and Printing
Distribusi Uang, Layanan Kas dan Penanggulangan Uang Palsu	89.200	125.936	Currency Distribution, Cash services and Destruction of Counterfeit Currency
Sistem Pembayaran Non Tunai	89.129	38.192	Non-cash Payment Systems
Jumlah Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran	2.925.977	2.709.357	Total Payment System Services Management Expenses

22. Beban Pengaturan dan Pengawasan

Makroprudensial

Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013, masing-masing sebesar Rp77.856 juta dan Rp169.624 juta.

22. Macroprudential Regulation and Supervision Expenses

Macroprudential Regulation and Supervision Expenses for the period from January 1 to December 31, 2014 and January 1 to December 31, 2013 were IDR77,856 million and IDR169,624 million respectively.

23. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Beban remunerasi atas rekening giro milik Kementerian Keuangan untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp3.513.071 juta dan Rp2.610.495 juta.

23. Remuneration on Government General Deposits Expenses

Remuneration on Government General Deposits Expenses for the Ministry of Finance for the period from January 1 to December 31, 2014 and January 1 to December 31, 2013 were IDR3,513,071 million and IDR2,610,495 million respectively.

24. Beban Umum dan Lainnya

Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2013, terdiri atas:

24. General and Administrative Expenses

General and Administrative Expenses for the period from January 1 to December 31, 2014 and January 1 to December 31, 2013 consist of:

Uraian	1 Jan - 31 Des 2014 Jan 1 - Dec 31, 2014	1 Jan - 31 Des 2013 Jan 1 - Dec 31, 2013	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
SDM, Organisasi dan Logistik	6.611.308	5.175.481	Human Resource (Salaries), Organization, and Logistics
Lainnya	1.666.417	45.599	Other Expenses
Jumlah Beban Umum dan Lainnya	8.277.725	5.221.080	Total Expenses

Di dalam beban SDM tersebut, termasuk juga THT berupa Tuperum dan TKHT serta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Human Resource expenses include Retirement Benefits in Tuperum and TKHT as well as Employee Social Security Program as required by Act Number 24 of 2011 on the Social Security Agency (BPJS) comprising Employee Accident Insurance, Life Insurance, and Retirement Insurance.

F. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Bank Indonesia melakukan transaksi dengan pihak berelasi terkait dengan Pemerintah, pengelolaan imbalan pascakerja, dana pensiun, dan kepegawaian sebagai berikut:

F. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Bank Indonesia conducts transactions with related parties, including the Government, management of post-employment benefit, pension fund, and personnels, with the following details:

Pihak Berelasi Related Party	Sifat Hubungan Nature of Relations	Sifat dari Transaksi Nature of Transactions
Pemerintah <i>The Government</i>	a. Pemilik Dana <i>Depositor</i>	a. Pengelolaan rekening Giro Pemerintah <i>Government General Deposit management</i>
	b. Debitur <i>Debtor</i>	b. Penyelesaian SUP <i>SUP settlement</i>
		c. Penyelesaian Tagihan sehubungan dengan Keanggotaan pada Lembaga Keuangan Internasional <i>Claims due to membership in International Monetary Institutions</i>

Pihak Berelasi <i>Related Party</i>	Sifat Hubungan <i>Nature of Relations</i>	Sifat dari Transaksi <i>Nature of Transactions</i>
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia's Employee Welfare Foundation</i>	Pengelola program Tunjangan Hari Tua (THT) <i>Post-employment Benefit Program management (THT)</i>	Kontribusi Tunjangan Hari Tua (THT) <i>Contribution to Post-employment Benefit Program (THT)</i>
Dana Pensiun Bank Indonesia <i>Bank Indonesia's Pension Fund</i>	Dana pensiun pemberi kerja <i>Employer's Pension Fund</i>	Kontribusi dana pensiun <i>Contribution to Pension Fund</i>
Personil manajemen kunci <i>Key Management</i>	Dewan Gubernur <i>Board of Governors</i>	Fasilitas pinjaman <i>Loan Facility</i>
Pegawai <i>Employees</i>	Pegawai <i>Employees</i>	Fasilitas pinjaman <i>Loan Facility</i>

G. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Per tanggal 31 Desember 2014, Bank Indonesia memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

1. Rencana Kenaikan Kuota IMF

Pada saat dilakukan IMF 14th *General Review of Quotas* pada tahun 2010, negara-negara anggota IMF menyepakati untuk meningkatkan kuota IMF sebesar 100%. Adanya kenaikan kuota tersebut menyebabkan kuota Indonesia, sebagai salah satu anggota IMF, akan meningkat sebesar SDR2,569 juta menjadi SDR4,648 juta dan *quota share* Indonesia akan meningkat menjadi 0,974%.

Peningkatan kuota hasil IMF 14th *General Review of Quotas* akan berlaku efektif apabila:

- Negara-negara anggota yang memiliki setidaknya 70% pangsa kuota telah menyampaikan persetujuan (*consent*) kenaikan kuota kepada IMF.
- Negara anggota yang mewakili setidaknya 85% hak suara telah meratifikasi perubahan (*amendment*) *Article of Agreement* IMF tentang *Board Reform*. Negara anggota diminta segera menyampaikan persetujuan kenaikan kuota dan meratifikasi perubahan *Article of Agreement* IMF tentang *Board Reform*.

G. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As of December 31, 2014, Bank Indonesia's commitments and contingencies consisted of:

1. Letter of Consent to IMF

At the IMF 14th *General Review of Quotas* in 2010, IMF member countries agreed to increase the IMF quota by 100%. This increase had increase the quota for Indonesia, as an IMF member, by SDR2,569 million to SDR4,648 million and Indonesia's quota share to increase to 0.974%. The quota increase from the IMF 14th *General Review of Quotas* takes effect when:

- Member countries with at least 70% quota share submit consent to the IMF to increase the quota.
- Member countries that represent at least 85% of voting rights have ratified the amendment to the IMF *Article of Agreement* regarding *Board Reform*. Member countries are requested to submit their approval to increase the quota and to ratify amendments to IMF's *Article of Agreement* regarding *Board Reform*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan mengirimkan Surat kepada Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor Surat S-871/MK.011/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Persetujuan Pemerintah atas kenaikan kuota IMF dalam rangka 14th *General Review of Quotas* yang berisi antara lain atas nama Pemerintah RI, Menteri Keuangan menyetujui kenaikan Kuota IMF dan mengingat Gubernur Bank Indonesia adalah *Governor* di IMF untuk Indonesia dapat mengirimkan *letter of consent* kepada IMF. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, pada tanggal 12 April 2012 Gubernur Bank Indonesia mengirimkan *letter of consent* kepada IMF yang merupakan salah satu syarat penambahan kuota Indonesia di IMF.

Per 31 Desember 2014, kenaikan kuota belum berlaku efektif karena menunggu ratifikasi amandemen *Articles of Agreement* oleh Amerika Serikat untuk memenuhi jumlah *voting power* yang dipersyaratkan sebesar minimal 85%, sedangkan per 31 Desember 2014 baru mencapai 77,07%.

2. Penyelesaian Aset Eks BPPN

Penyelesaian aset-aset agunan eks. tagihan pada BBO/BBKU yang telah dialihkan oleh BPPN kepada Pemerintah saat ini dalam proses pembahasan antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Dalam hal telah diperoleh kesepakatan, maka Bank Indonesia akan memperoleh penerimaan dari sebagian hasil penjualan aset-aset tersebut.

3. Pinjaman Dua Tahap (*Two Step Loans*)

Pinjaman Dua Tahap merupakan pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, JICA, dan ADB kepada Pemerintah RI untuk diteruskan kepada bank melalui Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah sebagai pemegang kas Pemerintah, untuk

In regards to this matter, the Minister of Finance sent a Letter to the Governor of Bank Indonesia through Letter Number S-871/MK.011/2011 dated December 28, 2011 on Government's Approval on the IMF quota increase within the framework of the 14th General Review of Quotas including, among others, the approval of the Minister of Finance on behalf of the Government of Indonesia on the IMF quota increase, and since the Governor of Bank Indonesia's capacity is a Governor at the IMF for Indonesia, the Governor of Bank Indonesia can send a letter of consent to the IMF. Following this letter, the Governor of Bank Indonesia submitted the letter of consent to the IMF as one of the requirements for Indonesia's quota increase in the IMF.

As of December 31, 2014, the quota increase has not yet taken effect due to the amendment ratification process of the Articles of Agreement by the United States to meet the minimum 85% voting power requirement. As of December 31, 2014, the voting power stood at only 77.07%.

2. *Ex-Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA) Assets Resolution*

Resolution of collateral assets which were claims of Frozen Operations/Frozen Business Activities Banks (BBO/BBKU) that were turned over to the Government by IBRA are currently being discussed by the Ministry of Finance and Bank Indonesia. In the event an agreement is reached, Bank Indonesia will eventually receive proceeds from some of the disposal of these assets.

3. *Two Step Loans*

Two Step Loans (TSL) are loans from foreign financial institutions including the World Bank, Japan Bank for International Cooperation (JICA), and the Asian Development Bank (ADB) to the Government of Indonesia to be channeled to the banks through Bank Indonesia. Bank Indonesia's role in these

memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skim-skim ini, sehingga tidak akan menanggung risiko kredit.

Peminjam (*borrower*) dalam penerusan TSL adalah Pemerintah RI, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan yang bertindak sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruskanpinjamkan kepada Bank Bukopin.

Pinjaman TSL diteruskan kepada bank dalam valuta Rupiah dan USD dengan posisi saldo pinjaman per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dalam valuta asing tidak berubah, yaitu sebesar USD7,616,540.14 atau setara dengan Rp652.858 juta dan Rp651.002 juta.

Di samping itu, terdapat tagihan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/Pemda dengan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia atas dasar surat kuasa dari Menteri Keuangan. Tagihan tersebut dalam rangka *Project Aid* yang sumber dananya berasal dari *Foreign Exchange Loan* dan Rekening Dana Investasi dengan *outstanding* per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing setara dengan Rp313.202 juta dan Rp309.835 juta.

credit schemes is as the Government's account holder to distribute the loans and collect payments from the national banks. These national banks subsequently take over the credit risk and channel these credits to the qualified borrowers.

The Minister of Finance's Letter Number S-2147/LK/2000 dated May 16, 2000 stated that Bank Indonesia only acts as executing agent of these schemes and therefore bears no credit risk.

The borrower in a TSL is the Government of the Republic of Indonesia, except for the facility derived from EXIM Taiwan, where Bank Indonesia serves as the borrower that is subsequently channeled to Bank Bukopin.

TSL loans are channeled to recipient banks denominated in Rupiah and USD currencies with loan balances in foreign currency, that as of December 31, 2014 and December 31, 2013 remained unchanged, amounting to USD7,616,540.14 or equivalent to IDR652,858 million and IDR651,002 million.

Moreover, there are Government claims to State-Owned Enterprises (BUMN)/Local Government-Owned Enterprises (BUMD)/Regional Governments (Pemda) with the Subsidiary Loan Agreement (SLA) that were signed by Bank Indonesia as authorized by the Minister of Finance. These claims are within the framework of the Aid Project funded by Foreign Exchange Loans and Investment Fund Accounts with outstanding balance as of December 31, 2014 and December 31, 2013 amounting to the equivalent of IDR313,202 million and IDR309,835 million respectively.

Saldo pinjaman masing-masing skim tersebut di atas merupakan sisa saldo penerusan pinjaman sebelum berlakunya Undang-Undang Bank Indonesia dan penatausahaannya tidak dicatat dalam Laporan Posisi Keuangan Bank Indonesia namun dicatat pada rekening *off balance sheet* Bank Indonesia.

The loan balances for the respective schemes above represent balances that were channeled prior to the enactment of the Bank Indonesia Act and their administration were not recorded in Bank Indonesia's Statement of Financial Position but are recorded as Bank Indonesia's off balance sheet account.

4. N.V. De Indonesische Overseeze Bank (Indover Bank)

Sejak tanggal 6 Oktober 2008, Indover Bank dikenakan tindakan darurat (*emergency measures*) karena adanya kesulitan likuiditas yang dialaminya. Pada tanggal 1 Desember 2008, Indover Bank telah dinyatakan pailit/bangkrut oleh Pengadilan Amsterdam dan berstatus dilikuidasi dalam wilayah kedaulatan Belanda. Alasan dilikuidasinya Indover Bank adalah ekuitas yang telah negatif dan tidak ada tambahan modal yang dapat diharapkan untuk menutup ekuitas negatif tersebut, baik melalui tambahan modal dari Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank maupun dari investor lainnya.

4. N.V. De Indonesische Overseeze Bank (Indover Bank)

Emergency measures were applied on Indover Bank since Oktober 6, 2008 due to a shortage of liquidity. On December 1, 2008, Indover Bank was declared bankrupt by the Amsterdam Court and was under liquidation in the Netherlands. Indover Bank's liquidation resulted from its negative equity and lack of additional capital that could be used to cover the negative liquidity, either through additional capital injection by Bank Indonesia, as the sole shareholder of Indover Bank, or from other investors.

Dengan telah dipailitkannya Indover Bank oleh Pengadilan Belanda, maka Indover Bank berada di bawah pengelolaan dan pengawasan kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Amsterdam Belanda.

Following Indover Bank's bankruptcy by the Dutch court, Indover Bank was placed under the control and supervision of trustees duly appointed by the Amsterdam Court in the Netherlands.

Pada bulan Maret 2010, Bank Indonesia sebagai kreditur telah mengajukan *statement of claim* atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut, pada bulan April 2010 kurator menyampaikan *statement of counterclaim* di Pengadilan Belanda yang mendalilkan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-*set off* tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia tetap berpendirian bahwa sesuai

In March 2010, Bank Indonesia, in its capacity as creditors, submitted a statement of claim to its time deposits and demand deposits in Indover Bank to the Amsterdam Court. Based on this claim, the trustees submitted a statement of counterclaim with Dutch courts on April 2010, which argued that as the sole shareholder of Indover Bank, Bank Indonesia must bear the deficit in Indover Bank and set-off Bank Indonesia's claims within Indover Bank. In this respect, Bank Indonesia is of the opinion that based on the Company Law, Bank Indonesia's responsibility as the sole shareholder of Indover

hukum perusahaan, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank.

Dalam perkembangannya, sebagaimana yang disampaikan Stibbe dalam *Nineteenth Public Liquidation Report* tanggal 4 November 2014 untuk periode pelaporan tanggal 1 Juli 2014 s.d. 30 September 2014, pada tanggal 27 Agustus 2014, Pengadilan Amsterdam mengeluarkan keputusan yang memenangkan Bank Indonesia atas perkara tersebut. Atas putusan Pengadilan Amsterdam dimaksud, pada bulan November 2014, kurator menyatakan banding. Bank Indonesia saat ini masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan proses hukum selanjutnya.

5. Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Bank Indonesia menangani 2 (dua) perkara perdata yang berada di luar negeri terkait penyelesaian kewajiban Indover Bank Amsterdam di Pengadilan Distrik Amsterdam. Selain itu, Bank Indonesia juga menangani 208 (dua ratus delapan) perkara di dalam negeri yang terdiri atas perkara perdata sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) perkara, perkara Tata Usaha Negara sebanyak 17 (tujuh belas) perkara dan 2 (dua) perkara lainnya. Dari perkara-perkara tersebut, sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara telah diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

6. Aset Bank Indonesia Dalam Proses Penyelesaian

Aset Bank Indonesia yang Diperoleh Dari Putusan Pengadilan

Bank is limited to Bank Indonesia's equity in Indover Bank.

In its latest development, as reported by Stibbe in the Nineteenth Public Liquidation Report dated November 4, 2014 for the reporting period from July 1, 2014 to September 30, 2014, the Amsterdam Court issued its verdict on August 27, 2014 in favor for Bank Indonesia on this case. As a result of this verdict passed by the Amsterdam Court, the trustee submitted an appeal on November 2014. Bank Indonesia is currently continuing to coordinate with related parties in preparation for the next legal process.

5. Legal Matters

*As of December 31, 2014, Bank Indonesia was dealing with 2 (two) overseas legal cases pertaining to the Indover Bank bankruptcy settlement in Amsterdam at the Amsterdam District Court. In addition to this, Bank Indonesia also handled 208 (two hundred and eight) domestic cases comprising 189 (one hundred eighty nine) civil cases, 17 (seventeen) administrative legal cases, and 2 (two) other legal cases. Of these legal cases, 21 (twenty one) cases have been decided by the court with permanent and legally binding effect (*inkracht van gewijsde*).*

6. Safeguarding Bank Indonesia's Assets

Bank Indonesia's assets obtained through Judicial Decision

a. Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti

Terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat, telah ada Putusan MARI Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 antara lain menetapkan eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.000 juta. Dari jumlah uang pengganti sebesar Rp85.000 juta tersebut, telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebesar Rp6.647 juta dan disetorkan kepada kas negara.

Berdasarkan rapat di Kementerian Keuangan pada tanggal 16 Januari 2012 yang dihadiri Kementerian Keuangan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Bank Indonesia serta surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-910/PB/2012 tanggal 27 Januari 2012, diinformasikan bahwa uang pengganti yang telah disetorkan ke Kas Negara tersebut dapat dikembalikan kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia telah beberapa kali menyampaikan surat permohonan pengembalian uang pengganti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Selain itu, pada tanggal 11 Maret dan 16 Desember 2014 Bank Indonesia juga telah menyampaikan surat kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk meminta informasi mengenai tindak lanjut/perkembangan atas pelaksanaan eksekusi uang pengganti untuk Negara c.q. Bank Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah mengirimkan surat kepada Kejaksaan Tinggi untuk menindaklanjuti permohonan Bank Indonesia dimaksud kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

b. Rampasan Barang Bukti Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Sesuai keputusan MARI Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 tersebut di atas, ditetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan/atau

a. Execution of Compensation Payments

On the corruption case involving the convicted defendant, Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat, the Supreme Court of the Republic of Indonesia had made a Decision Number 1662K/Pid/1991 dated March 21, 1992 that, among others, determined the execution of compensation payments amounting to IDR85,000 million. The West Jakarta District State Prosecutor had executed IDR6,647 million out of the total compensation payment and deposited it to the State Treasury.

Based on the meeting held at the Ministry of Finance on January 16, 2012 that was attended by the Ministry of Finance, the West Jakarta State Prosecutor's Office, and Bank Indonesia, as well as through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Letter Number S-910/PB/2012 dated January 27, 2012, it was stated that the compensation funds deposited in the State Treasury can be surrendered to Bank Indonesia.

Bank Indonesia has, on several occasions, submitted letters of request to the West Jakarta State Prosecutor's Office for the fund's handover. In addition to this, Bank Indonesia had also submitted letters to the State Prosecutor of the Republic of Indonesia on March 11 and December 16, 2014, requesting informations pertaining to the follow up/progress of the execution of the compensation funds for the State c.q. Bank Indonesia. The State Prosecutor of the Republic of Indonesia has sent a letter to the High Prosecutor to follow up Bank Indonesia's request to the State Treasury Services Office.

b. Confiscation of Evidence in Land and/or Buildings

In accordance with the Supreme Court's Decision Number 1662K/Pid/1991 dated March 21, 1992 determined that evidence in land and/or buildings

bangunan dirampas untuk Negara c.q. Bank Indonesia yang apabila dijumlahkan mencapai ±1.193 Ha. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1993, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) telah menyerahkan sebagian barang bukti rampasan kepada Negara c.q. Bank Indonesia yang berupa dokumen-dokumen untuk bidang tanah seluas ±1.001 Ha. Pada saat ini, aset rampasan tersebut masih dalam proses penyelesaian, bekerja sama dengan Yayasan Tridaya.

shall be confiscated for the State c.q. Bank Indonesia wherein if it extends to approximately ±1,193 Ha. Furthermore, on March 30, 1993, the West Jakarta District State Prosecutor had handed over some of the seized evidence to the State c.q. Bank Indonesia in the form of land documents for approximately ±1,001 Ha. At present, these seized assets continue to be in the resolution process in cooperation with the Tridaya Foundation.

7. Tagihan Kepada PT Bank IFI

Bank Indonesia mempunyai tagihan atas dana kelolaan PT Bank IFI untuk PT Ustraindo sebesar Rp50.817 juta yang terdiri dari pokok sebesar Rp38.850 juta dan bunga sebesar Rp11.967 juta. PT Bank IFI telah dicabut izin usahanya sejak tanggal 17 April 2009.

7. Claims on PT Bank IFI

Bank Indonesia has claims on funds managed by PT Bank IFI for PT Ustraindo amounting to IDR50,817 million consisting of the principal amounting to IDR38,850 million and the interest amounting to IDR11,967 million. PT Bank IFI's license had been revoked since April 17, 2009.

Bank Indonesia dengan surat Nomor16/107/DPA tanggal 3 November 2014 meminta PT Ustraindo untuk segera merealisasikan kewajibannya namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum memperoleh tanggapan sehingga masih dalam proses penyelesaian.

Bank Indonesia, through its Letter Number 16/107/DPA dated November 3, 2014, requested PT Ustraindo to immediately settle its obligations. However, until December 31, 2014, Bank Indonesia had not received any response, therefore the settlement process is pending.

8. Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debit (FSD) eks. Bank Take Over PT Bank Danamon Indonesia

Pada tahun 1998/1999 Bank Indonesia telah memberikan BLBI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia sebesar Rp144.536.094 juta.

8. FSD Interest Claims

In 1998/1999, Bank Indonesia provided BI Liquidity Assistance (BLBI) to banks encountered by liquidity problems following the Indonesian monetary crisis in 1998, amounting to IDR144,536,094 million.

Sebagai tindak lanjut Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan pengalihan BLBI posisi tanggal 29 Januari 1999 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp144.536.094 juta dengan Akta Penyerahan dan

As a follow up to the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated February 6, 1999, the BLBI position as of January 29, 1999 was handed over from Bank Indonesia to the Government c.q. Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) amounting to IDR144,536,094 million based on Deed of Surrender

Pengalihan Hak (Akta Cessie) tanggal 22 Februari 1999, dan di sisi lain Pemerintah menerbitkan Surat Utang SU-001/MK/1998 sebesar Rp80.000.000 juta dan SU-003/MK/1999 sebesar Rp64.536.094 juta.

Dari total BLBI yang telah dialihkan kepada Pemerintah c.q. BPPN sebesar Rp144.536.094 juta, termasuk di dalamnya FSD sebesar Rp54.460.896 juta. Dalam jumlah FSD tersebut terdapat FSD eks. Bank Take Over (BTO) PT Bank Danamon Indonesia (PT BDI) yang terdiri dari PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., dan PT Bank Tiara Asia Tbk., sebesar Rp20.129.741 juta. Terhadap FSD sebesar Rp20.129.741 juta tersebut terdapat beban bunga FSD sebesar Rp5.322.248 juta dengan rincian sebagai berikut:

and Transfer of Title (Cessie Deed) dated February 22, 1999, and for its part, the Government issued Treasury Bond SU-001/MK/1998 amounting to IDR80,000,000 million and SU-003/MK/1999 amounting to IDR64,536,094 million.

The total amount of BLBI handed over to the Government c.q. IBRA of IDR144,536,094 million included IDR54,460,896 million in FSD. This FSD amount included ex Bank Take Over (BTO) of PT Bank Danamon Indonesia (PT BDI) that comprised PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., and PT Bank Tiara Asia Tbk., which amounted to IDR20,129,741 million. Included to this FSD of IDR20,129,741 million was FSD's accrued interest of IDR5,322,248 million, with the following details:

Uraian	Pokok FSD FSD Principal	Bunga FSD FSD Interest	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
PT Bank Danamon Tbk.	16.691.825	4.379.861	PT Bank Danamon Tbk.
PT Bank PDFCI Tbk.	1.995.000	534.959	PT Bank PDFCI Tbk.
PT Bank Tiara Asia Tbk.	1.442.916	407.428	PT Bank Tiara Asia Tbk.
Jumlah	20.129.741	5.322.248	Total

Berdasarkan Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, tagihan bunga sebesar Rp5.322.248 juta tidak ikut dialihkan kepada Pemerintah. Namun Menteri Keuangan (Menkeu) dengan surat Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalam rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Bank menyatakan bahwa bunga FSD termasuk dalam angka sementara rincian kewajiban bank yang dapat

Based on the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated February 6, 1999, the claims on interest amounting to IDR5,322,248 million were not transferred to the Government. However, the Minister of Finance through Letter Number SR-176/MK.01/1999 dated May 31, 1999 on General Letter of Authorization in regards to Government Guarantee Payment to Bank Liabilities stated that the FSD Interest was included in the interim bank liabilities that could be financed

dibiayai penjaminan Pemerintah dengan catatan pelaksanaan pembayaran masih akan dibicarakan kembali.

Dalam rangka penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, Bank Indonesia telah melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut:

- a. Menyampaikan surat tagihan kepada eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor 1/124/UK, Nomor 1/122/UK dan Nomor 1/123/UK tanggal 6 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet. Eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor B.0741-DIR tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet, Nomor BI-015/FA25/0799 tanggal 13 Juli 1999 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet/BLBI sebesar Rp527.519 juta dan Nomor 238/BTA-CS/VII/99 tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet menyatakan bahwa bunga FSD telah diperhitungkan dalam rekapitalisasi yang dilakukan oleh BPPN dan meminta agar Bank Indonesia tidak melakukan pendebitan giro eks. BTO PT BDI di Bank Indonesia untuk pembayaran bunga FSD serta meminta Bank Indonesia melakukan konfirmasi dengan BPPN.
- b. Menyampaikan surat kepada BPPN mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 6/63/BKt tanggal 10 Maret 2004 perihal Kewajiban Bunga Fasilitas Saldo Debet PT Bank Danamon Indonesia.
- c. Memasukkan permasalahan bunga FSD dalam agenda yang dibahas antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Kerja yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dengan GBI Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Beberapa

by the Government guarantees, provided that payment's implementation will be subject to further discussions.

In resolving the FSD interest claims derived from the ex. BTO PT BDI, Bank Indonesia has done some settlement efforts such as the following:

- a. Submitted claims letter to the ex. BTO PT BDI respectively through letter Number 1/124/UK, Number 1/122/UK and Number 1/123/UK dated July 6, 1999 on FSD Interest Claims of Ex. BTO PT BDI respectively through Letter Number B.0741-DIR dated July 12, 1999 on FSD Interest Liabilities, Number BI-015/FA25/0799 dated July 13, 1999 on FSD/BLBI Claims amounting to IDR527,519 million and Number 238/BTA-CS/VII/99 dated July 12, 1999 on FSD Interest Liabilities, stating that the FSD Interest was incorporated into the recapitalization amount carried out by IBRA and requested Bank Indonesia to pay the FSD Interest and to confirm with IBRA.
- b. Submitted a letter to IBRA pertaining to the resolution of FSD claims ex BTO PT BDI, through Letter Number 6/63/BKt dated March 10, 2004 pertaining to FSD Interest Liabilities of PT Bank Danamon Indonesia.
- c. Included matters pertaining to the FSD Interest in the agenda of discussions between the Government and Bank Indonesia through the Committee that was formed by the Joint Decision of the Minister of Finance with GBI Number 7/23/KEP.GBI/2005 dated April 29, 2005 regarding the Establishment of a Coordinating

Permasalahan di Bidang Keuangan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Namun sampai dengan SKB dimaksud berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, belum diperoleh penyelesaian atas permasalahan bunga FSD tersebut.

- d. Meminta data/dokumen rekapitalisasi eks. BTO oleh BPPN kepada PT BDI melalui surat Nomor 12/166/DKBU tanggal 23 Februari 2010 dan Nomor 12/248/DKBU tanggal 5 April 2010 masing-masing perihal Permasalahan Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., dan PT Bank PDFCI Tbk.
- e. Menyampaikan surat kepada Menkeu mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 14/1/GBI/DKBU tanggal 26 Maret 2012 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada PT Bank Danamon, PT Bank PDFCI, dan PT Bank Tiara Asia.

Bank Indonesia tetap melanjutkan tugas pengelolaan tagihan bunga FSD eks. BTO termasuk upaya penagihan, dengan mempertimbangkan bahwa tagihan tersebut merupakan aset yang masih memerlukan tindak lanjut yang komprehensif.

9. Kerjasama Ekonomi Keuangan Regional

Bank Indonesia menjalin kerjasama keuangan regional yaitu ASEAN *Swap Arrangement* (ASA) dengan negara-negara ASEAN, *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) dengan negara ASEAN beserta Cina, Korea, dan Jepang (ASEAN + 3) dan *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) antara Bank Indonesia dengan Bank of Japan (BoJ) sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang.

Team on Settlement of Financial Issues between Bank Indonesia and the Ministry of Finance. However, there was no resolution to this FSD interest matter as of the Joint Decision's expiry date on December 31, 2005.

- d. Requested datas/documents pertaining to the recapitalization of ex BTO by IBRA to PT BDI through Letter Number 12/166/DKBU dated February 23, 2010 and Number 12/248/DKBU dated April 5, 2010 pertaining to Bank Indonesia's FSD Interest Claims to PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., and PT Bank PDFCI Tbk.*
- e. Submitted letters to the Minister of Finance pertaining to the Settlement of FSD Interest Claims for Ex BTO PT BDI, with the most currently one through Letter Number 14/1/GBI/DKBU dated March 26, 2012 regarding Bank Indonesia's FSD Interest Claims to PT Bank Danamon, PT Bank Tiara Asia, and PT Bank PDFCI.*

Bank Indonesia continues to manage the FSD interest claims, including endeavoring to ensure their recovery, by considering that these claims constitute assets that require comprehensive resolution.

9. Regional Financial Economic Cooperation

Bank Indonesia maintains regional financial cooperation in the form of the ASEAN Swap Arrangement (ASA) with the ASEAN member countries, the Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) with the ASEAN member countries along with China, Korea, and Japan (ASEAN + 3), and the Bilateral Swap Arrangement (BSA) between Bank Indonesia and the Bank of Japan (BoJ) on behalf of Japan's Ministry of Finance of Japan.

Kerjasama tersebut dijalin melalui perjanjian antara Bank Indonesia dengan para pihak dengan tujuan untuk membantu negara yang mengalami masalah neraca pembayaran dan atau kesulitan likuiditas jangka pendek. Perjanjian BSA dimaksud bersifat satu arah di mana hanya Bank Indonesia yang dapat melakukan penarikan (*drawing*).

Selain itu, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama keuangan dengan *People's Bank of China* dalam bentuk perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) yang bertujuan untuk mendukung perdagangan dan investasi kedua negara serta penyediaan likuiditas jangka pendek bagi stabilisasi pasar keuangan dan kerjasama BCSA dengan Bank of Korea yang bertujuan untuk mendukung perdagangan kedua Negara.

Penyediaan kebutuhan tersebut bersumber dari komitmen kontribusi negara anggota yang pengelolaan dan kepemilikannya berada di masing-masing bank sentral negara anggota. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum terdapat permintaan fasilitas dari negara anggota untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas serta tidak ada aktivasi fasilitas oleh Indonesia. Demikian pula untuk kerjasama BCSA, belum ada aktivasi fasilitas oleh kedua belah pihak.

Such cooperation efforts are solidified through agreements made between Bank Indonesia with parties aimed at providing support for countries that undergo balance of payment difficulties and/or short-term liquidity issues. The BSA agreement is singular in direction whereby only Bank Indonesia receives drawing rights.

In addition to this, Bank Indonesia also maintains financial cooperation with the People's Bank of China in the form of a Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) agreement, which seeks to support trade and investment for both countries as well as to provide short-term liquidity to stabilize the financial markets, and a BCSA cooperation with the Bank of Korea that seeks to support the trade between the two countries.

The provision of such needs derives from the commitments of the member countries contributions. The ownership and management of the funds are in the central banks of each member country, There was, as of December 31, 2014, no request for facilities from the member countries to meet liquidity requirements as well as to activate the facility by Indonesia. Similarly, the BCSA cooperation has not been activated by both countries.

Lampiran

Appendixes



Daftar Singkatan

List of Abbreviations and Acronyms

ADB	: Asian Development Bank
AFS	: Available For Sale
AUD	: Australian Dollar
ASA	: ASEAN Swap Arrangement
BBO	: Bank Beku Operasi (<i>Operation- Suspended Bank</i>)
BBKU	: Bank Beku Kegiatan Usaha (<i>Suspended Bank Business Operations</i>)
BCSA	: Bilateral Currency Swap Arrangement
BBM	: Bahan Bakar Minyak (<i>Fuel</i>)
BIS	: Bank for International Settlements
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Liquidity Assistance</i>)
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia Audit Board</i>)
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (<i>Indonesian Bank Structuring Agency</i>)
Bps	: Basis point(s)
BSA	: Bilateral Swap Arrangement
BTO	: Bank Take Over
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah (<i>Local Government Owned Enterprise</i>)
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara (<i>State-Owned Enterprise</i>)
CAD	: Canadian Dollar
DPM	: Departemen Pengelolaan Moneter (<i>Monetary Management Department</i>)
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia House of Representatives</i>)
EUR	: Euro
FASBIS	: Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (<i>Bank Indonesia Sharia Deposit Facility</i>)
FPJP	: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (<i>Short Term Funding Facility</i>)
FPJPS	: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (<i>Sharia Short Term Funding Facility</i>)
FLI	: Fasilitas Likuiditas Intrahari (<i>Intraday Liquidity Facility</i>)
FPN	: Floating Principal Notes
FSD	: Fasilitas Saldo Debet (<i>Debit Balance Facility</i>)
GBP	: Great Britain Poundsterling
GWM	: Giro Wajib Minimum (<i>Minimum Reserve Requirement</i>)
HTM	: Hold To Maturity
IILM	: International Islamic Liquidity Management
IMF	: International Monetary Fund
Indover Bank	: N.V. De Indonesische Overseeze Bank
Perum Jamkrindo	: Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (<i>Indonesia Credit Guarantee Public Service Company</i>)
Jamsostek	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja (<i>Social Security Workers</i>)

JICA	: Japan International Cooperation Agency
JPY	: Japanese Yen
KAKBI	: Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Financial Accounting Policy</i>)
Kejari Jakbar	: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (<i>West Jakarta District Prosecution Office</i>)
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan (<i>Minister of Finance Decree/Decision</i>)
KUT	: Kredit Usaha Tani (<i>Farm Credit Scheme</i>)
LDR	: Loan to Deposit Ratio
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan (<i>Audit Report</i>)
LKTBI	: Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Financial Statements</i>)
Ltd.	: Limited
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia Supreme Court</i>)
Menkeu	: Menteri Keuangan (<i>Minister of Finance</i>)
MRBI	: Manajemen Risiko Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Risk Management</i>)
N.V.	: Naamloze Vennootschap
NZD	: New Zealand Dollar
NWSR	: Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi (<i>Fair Value through Revaluation Difference</i>)
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan (<i>Financial Service Authority</i>)
OMS	: Operasi Moneter Syariah (<i>Sharia Monetary Operations</i>)
ON	: Obligasi Negara (<i>Treasury Bond</i>)
PBI	: Peraturan Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Regulation</i>)
PDG	: Peraturan Dewan Gubernur (<i>Board of Governors Regulation</i>)
PDP2LK	: Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (<i>Fundamental Principles for the Preparation and Presentation of Bank Indonesia Financial Statements</i>)
Pemda	: Pemerintah Daerah (<i>Regional Government</i>)
Persero	: Perusahaan Perseroan (<i>Limited Liability Company</i>)
PKAK	: Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (<i>Statement of Financial Accounting Policy</i>)
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan (<i>Ministry of Finance's Regulation</i>)
PPh	: Pajak Penghasilan (<i>Income Tax</i>)
PRGF	: Poverty Reduction and Growth Facility
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (<i>Statement of Financial Accounting Standards</i>)
PT	: Perseroan Terbatas (<i>Limited Liability Company</i>)
Repo	: Repurchase Agreement
RI	: Republik Indonesia (<i>Republic of Indonesia</i>)
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara (<i>General State Cash Account</i>)
Rp	: Rupiah
RTGS	: Real Time Gross Settlement
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Certificates</i>)
SBIS	: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (<i>Bank Indonesia Sharia Certificates</i>)
SBN	: Surat Berharga Negara (<i>State Marketable Securities</i>)
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara (<i>State Sharia Marketable Securities</i>)
SDBI	: Sertifikat Deposito Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia Certificate of Deposit</i>)

SDM	: Sumber Daya Manusia (<i>Human Resources</i>)
SDR	: Special Drawing Rights
SKB	: Surat Keputusan Bersama (<i>Joint Decision</i>)
SKNBI	: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (<i>Bank Indonesia National Clearing</i>)
SOL	: Subordinated Loan
SSB	: Surat-Surat Berharga (<i>Marketable Securities</i>)
SU	: Surat Utang (<i>Treasury Bonds</i>)
SUN	: Surat Utang Negara (<i>Marketable Treasury Bonds</i>)
SUP	: Surat Utang Pemerintah (<i>Government Bond</i>)
THT	: Tunjangan Hari Tua (<i>Retirement Benefit Program</i>)
TOZ	: Troy Ounce
TP	: Tahun Penyediaan (<i>Provision Year</i>)
TPSL	: Third-Party Securities Lending
TSL	: Two Step Loan
TKHT	: Tunjangan Kesehatan Hari Tua (<i>Retirement Health Plan</i>)
Tuperum	: Tunjangan Pemilikan Rumah (<i>Housing Allowance</i>)
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah (<i>Small Medium Enterprise</i>)
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (<i>Small Medium Micro Enterprise</i>)
UU	: Undang-Undang (<i>Act</i>)
UUD	: Undang Undang Dasar (<i>Constitution of the Republic of Indonesia</i>)
USD	: United States Dollar
Valas	: Valuta Asing (<i>Foreign Exchange</i>)
Yoy	: Year on Year